

Hiwar:
**Tak Cukup Hanya
 Memilih Pemimpin**

47

Sudah lama umat Islam, termasuk para tokohnya, tidak menyadari, bahwa seharusnya ada dua agenda besar umat di ranah politik: Pertama, mewujudkan pemimpin yang baik. Kedua, mewujudkan sistem yang baik. Faktanya, politik umat Islam seolah hanya fokus pada bagaimana mewujudkan pemimpin yang baik. Itu pun faktanya sering gagal. Mereka lupa bahwa ada yang jauh lebih penting, yakni mewujudkan sistem yang baik. Tidak lain adalah sistem Islam.

Soal-Jawab:
**Bagaimana Cara Nabi
 saw Dan Sahabat
 Berpolitik?**

56

Baginda Rasulullah saw. dan para Sahabat tentu berpolitik. Sejak awal dakwah Rasulullah saw. berorentasi kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan akidah dan syariah Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebabnya, Islam—sebagai ideologi—tak akan bisa tegak kecuali dengan kekuasaan. Bagaimana caranya? Inilah yang dibahas dalam rubrik Afkar kali ini.

Iqtishadiyah:
**BRICS, Kekuatan Baru
 Dunia?**

19

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju membuat negara-negara BRICS disebut-sebut dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang dapat menyaingi negara-negara besar seperti AS dan Uni Eropa. BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Pertanyaannya: Betulkah BRICS akan menjadi kekuatan baru dunia?

<i>Pengantar</i>	2	<i>Baiti Jannati</i> : Belajar Politik Sejak Dini	41
<i>Dari Redaksi</i> : Kekuasaan Yang Menolong	3	<i>Lintas Dunia</i>	44
<i>Opini</i>	5	<i>Hiwar</i> : KH Shiddiq al-Jawi: Tak Cukup Hanya Memilih Pemimpin	47
<i>Muhasabah</i> : Gembira Dan Penerapan Syariah Islam	7	<i>Afkar</i> : Merekonstruksi Kesadaran Politik Umat ..	52
<i>Fokus</i> : Hiruk-pikuk Politik Jelang 2024	9	<i>Soal Jawab</i> : Bagaimana Cara Nabi saw Dan Sahabat Berpolitik?	56
<i>Analisis</i> : Pedoman Politik Umat	14	<i>Nisa</i> : Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Islam	60
<i>Iqtishadiyah</i> : BRICS, Kekuatan Baru Dunia? ..	19	<i>Tafsir</i> : Berita Tentang Jin (5)	64
<i>Nafsiyyah</i> : Menjemput <i>Nashrullâh</i> Dengan Menolong <i>Dinullâh</i>	23	<i>Telaah Kitab</i> : Aturan Kepegawaian (Telaah Kitab <i>Muqaddimah ad-Dustûr</i> Pasal 154) ..	68
<i>Siyasah Dakwah</i> : Belajar Dari Kegagalan Politik Umat	26	<i>Hadis Pilihan</i> : Seluruh Rakyat Berhak Memanfaatkan Milik Umum	70
<i>Ibrah</i> : Kebiasaan Baik	30	<i>Takrifat</i> : <i>At-Taghlib</i>	72
<i>Catatan Dakwah</i> : <i>The Secret Life</i>	32	<i>Dunia Islam</i> : Amerika Paling Diuntungkan Dari Perang Saudara Di Sudan	75
<i>Fikih</i> : Apa Bedanya Nabi dengan Rasul? ..	35	<i>Tarikh</i> : Jejak Khilafah Di Sulawesi Menyibak Jalanan Politik & Spiritual yang Dilupakan (6) ..	78
<i>Atsar</i> : Tiga Madrasah Yang Mehmet Fatih Jadikan Istanbul Sebagai 'Rumah Ilmu' ..	38		

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Pembaca yang budiman, Pilpres 2024 memang masih setahun lagi. Namun, hiruk-pikuknya sudah dimulai. Meski capres-cawapres belum ditetapkan, setidaknya ada tiga bacapres yang sudah dimunculkan: Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hawa panas Pilpres 2024 pun sudah bisa dirasakan. Mulai tampak kubu-kubuan. Baik di tingkat elit, parpol, maupun masyarakat secara umum. Masyarakat dan akar rumput sangat jelas masih menaruh harapan besar pada pesta Pilres 2024, sebagaimana pada Pilpres-pilpres sebelumnya. Artinya, mereka tetap percaya bahwa demokrasi adalah jalan perubahan yang harus mereka lalui. Seolah tak ada jalan yang lain.

Yang sangat memprihatinkan, kaum Muslim seolah kehilangan arah. Tak punya pedoman dalam berpolitik, khususnya dalam setiap Pemilu, termasuk Pilpres. Ini terjadi tak hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan elit/politisi Muslim, parpol Islam, bahkan para ulamanya. Misal, tak ada satu pun elit/politisi atau partai Islam yang menyuarakan tentang pentingnya penerapan syariah Islam sebagai satu-satunya jalan perubahan. Bahkan yang ironi, ada partai Islam yang jelas-jelas mendukung penetapan bacapres yang secara terang-terangan hobi nonton film porno dan terindikasi sering nyinyir terhadap Islam dan syariahnya. Dari partai ini pula muncul tokoh-tokohnya yang memandang bahwa keshalihan tidaklah penting bagi seorang calon pemimpin selama dia memiliki kapasitas untuk memimpin.

Yang paling mengherankan, bahkan para ulamanya pun seperti diam seribu basa terkait pentingnya syariah Islam ini diterapkan oleh negara, siapapun pemimpinnya. Selain karena kewajiban dari Allah SWT atas seluruh kaum Muslim, syariah Islam jelas bakal menjadi satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan problematika akut yang mendera bangsa dan negeri ini.

Karena itu tentu penting untuk mengingatkan sekaligus menyadarkan kembali umat ini, termasuk para elit/politisi dan para tokohnya, untuk selalu berpedoman pada al-Quran dan as-Sunnah, di antaranya dalam berpolitik, termasuk dalam Pemilu dan Pilpres. Tanpa berpedoman pada al-Quran dan as-Sunnah, berpegang teguh pada syariah Islam, pasti umat akan selalu kehilangan arah. Pada akhirnya, mereka akan kembali kecewa, sebagaimana telah berkali-kali mereka dikecewakan oleh para pemimpin yang justru telah mereka pilih setiap lima tahun sekali.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).



KEKUASAAN YANG MENOLONG

Tidak bisa dibantah, kekuasaan sangatlah penting. Kekuasaan merupakan otoritas yang membuat seseorang, lembaga atau negara bisa melaksanakan dan mengatur urusan-urusannya. Dengan kekuasaan, negara bisa melaksanakan dan mengatur urusan-urusan rakyatnya. Karena itu politik, dengan makna pengaturan urusan-urusan rakyat, tentu sangat membutuhkan kekuasaan. Negara dengan ideologi apapun pasti membutuhkan kekuasaan. Tanpa kekuasaan, politik akan mandul, negara akan lemah, hukum pun tidak bisa ditegakkan.

Pentingnya kekuasaan ini bisa kita lihat dalam al-Quran. Allah SWT berfirman (yang artinya): Katakanlah (Muhammad): *“Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berilah aku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.”* (TQS al-Isra’ [17]: 80).

Terkait ayat tersebut, Qatadah, seperti yang ditulis dalam Tafsir Ibnu Katsir, mengatakan, “Sesungguhnya Nabi saw. menyadari bahwa dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengemban

tugas (dakwah) ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itu Rasulullah saw. memohon kekuasaan yang menolong kepada Allah untuk membela Kitabullah, batasan-batasan Allah, hal-hal yang Allah fardukan, dan untuk menegakkan agama Allah. Sesungguhnya kekuasaan itu adalah rahmat dari Allah yang Dia berikan di kalangan hamba-hamba-Nya. Seandainya tidak ada kekuasaan ini, tentulah sebagian dari mereka menyerang sebagian yang lainnya, dan yang terkuat di antara mereka akan memakan yang lemah dari mereka.”

Islam telah menegakkan kekuasaan itu dibutuhkan dalam bernegara dan berpolitik. Namun, bukan sembarang kekuasaan, tetapi kekuasaan untuk menolong Islam dan kaum Muslim. Kekuasaan yang menolong ini bisa kita jadikan pedoman untuk membedakan siapa yang sejatinya disebut politisi Islam, siapa pula yang hanya memanfaatkan agama (termasuk Islam). Ini pula yang membedakan antara politisasi agama dan islamisasi politik. Politisasi agama sekadar memanfaatkan agama untuk mendulang suara. Menggunakan simbol-simbol agama, mendatangi pesantren dan masjid, bisa pula



menjadi imam masjid. Namun, setelah berkuasa, alih-alih menolong agama; malah memusuhi agama, bertindak represif terhadap umat Islam yang ingin menegakkan syariah Islam, mengkriminalisasi ulama yang tidak sejalan dengan rezim yang berkuasa, dll.

Sebaliknya, islamisasi politik adalah perjuangan menjadikan politik untuk menegakkan Islam. Kekuasaan yang diperoleh digunakan untuk menerapkan syariah Islam secara total. Inilah kekuasaan yang menolong, yang dibutuhkan umat sekarang ini. Umat membutuhkan bukan sekadar politisi Muslim yang berkuasa, namun tidak menerapkan syariah Islam. Mereka membutuhkan politisi Muslim yang menerapkan syariah Islam. Dengan menerapkan syariah Islam inilah akan terjadi perubahan yang signifikan.

Belajar dari pengalaman politik saat Arab Spring, munculnya politisi yang berakar pada gerakan Islam tidak cukup untuk membawa perubahan. Apalagi menyelesaikan berbagai persoalan rakyat yang justru berpangkal pada penerapan ideologi sekuler.

Dalam menghadapi tahun politik menjelang Pilpres 2024 yang panas ini, umat wajib memiliki pedoman politik yang jelas dan tegas. *Pertama*: Politik haruslah berdasarkan Islam. *Kedua*: Kekuasaan yang didapat dalam politik haruslah kekuasaan yang menolong Islam dan umatnya. *Ketiga*: Politik harus mengarah pada kekuasaan yang bisa melanjutkan kehidupan Islam secara total di bawah naungan Khilafah. *Keempat*: Politik Islam haruslah ditujukan untuk melayani kepentingan umat dan menjaga agama.

Alhasil, untuk dinamika politik ke depan, yang dibutuhkan umat bukan hanya pemimpin yang baik, tetapi juga sistem yang baik. Semua itu hanya terwujud saat Islam menjadi asas dalam politik dan syariah Islam menjadi standar dalam berpolitik.

Umat saat ini membutuhkan pertolongan *ahlul nushrah*, yang memiliki kekuasaan riil

untuk menolong Islam, seperti *ahlul nushrah* pada masa Rasulullah dari suku Aus dan Khazraj. Dengan kekuasaan yang diberikan kabilah utama Madinah ini, Rasulullah saw. bisa membangun Daulah Islam (Negara Islam) yang berdasarkan Islam, menerapkan syariah Islam dan menyebarkan dakwah Islam.

Saat ini umat membutuhkan para perwira militer yang memberikan *nushrah*-nya untuk tegaknya Islam. Ini adalah amal yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah SWT. Seabnya, dengan kekuasaan yang diberikan itu, Islam benar-benar terwujud dalam kehidupan; bukan hanya dalam konteks individu atau keluarga saja, tetapi juga negara. Inilah kesempatan emas para *ahlul nushrah* untuk mendapatkan kedudukan yang mulia ini.

Kemuliaan ini pernah diraih oleh Sahabat Rasulullah saw., Saad bin Muadz ra. Tokoh terkemuka Madinah ini memberikan kekuasaannya untuk perjuangan Rasulullah saw. hingga Islam terwujud dalam seluruh aspek kehidupan melalui institusi politik negara. Negara Islam ini kemudian menjadi negara adidaya yang berpengaruh di seluruh dunia. Karena itu Rasulullah saw. sangat kehilangan ketika Saad bin Muadz wafat. Rasulullah saw. menggambarkan kemuliaan Saad bin Mu'adz dengan menyatakan, "Sungguh, kematian Saad telah membuat 'Arya Allah terguncang."

Kekuasaan yang menolong ini merupakan janji Allah SWT kepada kaum yang beriman. Imam Ibnu Katsir mengutip pernyataan Al-Hasan al-Bashri dalam tafsir QS al-Isra' ayat 80: "Allah menjanjikan kepada Nabi saw. bahwa Dia benar-benar akan mencabut Kerajaan Persia dan kejayaannya, dan Dia benar-benar akan memberikan hal itu kepada beliau. Allah juga benar-benar akan mencabut Kerajaan Rumawi dan kejayaannya, lalu Dia memberikan hal itu kepada beliau."

Allaahu Akbar! [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

NARASI RADIKALISME DAN POLITIK IDENTITAS

Hilmy Abu
Fabian
(Geopolitical
Institute)



Isu radikalisme dan politik identitas jelang Pemilu 2024 terus digoreng. Isu ini pada umumnya dikaitkan dengan

Islam atau kaum Muslim sebagai upaya untuk membangun persepsi negatif tentang agama dan umat ini. Bahkan mereka yang melemparkan isu radikalisme itu juga sadar bahwa realita radikalisme itu, walaupun ada, bukanlah ancaman seperti yang disuarakan.

Bahkan sebelumnya muncul pemetaan masjid dikaitkan dengan isu radikalisme, juga tuduhan terhadap ratusan pondok pesantren terkait terorisme. Lagi-lagi semua itu menampilkan wajah islamofobia dan menimbulkan dugaan adanya *framing* negatif dan tidak adil terhadap umat Islam.

Serangan islamofobia bukan hanya menyangkut serangan terhadap ajaran Islam. Ia juga merupakan serangan pada bidang ekonomi, politik, pendidikan dan budaya, serta militer. Bahkan ia membuat disintegrasi dan separatisme di sebuah negara NKRI yang dihuni mayoritas kaum Muslim.

Sebagai contoh kejadian di Wamena dituduh akibat berkembangnya gerakan radikal (Islam) di sana. Padahal nyata yang menginginkan disintegrasi dari Indonesia adalah gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Bahkan gerakan tersebut tidak tersentuh sama sekali.

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang memiliki anggaran untuk program deradikalisasi sebesar Rp 169 miliar ini dinilai masih belum dapat memberangus para teroris dari berbagai kelompok di Indonesia.

Di sisi lain, perekonomian hancur, seks bebas di kalangan remaja marak, gelombang LGBT yang menyerbu, dll karena sistem ekonomi-sosial yang diterapkan adalah sistem kapitalisme liberal. Di bidang politik, yang dibangun adalah politik dagang sapi, yang melahirkan politikus oportunis dan pragmatis. Oleh karena itu, cengkeraman kapitalisme membuat rakyat menderita, mati, dan terhina di tengah kekayaan alam yang melimpah. Para penguasa berkolaborasi dengan para kapitalis mengamademen UUD '45 satu-persatu demi kepentingan mereka.



Kampanye deradikalisasi cukup berbahaya untuk umat Islam. Potensi penyimpangan terhadap tafsir nash-nash syariat sangat dimungkinkan terjadi. Contohnya adalah upaya *tahriif* (penyimpangan) pada makna *jihad*, *tasaamuh* (toleransi), *syura* dan *demokrasi*, *hijrah*, *thaaghuut*, *Muslim* dan *kafir*, *ummat[an] washat[an]*, *klaim kebenaran*, doktrin konspirasi (QS al-Baqarah [2]: 217), serta upaya mengkriminalisasi dan monsterisasi terminologi *Daulah Islam* dan *khilafah*. □

ISU RADIKALISME BUNGKAM AKTIVIS ISLAM?

Rantika Nur
Asyifa



Para pendengki Islam, baik negara-negara Barat maupun para antek-anteknya di negeri-negeri Muslim, senantiasa melakukan permusuhan

terhadap Islam dan kaum Muslim. Setelah jargon terorisme tidak laku, kini jargon baru digunakan untuk menyerang Islam: radikalisme.

Sama seperti jargon sebelumnya, definisinya dibuat multitafsir sehingga memungkinkan untuk menggebut siapa saja, baik yang masuk dalam definisi tersebut maupun yang dianggap mengancam negara ala rezim yang berkuasa saat ini.

Setiap kelompok Islam yang kritis dan bersebrangan dengan sepak terjang penguasa senantiasa dicap kelompok radikal. Ironisnya, stigma negatif kelompok radikal itu disematkan hanya pada kelompok Islam saja dan tidak berlaku bagi kelompok di luar Islam.

Istilah *radikal* menjadi alat propaganda yang digunakan untuk kelompok atau negara yang berseberangan dengan ideologi dan kepentingan Barat. Penggunaan istilah “Islam Radikal” sering dikaitkan dengan terorisme, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, skriptualis (hanya merujuk pada teks) dalam menafsirkan agama, menolak pluralitas (keberagaman) dan julukan-julukan yang dimaksudkan untuk memberikan kesan buruk.

Istilah tersebut juga digunakan secara sistematis untuk menyebut pihak-pihak yang menentang sistem ideologi Barat (Kapitalisme, Sekularisme, dan Demokrasi), ingin memperjuangkan syariah Islam, Khilafah Islam, menginginkan eliminasi Negara Yahudi dan melakukan jihad melawan Barat. Pantas saja, jika ada kesimpulan di masyarakat bahwa istilah radikalisme sengaja dibuat oleh Barat untuk menghancurkan umat Islam.

Isu radikalisme yang kembali di-*trending*-kan pada opini publik sejatinya adalah dalam rangka mengalihkan persoalan dari kegagalan kapitalisme-liberalisme di negeri ini. Korupsi menjerat para pejabat dan politisi semakin masif. Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh asing dan aseng semakin tak terbendung. Kenaikan BBM dan tarif dasar listrik serta kebijakan pengutan pajak yang semakin mencekik rakyat terus terjadi.

Proyek radikalisme, yang sesungguhnya bentuk permusuhan terhadap Islam, akan menuai kegagalan atas izin Allah SWT. Sebabnya, proyek ini justru akan mempertebal keyakinan umat Islam atas kebenaran agamanya, dan semakin memperbesar ketidakpercayaan umat terhadap para penguasa sekular yang anti Islam. Jika ini terjadi, insyaAllah, pertolongan Allah SWT akan diturunkan kepada Kaum Muslim dalam waktu yang tidak akan lama lagi.

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. □



GEMBIRA DAN PENERAPAN ATURAN ISLAM

Muhammad Rahmat Kurnia

Gembira. Itulah salah satu yang penting dirasakan oleh seorang Muslim yang berpuasa. “Gembira seperti itu disyariatkan,” ungkap KH Rohmat S. Labib dalam suatu acara Halal Bihalal para tokoh di Jakarta pada Syawal tahun 1444H beberapa waktu lalu. Beliau lalu mengutip Hadis Rasulullah saw., “*Bagi yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan; kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Allah SWT mensyariatkan segala sesuatu. Dialah yang menetapkan hukumnya, termasuk gembira. “Apa hukum puasa?” tanya penulis buku Tafsir *al-Waie* tersebut. Para hadirin pun serentak menjawab, “Wajiiibb...”

Ustadz Labib, begitu biasa saya memanggil beliau, segera merespon, “Puasa itu hukumnya haram...kalau puasa yang dimaksud adalah puasa pada Hari Raya Idul Fitri. Namun, jika puasa itu sebelum Idul Fitri, yakni Puasa Ramadhan maka hukumnya wajib. Berbeda lagi kalau puasa sesudah Idul Fitri, yakni Puasa Syawal, itu hukumnya sunnah. *Masnuun[un]* alias disunnahkan.”

“Jadi, puasa itu belum tentu baik. Kalau puasa pada saat hari lebaran, itu haram hukumnya. Tentu saja buruk. Sebaliknya, puasa pada saat Ramadhan atau puasa Syawal itu baik. Karena itu baik buruk sesuatu itu ditentukan oleh aturan dari Allah SWT,” pungkasnya.

Begitu halnya dengan bahagia. “Memangnya urusan seperti ini diurusin juga ya oleh ajaran Islam?” tanya Kang Iman sambil berbisik kepada saya.

“Lha iyalah,” jawab saya pendek. Lalu, saya jelaskan sedikit. Bahagia itu, bisa baik bisa buruk.

“Kok bisa?” tanyanya.

“Bisa baik kalau pada saat Idul Fitri. Buktinya, pada zaman Rasulullah saw., ketika Idul Fithri beliau memerintahkan mengenakan pakaian terbaik. Bahkan beliau menganjurkan menyediakan makanan yang bagus. Bukan sekadar itu, pernah beberapa budak (*jaariyah*) menabuh rebana sambil bernyanyi di hadapan beliau,” ujar saya. “Itu semua menggambarkan suasana gembira pada hari raya,” saya tambahkan.

“Lalu kalau bahagia yang dilarang bagaimana? Ada *emang*-nya?” tanya Kang Iman lagi.

Saya sampaikan, “Coba ingat-ingat, Rasulullah saw. pernah mencontohkan hal ini,” ucap saya. Lalu saya menjelaskan Hadis Rasulullah saw., “Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmati dia dan justru memberi kamu musibah.” (HR at-Tirmidzi).

Contoh lain, Allah SWT melarang seorang Mukmin menampakkan kebahagiaan ketika perbuatan buruk seseorang tersebar. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh orang-*

orang yang senang karena berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat (TQS an-Nur [24]:19).

Jelaslah, gembira itu bisa baik, bisa buruk. Bisa terpuji atau bisa juga tercela. Penentunya apa? Hukum Allah SWT. “Ini berarti kebahagiaan itu harus ada dasarnya ya, Tadz?” ungkap Kang Iman.

Saya pun segera merespon, “Iya, *atuh!*” Lebih dari semua itu, setiap perkara harus terikat dengan aturan Allah SWT. Baik dan buruk harus terikat dengan aturan Allah SWT. Jadi, taat itulah yang menjadi landasan.

“Kalau begitu, pada saat lebaran harus gembira pada suatu hal dan sedih pada hal yang lain,” komentar Mas Budi.

Ya. Sekadar contoh, di Indonesia prosentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen. Kurang lebih 26,36 juta orang. Tentu, ini bukan jumlah sedikit. Apalagi jika tolok ukurnya seperti permintaan Bank Dunia kepada Indonesia berdasarkan paritas daya beli. Selama ini, ukuran yang Pemerintah gunakan sejak 2011 sebesar US\$ 1,9 perhari. Jika tolok ukur garis kemiskinan yang digunakan adalah paritas daya beli melalui besaran pendapatan sebesar US\$ 3,20 perhari, maka akan menyebabkan 40% masyarakat malah tergolong orang miskin. “Ketika dinaikkan menjadi 3 dolar AS, mendadak 40 persen orang menjadi miskin,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani (12/5/2023).

Realitas ini tentu saja menjadikan kita sesak dada. Sedih. Bukan malah bahagia, lalu petantang-petenteng pamer Rubicon, tas miliaran rupiah, atau perilaku bahagia lainnya.

Selain merasa teriris hati, kondisi itu pun sejatinya menjadikan kita terus berupaya menolong sesama. Kata Nabi saw., “*Siapa saja yang menghilangkan kesulitan seorang*

Mukmin di dunia maka Allah akan menghilangkan kesulitan orang tersebut nanti di akhirat.” (HR Muslim).

Beliau juga bersabda, “*Peliharalah hartamu dengan zakat. Obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Hadapilah cobaan dengan doa.*” (HR ath-Thabarani).

Pemberdayaan zakat pun bisa digalakan untuk menolong fakir miskin dan para *mustadh’afin*, kaum yang lemah. “Iya, jika serius potensi zakat kita itu besar,” ucap Kang Iman lagi.

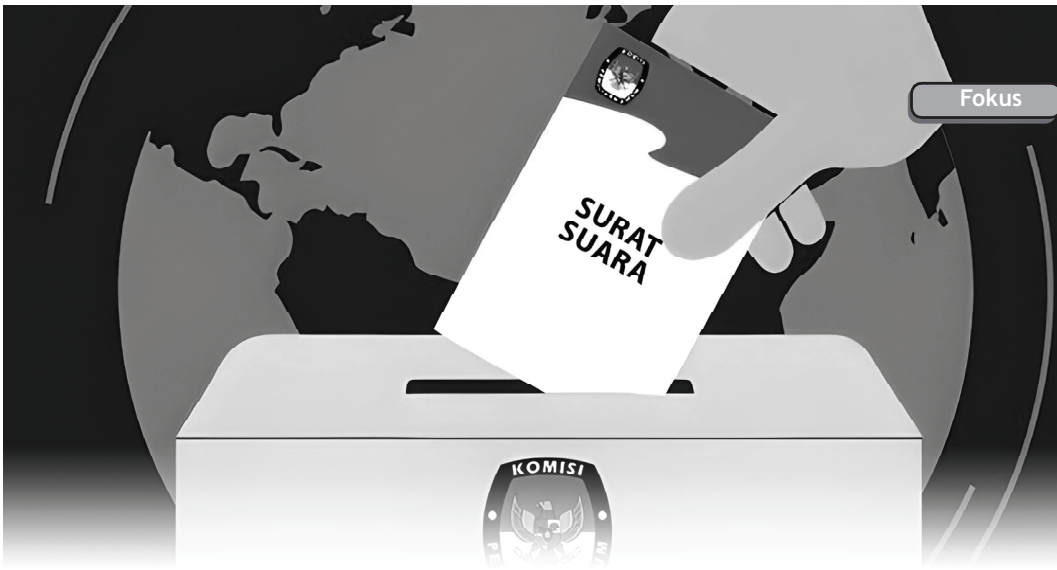
Ucapan tersebut rasanya benar. Sejauh pengetahuan saya, pada tahun 2022 zakat yang diperoleh sebanyak 15,6 triliun dengan jumlah *muzakki* sebanyak 3,6 juta orang. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun pertahun dengan potensi jumlah *muzakki* sebanyak 72 juta orang. Jika ini dilakukan dengan konsisten maka akan menjadi salah satu lorong penyelamatan. Pertanyaannya: Mungkinkah pemerintahan yang tidak menerapkan aturan Islam dapat melakukan pemberdayaan seperti itu?

“Apalagi kalau sumberdaya alam diolah oleh negara untuk rakyat. Tidak diserahkan kepada asing atau segelintir konglomerat,” Mas Budi menanggapi.

Saya sampaikan, betul. Dalam Islam tidak ada yang namanya privatisasi untuk harta yang masuk kepemilikan umum. Kata Rasulullah, “*Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan energi (api).*” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Pertanyaannya lagi, mungkinkah pemerintahan yang tidak menerapkan aturan Islam dapat mengelola sumberdaya alam seperti itu? Hampir tidak mungkin. So, kegembiraan itu harus dibarengi dengan penerapan aturan Islam secara *kaaffah*.

Wallahu a’lam. []



HIRUK-PIKUK POLITIK JELANG 2024

Luthfi Afandi

Direktur Pusat Kajian Islam Kaffah

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024, bakal calon presiden (bacapres) sudah mulai dideklarasikan oleh parpol-parpol pendukungnya. Bacapres pertama yang dideklarasikan dan memenuhi syarat *presidential threshold* 20% kursi di DPR adalah Anies Baswedan. Anies diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Berikutnya ada Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP dan Partai Hanura.

Bacapres lainnya adalah Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Walaupun demikian, koalisi ini tampaknya masih sangat mungkin berubah. Pasalnya, hingga hari ini Prabowo belum resmi menjadikan Muhaimin Iskandar yang juga Ketum PKB sebagai bakal cawapresnya. Belakangan, ada sinyal dari beberapa partai yakni PAN, PBB dan Perindo yang akan mendukung Prabowo menjadi capres.

Adapun koalisi yang masih sangat cair bahkan terancam bubar adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang awalnya diinisiasi tiga parpol, yakni Golkar, PAN dan PPP.

Belakangan, PPP secara resmi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan PAN terlihat memberikan sinyal akan mendukung Prabowo Subianto.

Alhasil, hingga sebelum pendaftaran bakal calon presiden pada tanggal 19 Oktober 2023, peta koalisi masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan, bahkan bisa jadi pada saat-saat *injury time* sekalipun.

Kekuatan Oligarki di Balik Capres

Siapapun pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024 nanti, kekuatan yang tidak mungkin tidak ada dalam Pilpres di dalam sistem demokrasi adalah adanya kekuatan oligarki di belakang semua pasangan capres-cawapres. Secara sederhana oligarki bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan politik di tangan segelintir orang (*rule by the few*) atau kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir kaum kaya.

Di Indonesia, dalam sebuah webinar (9/6/2020) yang diselenggarakan KPK, Profesor Jeffrey Winters, Chair of the Department of Political Science, Northwestern University, menyebutkan bahwa hampir 100 persen dana

kampanye yang digunakan partai politik di Indonesia berasal dari para oligarki.

Oligarki tentu memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap siapa yang akan menjadi presiden karena itu akan menentukan “nasib” bisnis mereka. Di antara tujuan oligarki mendukung pasangan capres-cawapres adalah untuk melindungi dan mengamankan kekayaannya dari redistribusi, semisal pajak dan korupsi, juga agar dekat dengan kekuasaan. Dengan itu mereka dapat mempengaruhi penguasa sehingga terhindar dari kesulitan dalam perizinan, pengembangan bisnis dan berbagai gangguan lainnya. Oligarki juga bertujuan agar bisnis mereka berkembang besar dan menggurita dengan dukungan dari kekuasaan.

Di sisi lain para politisi tentu membutuhkan dana yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi politik Pilpres. Jadi hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam sistem

demokrasi sejatinya seperti *symbiosis mutualisme*, yakni saling membutuhkan satu sama lain.

Para oligarki ada yang dikenal luas oleh publik bahkan ada yang mendirikan partai politik, semisal Surya Paloh yang mendirikan Partai Nasdem, Hary Tanoesoedibjo yang mendirikan Partai Perindo, dan Prabowo Subianto yang mendirikan Partai Gerindra. Selain mereka, tentu lebih banyak lagi di antara para oligarki yang tidak dikenal bahkan tidak ingin dikenal oleh publik. Mereka bermain di belakang layar, tetapi pengaruh mereka sangat besar. Bahkan sejatinya, mereka bersama para ketua umum partai politik yang menentukan siapa capres-cawapresnya. Rakyat hanya tinggal memilih pilihan para oligarki.

Saat ini, setidaknya ada tiga nama bakal calon presiden yang potensial. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Pertanyaannya, dari ketiga nama tersebut, adakah yang steril dari oligarki? Mari kita lihat satu persatu.

Pertama: Ganjar Pranowo. Publik tentu memahami bahwa selain berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, Ganjar Pranowo terlihat dengan jelas di-*endorse* dan di-*backup* oleh Jokowi. Kehadiran Jokowi ketika Megawati mengumumkan Ganjar sebagai bakal capres dari PDIP, bahkan ketika keduanya terlihat satu mobil dan pesawat, secara politis tentu dapat dipahami bahwa Ganjarlah bakal capres yang direstui istana. Pesan politis ini pasti dengan sangat mudah dapat dipahami oleh oligarki yang selama ini berada di belakang Jokowi. Dukungan logistik dari oligarki yang selama dua kali Pilpres diberikan kepada Jokowi hampir pasti akan diberikan juga kepada Ganjar Pranowo.

Kedua: Prabowo Subianto. Selain sebagai seorang politisi, jangan lupa Prabowo juga merupakan pengusaha yang memiliki kekayaan fantastis. Tercatat kekayaannya lebih dari 2 triliun rupiah. Prabowo memiliki beberapa

Oligarki tentu memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap siapa yang akan menjadi presiden karena itu akan menentukan “nasib” bisnis mereka. Di antara tujuan oligarki mendukung pasangan capres-cawapres adalah untuk melindungi dan mengamankan kekayaannya dari redistribusi, semisal pajak dan korupsi, juga agar dekat dengan kekuasaan. Dengan itu mereka dapat mempengaruhi penguasa sehingga terhindar dari kesulitan dalam perizinan, pengembangan bisnis dan berbagai gangguan lainnya.

perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, batubara, kelapa sawit, perkebunan, hingga pengolahan kertas. Untuk mengelola bisnisnya, Prabowo memiliki tidak kurang dari delapan perusahaan raksasa yang menguasai ratusan ribu hektar lahan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan portofolio seperti itu, tidak berlebihan jika Prabowo sejatinya juga merupakan salah seorang elit di lingkaran oligarki. Yang terang-terangan berada di belakang Prabowo adalah adiknya sendiri, Hasyim Djojohadikusumo, yang menurut Forbes kekayaannya tidak kurang dari 11 triliun rupiah.

Ketiga: Anies Baswedan. Anies memang bukan seorang pengusaha, bahkan bisa dibilang capres “termiskin”. Namun, jangan lupa, Anies didukung oleh Partai Nasdem yang didirikan Surya Paloh, seorang pengusaha yang menempati posisi ke-77 dari daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia. Bisnisnya menggurita, mulai dari bisnis media, pertambangan, perhotelan dan penyedia makanan catering untuk perusahaan-perusahaan besar. Secara terang-terangan, dalam perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem di JCC (11/11/2022), Surya Paloh mengatakan tidak menutup mata jika pihaknya ingin agar ada pemodal besar untuk membantu dalam menghadapi kontestasi nasional mendatang.

Alhasil, tidak ada satu pun bakal capres yang steril dari oligarki.

Pragmatisme Politik

Sistem demokrasi sekuler selalu akan melahirkan politik yang pragmatis, bukan idealis apalagi ideologis. Pragmatisme politik ini tidak bisa dihindari. Peralunya, semua keputusan politik di dalam sistem demokrasi merupakan hasil kompromi berbagai kepentingan elit politik. Dalam konteks Pilpres, acuan elit politik dan oligarki adalah “siapa yang berpeluang menang lebih besar” dan “saya mendapatkan apa?” Karena itu jika ada

orang yang memiliki kapabilitas dan integritas yang baik, memiliki gagasan yang cemerlang, tetapi tidak ada dalam radar survey, jangan harap bisa dicalonkan partai politik.

Elit partai politik pun akan membentuk atau bergabung di dalam koalisi yang memungkinkan dirinya mendapatkan jatah kue kekuasaan. Karena itu, dinamika yang selalu terjadi di setiap kali helatan Pilpres bukanlah untuk mendukung calon yang memiliki kesamaan visi dan misi, tetapi berada di dalam koalisi yang memiliki kesamaan persepsi tentang jatah kursi.

Umat Kehilangan Parpol dan Tokoh Ideologis

Di tengah dinamika perpolitikan di Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata umat Islam tidak menjadikan partai Islam atau yang berbasis massa Islam sebagai pilihan. Bahkan menurut Ade Mulyana, peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI), dalam Pemilu 2024, partai berbasis Islam secara keseluruhan potensial dukungannya menurun. Bahkan menurut dia, partai berbasis Islam potensial dukungannya paling kecil sepanjang sejarah Pemilu bebas di Indonesia.

Peneliti LSI lainnya, Adji Al-Faraby, menyimpulkan 3 alasan partai Islam mengalami kemerosotan di mata masyarakat pemilih. Di antaranya: *Pertama*, partai Islam selama ini dalam kampanyenya dianggap terlalu menunjukkan simbol dan wacana yang sifatnya terlalu umum. Seharusnya, menurut Adji, partai-partai Islam berbicara pada hal-hal yang lebih konkret, seperti menawarkan kesejahteraan pada masyarakat. *Kedua*, terkait masalah integritas. Masyarakat mengharapkan munculnya tokoh-tokoh Islam yang menjadi teladan. Jauh dari kasus-kasus korupsi yang selama ini menjadi penyakit moral bangsa ini. *Ketiga*, menurut Adji, adanya pihak-pihak yang melakukan upaya akomodatif terhadap

kepentingan Islam. Hal ini yang menjadikan partai Islam kehilangan para pemilihnya dan beralih ke Partai Nasionalis.

Dari hasil riset tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran partai Islam belum bisa secara penuh memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam serta belum mampu menawarkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Padahal sejatinya, jika mengaku sebagai partai Islam, di dalam Islam sendiri sudah secara lengkap dan komprehensif mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk solusi dari problematika yang dihadapi umat manusia.

Tampaknya partai Islam sendiri masih malu-malu atau bahkan malah takut menampilkan jatidiri sebagai partai Islam dengan menawarkan syariah Islam sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Alih-alih menawarkan syariah Islam, partai Islam malah terjebak dalam kubangan demokrasi sekuler yang semakin menjauhkan umat dari Islam. Keberadaan partai Islam juga masih dianggap publik hanya memperjuangkan kepentingan elit partai, bukan kepentingan rakyat banyak.

Tokoh-tokoh dari partai Islam juga masih belum benar-benar teruji kapabilitas dan integritasnya. Gagasan yang disampaikan ke publik tidak memiliki pembeda dengan gagasan yang disampaikan tokoh-tokoh sekuler. Alih-alih berbicara syariah Islam sebagai solusi, tokoh-tokoh Islam malah latah menawarkan konsep politik demokrasi, ekonomi kapitalisme, dan sistem hukum sekuler. Tidak pernah kita mendengar tokoh-tokoh Islam menawarkan dan mengajak elit dan publik agar memperjuangkan tegaknya syariah Islam secara *kaaffah*.

Dalam hal integritas, kita masih melihat setali tiga uang dengan tokoh-tokoh dari partai sekuler. Tidak sedikit tokoh dari partai Islam yang terlibat kasus korupsi dan masalah moral lainnya sebagaimana halnya yang terjadi pada

tokoh dari partai sekuler. Karena itu publik melihat, tidak ada bedanya tokoh partai Islam dengan tokoh partai sekuler.

Masih Berharap pada Sistem Demokrasi?

Setiap kali Pemilu dan Pilpres, umat Islam selalu dirayu dan diberi harapan-harapan agar mau memilih partai Islam yang mereka tawarkan, agar mau mencoblos pasangan capres-cawapres yang mereka calonkan. Sambil diiringi narasi, agar terjadi perubahan yang lebih baik, agar rakyat sejahtera, agar umat Islam tidak dizalimi, agar aspirasi umat Islam dapat direalisasikan, dan lain-lain.

Pertanyaannya: Apakah sistem demokrasi akan mampu merealisasikan harapan masyarakat dan akan mampu mengakomodir penerapan syariah Islam? Apakah sirkulasi elit dan rezim melalui Pemilu dan Pilpres akan mampu membawa perubahan besar ke arah yang lebih baik?

Setiap sistem pasti memiliki mekanisme untuk mempertahankan dan mengokohkan sistemnya. Tak terkecuali sistem demokrasi. Mekanisme pertahanan dan pengokohan sistem demokrasi dibingkai dengan aturan main yang wajib disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat, dalam hal ini oleh elit dan partai politik. Aturan main yang dianggap sakral dan fundamental sehingga tidak boleh diubah atau diganti oleh siapapun mereka labeli dengan istilah "harga mati". Jadi, siapapun yang terlibat dalam sistem demokrasi, tidak akan berani menyentuh apalagi mengubah perkara yang dianggap sebagai harga mati.

Demokrasi juga memiliki mekanisme agar sistemnya berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Untuk itu, mereka membuat event sirkulasi elit yang dilakukan secara berkala. Event sirkulasi elit ini dikemas dengan nama pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Sebagaimana

tujuannya, di Indonesia event Pemilu, Pilkada dan Pilpres hanyalah mekanisme untuk mengganti elit dan rezim semata, mulai dari anggota dewan, kepala daerah hingga presiden. Tidak lebih dari itu.

Karena itu sistem demokrasi memang sangat memungkinkan dijadikan jalan untuk menempatkan para aktivis dan tokoh Muslim menjadi pejabat di berbagai level; menjadi anggota dewan, bupati, walikota, gubernur hingga presiden. Namun, sistem demokrasi tidak memberikan ruang sedikitpun bagi penerapan syariah Islam secara total atau perubahan yang sifatnya fundamental.

Karena itu berharap bahwa sistem demokrasi dan sirkulasi elit ataupun rezim melalui Pemilu, Pilkada dan Pilpres akan mampu membawa perubahan besar ke arah Islam adalah harapan kosong yang tidak akan pernah bisa terwujud.

Banyak Merugikan Umat

Disadari atau tidak, sistem demokrasi sekuler telah banyak merugikan umat Islam. Kerugian terbesar umat Islam adalah ketika di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, faktanya umat Islam tidak dapat menerapkan syariah Islam secara *kaaffah*. Sistem demokrasi telah menghalangi umat Islam menerapkan syariahnya sendiri.

Kerugian berikutnya, demokrasi adalah sistem yang akan memuluskan agenda oligarki dan asing melalui agen-agensya di partai politik dan pemerintahan. Kita tahu, di antara agenda oligarki dan asing adalah penguasaan kekayaan sumberdaya alam di negeri ini untuk kepentingan mereka. Ketika kekayaan alam negeri ini dikuasai mereka, pihak yang paling dirugikan adalah rakyat Indonesia. Tentu karena oligarki dan asing tidak pernah mempedulikan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kerugian selanjutnya adalah energi umat Islam yang seharusnya difokuskan untuk

Karena itu sistem demokrasi memang sangat memungkinkan dijadikan jalan untuk menempatkan para aktivis dan tokoh Muslim menjadi pejabat di berbagai level; menjadi anggota dewan, bupati, walikota, gubernur hingga presiden. Namun, sistem demokrasi tidak memberikan ruang sedikitpun bagi penerapan syariah Islam secara total atau perubahan yang sifatnya fundamental.

perjuangan penegakan syariah Islam secara *kaaffah* menjadi teralihkan oleh agenda politik sekuler. Umat seolah-olah merasa telah berjuang untuk Islam. Padahal mereka hanya dimanfaatkan untuk melanggengkan sistem politik demokrasi sekuler. Suara mereka hanya dijadikan alat legitimasi oleh kekuasaan. Bahkan lebih parah dari itu, mereka hanya dijadikan sebagai pendorong mobil mogok, setelah mobilnya berjalan, rakyat dan umat ditinggalkan.

Karena itu sudah saatnya umat Islam sadar bahwa sistem politik demokrasi, selain bertentangan dengan Islam, sejatinya telah banyak merugikan kaum Muslim. Sudah saatnya energi umat ini difokuskan untuk perjuangan yang sebenarnya, yakni menerapkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan dalam naungan Khilafah yang tegak di atas *manhaj* kenabian.

Wallahu a'lam. []

PEDOMAN POLITIK UMAT

Dr. Riyan, M.Ag.

(Pengamat Politik Islam)

"We must put an end to anything which brings about any Islamic unity between the sons of the muslims. The situation now is the turkey is dead and will never rise again, because we have destroyed its moral strength: The Chaliphate and Islam." (Lord Curzon)¹

"Yang harus ditakuti oleh Pemerintah Hindia Belanda "bukan Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik". Biasanya dipimpin oleh minoritas kecil ulama yang fanatic, yakni mereka yang membaktikan diri kepada cita-cita Pan-Islamisme, yang jika pengaruhnya menyebar ke desa-desa akan sangat berbahaya. Karena itu disarankan supaya pemerintah "bertindak netral terhadap Islam sebagai agama dan tegas kepada doktrin politiknya." (Christian Snouck Hurgronje)²

Sua kutipan di atas memberikan pernyataan yang sangat jelas bagaimana pemahaman orang-orang kafir untuk melemahkan Islam. Kutipan Curzon menegaskan peran Islam (*kaaffah*) sebagai inti dan rahasia kekuatan kaum Muslim dan institusi Khilafah sebagai pemersatu dan pelindung umat Islam.

Adapun kutipan Snouck menggambarkan doktrin sekulerisme, paham yang memisahkan agama dari kehidupan (termasuk politik), yang harus diterapkan pada Islam, agar tidak menjadi kekuatan yang membahayakan

kepentingan kolonial penjajah Belanda.

Politik Harus Mengabdikan pada Islam dan Umatnya

Islam adalah agama yang sempurna. Politik adalah bagian dari ajaran Islam. Makna politik yang dimaksud adalah pengaturan urusan masyarakat, baik di dalam dan di luar negeri, dengan hukum Islam.³ Dengan demikian Islam tidak hanya sekadar sebagai ajaran ritual-spiritual (*mahdhab*), tetapi juga ajaran politik-muamalah (*ghayru mahdhab*).

Seorang Muslim, ketika mempraktikkan

politik, harus untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Bukan untuk kepentingan selain Islam dan untuk kepentingan selain umat Islam. Politik tidak boleh untuk kepentingan sekulerisme-demokrasi-kapitalisme atau materialisme-sosialis-komunisme. Politik juga tidak boleh diabdikan kepada segelintir orang (oligark-pemodal), baik lokal dan asing atau kepentingan pimpinan partai.⁴

Siapa saja yang memberikan loyalitas kepada selain Islam niscaya akan tertolak (Lihat: QS al-Imran [2]: 85). Karena itu sungguh tidak layak seorang pemimpin Muslim justru menyerukan sekulerisme atau pemisahan agama dan politik.^{5,6,7} MUI telah memberikan fatwa pada 2005 M, tentang haramnya sekulerisme, liberalisme, pluralism. Seharusnya ini menjadi pedoman dalam mengelola politik. (<https://koran.tempo.co/read/nasional/46924/mui-haramkan-pluralisme-sekularisme-dan-liberalisme-agama>)

Dasar Politik Harus Islam

Jelas, dasar berpolitik seorang Muslim adalah iman, tauhid, akidah islamiyah. Berpolitik harus didasarkan pada ketentuan syariah Islam. Bukan sekulerisme atau materialisme. Bukan kapitalisme-demokrasi-liberal. Bukan pula sosialisme-komunisme.

Siapa saja yang menerapkan aturan selain Islam sebagai hukum dalam kehidupan, mereka adalah kafir (bila disertai *i'tiqaad* [keyakinan bulat]), zalim atau fasik (QS al-Maidah [5]: 44,45 dan 47).

Tidak ada pilihan bagi seorang Muslim, kecuali berjuang sepenuh jiwa dan raga sampai mati untuk kedaulatan ideologi (*mabda*) Islam (Lihat: QS Ali Imran [3]: 102).

Arah Politik Islam

Oleh karena itu, arah politik seorang Muslim adalah memperjuangkan tegaknya syariah Islam secara *kaaffah* (Lihat: QS al-

Baqarah [2]: 208). Allah pasti akan menolong perjuangan kaum Muslim yang menolong agama-Nya. Dengan itu kaum Muslim akan senantiasa kokoh kedudukannya (Lihat: QS Muhammad [47]: 7).

Pasca Khilafah Islam yang berpusat di Istanbul dihancurkan pada 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan 3 Maret 1924 M, pelaksanaan syariah Islam secara total berhenti. Karena itu, tugas umat Islam saat ini adalah melanjutkan kehidupan Islam secara sempurna (*isti'naful hayatil islamiyah*) yang ditandai dengan penerapan syariah Islam secara *kaaffah* dalam institusi Khilafah Islam.

Di sinilah dibutuhkan dakwah kolektif dalam bentuk pergulatan pemikiran dan perjuangan politik Islam yang hakiki melalui partai politik Islam ideologis⁷ yang benar-benar bertujuan menerapkan seluruh syariah Islam melalui negara Khilafah. Sebabnya, Khilafahlah satu-satunya institusi yang akan menerapkan seluruh ajaran Islam sesuai contoh Nabi saw. Allah SWT berfirman:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyerukan kebajikan (Islam) serta melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Wajib menolak Sekulerisme dan Partai-partai Pendukungnya

Politik Islam akan tegas menolak sekulerisme, sebagaimana materialisme, maupun para pengusung dan partai-partainya. Peralnya, meskipun dijalankan oleh orang-orang Islam, nilai sekuleristik dan materialistiklah yang mendominasi warna politik, perilaku partai politik dan sistem



pemerintahan demokrasi yang dipraktikkan. Tidak aneh, banyak sekali kejahatan dalam bentuk korupsi, misalnya. Terjadi di semua institusi politik, dalam trias politika (eksekutif-presiden, gubernur, bupati/wali kota; legislatif-DPR, DPRD; dan yudikatif-MA dan pengadilan).⁸ Semua institusi tersebut terjebak dalam pusaran korupsi. Sebabnya, dalam praktik politik sekuler-demokrasi, yang ada hanyalah legal-tidak legal. Bukan halal-haram. Biaya politik sekuler mahal. Hanya orang yang punya uang dan didukung pemodal yang akan dapat masuk dalam puncak piramida kekuasaan. Semua itu tentu harus dikembalikan melalui politik korupsi, baik korupsi kebijakan dan anggaran.

Karena itu tidak heran jika berbagai kebijakan dapat diperjual-belikan. Kebijakan seperti UU Ciptaker, UU Minerba, dll adalah segelintir kebijakan yang dibuat sebagai bentuk

gelaran karpet merah untuk para kapitalis. Merekalah yang membiayai kegiatan politik para politikus sekuler. Pada waktunya, para politikus melakukan korupsi anggaran yang merugikan rakyat.

Patut dicatat, korupsi terbesar adalah mengambil hak Allah untuk menetapkan hukum, dengan diganti slogan: “dari, oleh, dan untuk rakyat (*from, by, and for the people*)”. Padahal hanya kedaulatan syariah sajalah yang layak untuk ditegakkan. Ini membuktikan sekulerisme dan partai-partai pendukungnya adalah bahaya yang besar bagi penegakkan syariah Islam *kaaffah*.

Politik Islam Harus Ideologis

Oleh karena itu, sesungguhnya politik Islam haruslah bersifat ideologis, bukan, pragmatis. Ideologis artinya memperjuangkan ideologi dan prinsip tertentu, dalam hal ini Islam. Bukan ideologi yang lain, baik kapitalisme atau sosialisme-komunisme.

Islam sebagai ajaran yang paripurna, memiliki konsep (*mafaahim*), standar (*maqaayis*) dan keyakinan (*qanaa'at*) yang jelas dan terukur berdasar syariah. Politik dalam Islam bukan didasarkan asas manfaat, yang bisa berubah-ubah manakala manfaat yang didapat lebih besar. Sebuah ungkapan: “*wani piro* (berani bayar berapa)”,⁹ adalah bentuk fenomena politik pragmatis-transaksional. Ketika terjadi kesepakatan di panggung belakang (*back-stage*), maka apa yang terjadi di panggung depan (*front-stage*) sebenarnya hanyalah tipuan dan pencitraan.

Politik Islam akan senantiasa memegang teguh prinsip dan standar berbasis halal-haram. Halal dikerjakan dan haram ditinggalkan. Negarawan Muslim bekerja untuk sebuah visi besar (*concept, fikrah*) dan tahapan (*thariiqah, metode*) yang *syar'i*; meneladani perjuangan Baginda Rasulullah saw. yang senantiasa dibimbing wahyu sejak

Patut dicatat, korupsi terbesar adalah mengambil hak Allah untuk menetapkan hukum, dengan diganti slogan: “dari, oleh, dan untuk rakyat (*from, by, and for the people*)”. Padahal hanya kedaulatan syariah sajalah yang layak untuk ditegakkan. Ini membuktikan sekulerisme dan partai-partai pendukungnya adalah bahaya yang besar bagi penegakkan syariah Islam *kaaffah*.

di Makkah dan Madinah. Dengan tegas, misalnya, Rasulullah saw. menolak kompromi dan bergabung dengan sistem kufur. Beliau menolak orang kafir yang menawarkan tahta, harta dan wanita jika beliau bersedia meninggalkan dakwah Islam.

Negarawan yang berbasis pada Islam tidak akan lumer dengan remah-remah dunia. Mereka senantiasa mendahulukan keridhaan Allah SWT diatas proposal materi.

Politik harus mengarah pada Keterpilihan Pemimpin yang Baik dan Sistem yang Baik

Politik Islam harus mengarah pada lahirnya pemimpin yang baik. Siapa pemimpin yang baik? Tidak lain mereka yang hanya mau taat kepada Allah SWT dan Rasul saw., juga hanya mau menerapkan syariah Islam *kaaffah* (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 59).

Tetapi tidak cukup orang yang baik, politik Islam juga membutuhkan tatanan/sistem yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang berasal dari Allah SWT. dan Rasul-Nya. Itulah sistem Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Dalam tataran yang kongkrit, itu termanifestasikan dalam Khilafah Islamiyah. Dengan demikian wujud politik Islam tergambar dalam sistem pemerintahan Khilafah dan divisualisasikan dalam kebijakan pemimpinnya, yaitu Khalifah, yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

Umat harus dipahami bahwa suara mereka adalah penentu perubahan kekuasaan politik yang terjadi. Suara mereka sesungguhnya memiliki pengaruh. Kekuasaan itu adalah pengaruh. Kekuasaan adalah milik umat (*as-sulthaaan li al-ummah*), yang digunakan dalam rangka memilih pemimpin yang akan menerapkan Islam secara *kaaffah*. Sistem yang diterapkan harus sistem Islam, bukan sistem kufur. Sebabnya, kedaulatan ada di tangan Syariah (*as-siyaadah li as-syar'î*).

Tetapi tidak cukup orang yang baik, politik Islam juga membutuhkan tatanan/sistem yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang berasal dari Allah SWT. dan Rasul-Nya. Itulah sistem Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Dalam tataran yang kongkrit, itu termanifestasikan dalam Khilafah Islamiyah. Dengan demikian wujud politik Islam tergambar dalam sistem pemerintahan Khilafah dan divisualisasikan dalam kebijakan pemimpinnya, yaitu Khalifah, yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

Kedaulatan adalah milik Allah, Pemilik syariah. Bukan milik manusia atau milik rakyat.

Dalam konteks perubahan, yang menjadi teladan adalah Rasul saw. Beliau adalah pemimpin yang secara personal mumpuni dengan karakter kepribadian Islam (*syakhshiyah islaamiyyah*) yang terunggul. Namun, itu saja tidak cukup. Allah SWT menurunkan risalah Islam kepada beliau sebagai aturan dan sistem paripurna untuk mengatur kehidupan manusia.

Karena itu politik Islam meniscayakan lahirnya orang yang baik dan harus ada dalam sistem yang baik. Kaum Muslim dan tokoh-tokoh umat harus melakukan Islamisasi politik, yaitu membawa Islam ke dalam kekuasaan. Bukan sekadar orang Islam berkuasa. Bukan pula politisasi (agama) Islam, yang memanfaatkan simbol-simbol ajaran Islam,

tapi pada saat yang sama emoh dan ogah menerapkan syariah Islam secara *kaaffah*.

Urgensi Perjuangan Penegakan Khilafah

Dengan melihat akar masalah umat saat ini, yaitu tidak adanya penerapan Islam secara *kaaffah* dalam kehidupan, maka solusi fundamentalnya adalah dengan kembali menegakkan syariah Islam secara *kaaffah*. Ini tidak akan dapat dilakukan kecuali dalam isintitusi Khilafah Islamiyah.¹⁰ Metodenya adalah melalui jalan umat (*'an thariiq al-ummah*) yang sadar karena dakwah disertai dengan meraih dukungan (*thalab an-nushrah*), dari para pemilik kekuatan (*ahl an-nushrah*).¹¹ Hal ini dilakukan dengan berbasis pada pemikiran dan perjuangan politik yang damai. Bukan melalui kudeta berdarah ala komunisme atau Pemilu demokrasi ala kapitalisme.

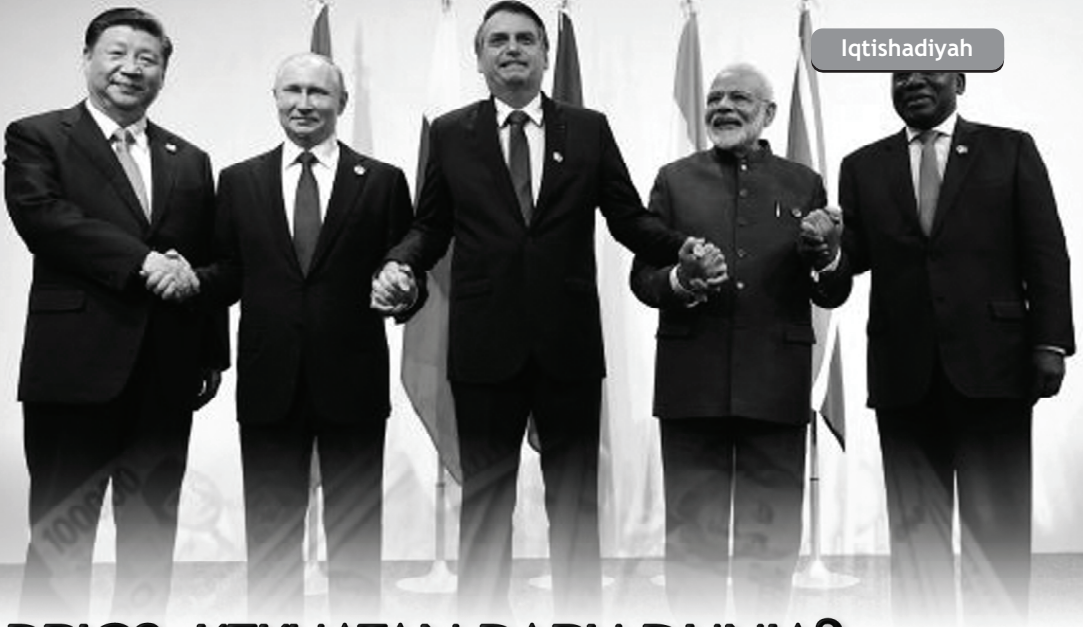
Wallahu a'lam bi ash-shawab.[]

Catatan kaki:

- ¹ Kutipan ini disampaikan Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris, 1924 M, setelah dihapuskannya khilafah Islam di Istanbul dan diganti dengan Republik Turki yang berdasarkan sekulerisme dan kemalisme (ajaran Kemal pasha).
- ² Rumusan Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, untuk menaklukkan perjuangan dan perlawanan kaum muslimin di Aceh yang sangat menguras dana dan perhatian penjajah. Snouck berpura-pura masuk Islam untuk mempelajari Islam dan kehidupan kaum muslimin Aceh. Sehingga penjajah Belanda dapat menghentikan perlawanan jihad rakyat Aceh.
- ³ Politik-Indonesia (*Siyasah-Arab; Politic*-Inggris). Makna bahasa *siyasah*, sasa-yassusu-siyasatan: mengatur dan mengelola. Makna bahasa *politic* berasal dari kata Yunani: politika - yang berhubungan dengan negara dengan akar katanya polites - warga negara dan polis - negara kota. Secara makna istilah, politik adalah mengatur dan mengelola urusan masyarakat, baik di dalam dan luar negeri, dengan hukum atau aturan tertentu.
- ⁴ Bambang Pacul, politisi PDIP dengan terang benderang, menyatakan bahwa para wakil rakyat di DPR tunduk kepada ketua parpol tempat mereka bernaung. Bila membangkang, ketua parpol akan dengan mudah menggantinya dengan yang lain. (<https://news.republika.co.id/berita/rsydney377/bambang-pacul-kekuasaan-di-republik-ini-bergantung-ketum-partai>)
- ⁵ Presiden Jokowi: Pisahkan Agama dan Politik. Demikian

Judul yang sangat jelas, pemimpin yang menyerukan kepada Sekulerisme. (<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/presiden.jokowi.pisahkan.agama.dan.politik>)

- ⁶ MUI telah memberikan fatwa pada 2005 M, tentang haramnya sekulerisme,liberalisme, pluralism. Seharusnya ini menjadi pedoman dalam mengelola politik. (<https://koran.tempo.co/read/nasional/46924/mui-haramkan-pluralisme-sekularisme-dan-liberalisme-agama>)
- ⁷ Pembentukan partai politik Islam yang ideologis adalah kewajiban umat untuk meneladani perjuangan dakwah Rasul SAW. Beliau melakukan tahapan dakwah:(1) melakukan pembinaan (*tatsqif*) kader dan pembentukan (takwin) gerakan kolektif.(2)Melakukan interaksi (*tafa'ul*) dan perjuangan (*kilafah*) di tengah umat, (3) menerima amanah kekuasaan (*istilamul hukm*) dari para ahli nusroh melalui penggalangan dukungan(*thalabun nusroh*) untuk menerapkan islam, mengemban dakwah dan jihad ke seluruh dunia.
- ⁸ Sejak KPK berdiri hingga Agustus 2022 sebanyak 310 anggota DPR dan DPRD, 154 bupati atau wali kota dan 22 gubernur tersandung kasus korupsi.(<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/18/13230951/survei-kpk-dan-lipi-biaya-kampanye-bupati-wali-kota-gubernur-tembus-rp-100>)
- ⁹ Ungkapan ini bermakna: berani bayar berapa? Berdasarkan survei KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada 2022, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp 20-30 miliar. Sementara, gubernur atau wakilnya membutuhkan modal Rp 100 miliar.(<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/18/13230951/survei-kpk-dan-lipi-biaya-kampanye-bupati-wali-kota-gubernur-tembus-rp-100>)
- ¹⁰ Khilafah adalah ajaran Islam. Bukan faham dalam arti khilafahisme, sebagaimana dilontarkan para pecandu sekulerisme. Mempertanyakan Khilafah adalah kewajiban bahkan seutama-utamanya kewajiban (*ahamul wajibat*) dan mahkota kewajiban (*tajul furdth*).Batas waktu syar'i untuk penagakannya adalah 3 hari 3 malam, sebagaimana ijma' sahabat setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khatthab RA. Saat ini kita sudah lebih dari 100 tahun (1342 H-1444 H) tanpa khilafah sebagai pelindung.Melalaikannya dan menghalanginya adalah kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya kepada dosa.
- ¹¹ Perjuangan Islam melalui umat (*an-thariqil ummah*) dan menggalang dukungan (*thalabun nusroh*) adalah dua hal yang dicontohkan Baginda Rasul SAW. Beliau menyiapkan umat dengan pembinaan kepribadian Islam dan ketrampilan politik-mengatur urusan publik dengan Islam. Di Madinah, beliau SAW, mengutus sahabat Mushab Bin Umair ra. membina umat dan menawarkan Islam kepada para pemimpinnya, diantaranya adalah Sa'ad bin Muadz, yang akhirnya menjadi penolong (ahlu nusroh) sehingga Rasul SAW menerima kekuasaan untuk menerapkan Islam secara kaffah. Antara umat dan pemimpin, antara akar rumput dan elit, secara kultural-orang dan struktural-sistem, sepatok untuk mendukung Islam.



BRICS, KEKUATAN BARU DUNIA?

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju membuat negara-negara BRICS disebut-sebut dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang dapat menyaingi negara-negara besar seperti AS dan Uni Eropa. BRICS adalah singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, yang merupakan kelompok lima ekonomi regional.

Pada awalnya, empat negara pertama dikelompokkan sebagai “BRIC” pada tahun 2001 oleh ekonom Goldman Sachs Jim O’Neill. BRIC digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat dalam satu dekade berikutnya (O’Neill, 2001).

Kekuatan ekonomi BRICS, jika digabungkan, memang cukup besar. Secara keseluruhan, BRICS memiliki luas gabungan sekitar 26,7% dari luas permukaan bumi serta populasi total yang mencapai sekitar 3,21 miliar, setara dengan 41 persen dari total populasi dunia. Kelima negara ini juga merupakan anggota G20, dengan total PDB nominal sebesar US\$27 triliun, yang setara dengan 26 persen dari total PDB dunia tahun 2023. Namun, dari kelima negara itu, Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar, yang

menguasai 18 persen PDB dunia.

Sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama tahun 2009 hingga KTT ke-14 tahun 2022, BRICS juga telah mendiskusikan berbagai kebijakan dan menggalang kerjasama dalam beberapa isu global. Salah satu kesepakatan yang telah terwujud adalah pendirian *New Development Bank*. Bank ini dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara anggota serta untuk membantu mempromosikan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara negara-negara anggota. Pada 2015, BRICS juga telah bersepakat untuk membentuk *Contingent Reserve Arrangement* (CRA), yaitu penyediaan likuiditas bagi negara-negara anggota jika mereka mengalami kekurangan cadangan devisa akibat ketidakseimbangan jangka pendek pada neraca pembayaran mereka.

Pada KTT ke-14, Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mendapatkan sanksi pembekuan aset akibat dari perang Rusia-Ukraina, menyerukan agar negara-negara BRICS membentuk cadangan mata uang global yang didukung oleh aset keras, seperti emas. Seruan tersebut secara tidak langsung merupakan kritik atas dominasi dolar AS, yang

sangat berpengaruh pada ekonomi global.

Penurunan Pengaruh AS

Sejak kemunculannya, BRICS telah menjadi kekuatan baru dalam ekonomi global dan menjadi sorotan bagi banyak negara di seluruh dunia. Apalagi AS sebagai kekuatan dominan dalam politik dan ekonomi global menghadapi tren pelemahan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Amerika Serikat saat ini masih menjadi kekuatan global yang penting, baik dari aspek politik, militer, sains dan teknologi, kekuatan ekonomi negara ini cenderung melemah.

Salah satu indikator kemunduran ekonomi AS adalah penurunan signifikan kontribusi ekonomi negara itu terhadap ekonomi global. Pada tahun 1960, kontribusi ekonomi AS mencapai puncaknya, yaitu 40 persen. Angka tersebut mengalami penurunan akibat krisis domestik, penurunan daya saing, serta menguatnya peran ekonomi negara-negara lain, khususnya Cina. Pada tahun 2023, kontribusi ekonomi AS terhadap ekonomi global diperkirakan tinggal 25,4 persen. Jika pada tahun 1960, ekonomi AS sebesar 9 kali ekonomi Cina, pada tahun, 2021, AS hanya 1,3 kali lebih besar dari negara itu. Dengan kata lain, sejalan dengan membesarnya kue ekonomi global, potongan kue ekonomi untuk AS semakin kecil.

Ketertinggalan tersebut juga terlihat pada kontribusi sektor industri manufaktur AS terhadap dunia, yang mencapai 18 persen, tersalip Cina yang mencapai 20 persen. Cina juga telah melampaui AS bersama dengan IMF dan Bank Dunia dalam pemberian pinjaman di tingkat global. Menurut pejabat AS, seperti yang dikutip oleh Behsudi (2023), sejak 2017, Cina telah menjadi kreditur resmi terbesar di dunia, melampaui Bank Dunia, gabungan IMF dan 22 anggota Klub Paris. Pembiayaan proyek Cina di negara lain antara tahun 2000 dan 2017 berjumlah lebih dari \$800 miliar. Sebagian besar dalam bentuk utang.

Dominasi ekonomi AS melalui mata uang dolar juga semakin banyak dikritik. Pasalnya, kebijakan moneter AS yang cenderung

mengedepankan kepentingan domestik berdampak negatif pada perekonomian global. Tindakan Federal Reserve AS dalam menaikkan suku bunga, akibat krisis domestik, dapat menyebabkan aliran modal keluar dari negara-negara berkembang. Pada gilirannya hal itu memicu ketidakstabilan ekonomi dan melemahkan mata uang negara-negara berkembang.

Sebagai cadangan mata uang terbesar dunia, dolar AS juga telah memberikan keuntungan signifikan bagi AS, termasuk kemampuan untuk mencetak uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Hal ini dapat menyebabkan inflasi dan merugikan negara-negara yang memiliki ketergantungan pada dolar AS. Penggunaan dolar AS dalam transaksi internasional sering memberikan AS—melalui IMF dan Bank Dunia—kekuatan politik yang besar, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain, khususnya negara-negara yang tertimpa krisis ekonomi dan kekurangan cadangan devisa.

Kendala BRICS

Meskipun negara-negara BRICS memiliki potensi untuk menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dalam politik dan ekonomi global, kelompok ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Salah satu tantangan utama bagi BRICS adalah perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama untuk memperkuat kekuatan politik dan ekonomi, masing-masing negara anggota memiliki perbedaan dalam hal kekuatan politik dan ekonomi, serta perbedaan pendekatan dan prioritas dalam politik luar negerinya. Hal ini bisa memperlemah koordinasi dan kerjasama di antara mereka. Juga bisa membuat BRICS kurang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, sebagai salah satu anggota BRICS, India juga merupakan sekutu AS yang cukup kuat di kawasan Indo-Pasifik,

terutama dalam menghadapi kemajuan Cina. AS, India, Jepang dan Australia, misalnya, telah membentuk *Quadilateral Security Dialogue* yang disebut sebagai NATO-nya Asia. Kerjasama ini merupakan upaya untuk beradaptasi dengan Cina yang semakin kuat secara ekonomi dan militer di kawasan Asia-Pasifik (Mohan, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan India masih bersengketa soal wilayah perbatasan pegunungan yang dikenal sebagai Line of Actual Control (LAC). Pemerintahan Biden dalam Strategi Pertahanan Nasional Oktober 2022 telah menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung sekutu dan mitranya atas tindakan Cina yang sedang membangun kendali atas Laut Cina Timur, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan dan perbatasan darat yang disengketakan seperti dengan India (Curtis & Grossman, 2023). Dengan posisi seperti ini, akan sangat sulit bagi India untuk menelurkan kesepakatan bersama BRICS yang akan menekan sekutu utamanya itu.

Dalam perkembangannya, negara-negara BRICS juga menghadapi masalah internal yang cukup pelik sehingga dapat menghambat kemajuan ekonomi mereka. Cina yang menjadi motor utama BRICS juga sedang menghadapi masalah pelik. Pertumbuhan ekonomi negara itu dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi sekecang tahun 1990-an hingga 2010 yang rata-rata di atas 10 persen. Negara itu juga mengalami pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini telah lebih dulu dirasakan oleh negara-negara Eropa dan Jepang yang mengalami pertumbuhan penduduk yang minus. Penduduk usia produktif lebih banyak menanggung penduduk non-produktif. Cina juga saat ini mengalami krisis di sektor perumahan, sektor yang menyumbang sepertiga ekonomi negara itu.

Bukan tidak mungkin, Cina dapat mengalami seperti apa yang dihadapi Jepang pada tahun 1990. Pada tahun 1990-an Jepang mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang melambat secara signifikan setelah tumbuh kuat pada tahun

1970-an dan 1980-an. Periode yang dikenal sebagai Lost Decade ini memupus peluang Jepang yang digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi yang dapat menyaingi Amerika Serikat. Di antara pemicunya adalah meletusnya gelembung spekulatif di pasar real estat dan keuangan Jepang, yang menyebabkan harga properti dan aset lainnya jatuh secara drastis.

Adapun kekuatan ekonomi Rusia dan Brazil hingga saat ini masih sangat bergantung pada sumberdaya alam, seperti energi dan pangan, yang harganya sangat fluktuatif. Kedua negara ini belum mampu membangun industri manufaktur secara kompetitif seperti yang dilakukan oleh Cina. Karena itu ketika Barat memboikot ekspor energi negara itu, Rusia kelimpungan mencari pasar energi alternatif. Untungnya, harga energi yang sangat tinggi mampu menyelamatkan ekonomi negara itu dari kebangkrutan akibat embargo.

Negara-negara BRICS juga dianggap gagal merumuskan dan menerapkan kebijakan yang bersifat strategis sebagai alternatif dari sistem ekonomi global saat ini. O'Neill yang dua puluh tahun lalu mencetuskan istilah BRIC, belakangan mengkritik kumpulan negara-negara itu yang dianggap banyak mengeluarkan pernyataan luhur, namun hanya disertai dengan sedikit langkah kebijakan. "Selain mendirikan Bank BRICS, yang sekarang dikenal sebagai Bank Pembangunan Baru, sulit untuk melihat apa yang telah dilakukan kelompok tersebut selain bertemu setiap tahun." (O'Neill, 2021).

Potensi Negara-negara Muslim

Negara-negara Muslim memiliki potensi besar sebagai alternatif kekuatan global, terutama dalam hal ekonomi. Meskipun belum terbentuk sebuah kelompok atau aliansi formal seperti BRICS, dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki sebagai satu kesatuan umat dalam satu institusi politik, negara-negara Muslim di dunia berpeluang untuk menjadi kekuatan raksasa di level global.

Negara-negara Muslim memiliki sumberdaya

alam yang melimpah menjadi basis untuk memperkuat ekonomi mereka. Negara-negara Timur Tengah dikenal sebagai penghasil minyak dan gas, sementara negara-negara Muslim di Asia Tenggara dan Asia Tengah memiliki cadangan energi dan mineral yang sangat melimpah. Berdasarkan data SESRIC (OKI) dan EIA, potensi cadangan minyak mentah negara-negara OKI per 2020 sebesar 1,01 triliun barel atau 65% dari total cadangan dunia yang mencapai 1,55 triliun barel. Adapun total cadangan gas dunia pada 2020 sebesar 7.257 total cubic feet (tcf), dan sekitar 4.137 tcf atau 57% berada di negara-negara Muslim. Dengan penyatuan negeri-negeri Muslim dalam satu institusi global, yakni Khilafah Islam, maka pasokan global dapat dikontrol oleh kaum Muslim. Kondisi tersebut juga dapat menjadi posisi tawar politik yang efektif sekaligus sarana dakwah terhadap negara-negara lain.

Negara-negara Muslim juga memiliki letak yang strategis di antara tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Letak strategis ini memungkinkan negara-negara Muslim menjadi pusat perdagangan internasional dan menghubungkan berbagai pasar di tiga benua tersebut. Beberapa jalur penting perdagangan internasional (*choke points*) juga berada di negara-negara Muslim, seperti Selat Hormuz (terletak antara Oman dan Iran), Selat Bab-el-Mandeb (terletak antara Yaman dan Pulau Socotra), Selat Malaka (terletak antara Malaysia dan Pulau Sumatera), Terusan Suez (menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah) dan Selat Gibraltar (terletak di antara Spanyol, Gibraltar dan Maroko).

Populasi Muslim di seluruh dunia juga sangat besar dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan penganut agama lainnya. Saat ini populasi Muslim diperkirakan mencapai 1,8 miliar jiwa atau sekitar 24% dari total populasi dunia. Menurut Pew Research Center (2017), penduduk Muslim diproyeksikan menjadi kelompok agama besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam beberapa dekade

mendatang. Dengan jumlah penduduk yang besar, negara-negara Muslim memiliki potensi pasar yang besar untuk berbagai produk dan jasa.

Bagaimanapun negara-negara industri seperti AS, Cina, dan Uni Eropa, yang memiliki tren penurunan populasi, membutuhkan pasar atas produk-produk yang mereka produksi, sehingga sangat penting bagi mereka untuk bekerjasama dengan negara-negara Muslim.

Kekuatan utama yang dimiliki umat Islam yang tersebar di lebih dari 56 negara saat ini adalah adanya kesamaan akidah Islam yang merupakan dasar dari ideologi Islam. Dengan mengadopsi Islam sebagai ideologi yang didukung oleh berbagai potensi yang dimiliki, umat Islam di dunia akan kembali menjadi negara *super power* di bawah kesatuan politik Khilafah Islam. Sejarah telah mencatat, sistem politik ini mampu menjadi pusat peradaban dunia, yang menjadi pusat pendidikan, sains dan teknologi, serta memiliki kekuatan politik, militer, dan ekonomi yang tangguh di level global.

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. [Muis]

Referensi:

1. O'neill, Jim (2001). Building better global economic BRICs.
2. O'neill, Jim (16 September, 2021). Will the BRICS Ever Grow Up? *Project Syndicate*. <https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-20-years-of-disappointment-by-jim-o-neill-2021-09?barrier=accesspay>. Diakses 16 Mei 2023.
3. Curtis, Lisa & Derek Grossman (30 Maret, 2023). India-China Border Tensions and U.S. Strategy in the Indo-Pacific. <https://www.cnas.org/publications/reports/india-china-border-tensions-and-u-s-strategy-in-the-indo-pacific>. Diakses 16 Mei 2023.
4. Behsudi, Adam (November 04, 2023). IMF-World Bank Spring Meetings: The 'rift is there': Cina vs. the world on global debt. <https://www.politico.com/news/2023/04/11/Cina-lending-imf-world-bank-00090588>. Diakses 16 Mei 2023.
5. Pew Research Centre (2017). *The Changing Global Religious Landscape*. <https://www.pewresearch.org/religion/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/>. Diakses 16 Mei 2023.
7. Mohan, C. Raja (2022). Why China Is Paranoid About the Quad. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2022/05/17/india-china-quad-summit-modi-xi-biden/>. Diakses 16 Mei 2023.

MENJEMPUT NASHRULLÂH DENGAN MENOLONG DÎNULLÂH

Irfan Abu Naveed

Menolong *Dinullâh* adalah upaya menjemput *nashrullâh* (pertolongan Allah), pertolongan bagi tegaknya Islam dalam kehidupan dan pertolongan agar teguh di atas Islam. Amal agung ini bukan sembarang amal, melainkan amal yang wajib dilandasi keimanan, bahkan menjadi tuntutan keimanan, sebagaimana isyarat agung dalam firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong agama Allah, Dia pasti akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad [47]: 7).

Allah SWT mengawali seruan (*khithâb*) dalam ayat agung ini dengan seruan keimanan, agar orang-orang yang beriman menolong *Dinullâh*, menegakkan syariah-Nya dalam kehidupan dan mendakwahkannya. Istimewanya, secara kiasan Allah menisbatkan pertolongan hamba-hamba-Nya kepada-Nya. Padahal Allah Mahakuasa atas segala perkara. Dia tak membutuhkan pertolongan makhluk-Nya. Ini untuk menunjukkan betapa agungnya amal menolong agama Allah (Lihat: QS. Al-'Ankabut [29]: 6).

Al-Imam Abu Ja'far al-Nahhas (w. 338 H) dalam *I'râb al-Qur'ân* (IV/119) menjelaskan bahwa ungkapan tersebut merupakan kiasan (*majâz*) yang disebutkan Allah. Maksudnya adalah menolong Rasul-Nya, agama-Nya,

syariah-Nya dan kelompok pembela agama-Nya (*hizbullâh*). Ini sebagaimana ditegaskan pula Imam ar-Razi dalam *Mafâtih al-Ghayb* (VIII/42).

Asy-Syaikh Ibn al-'Utsaimin (w. 1421 H) dalam *Syarh Riyâdh al-Shâlihîn* (III/616) menjelaskan: "Yang dimaksud menolong Allah adalah menolong agama-Nya. Sebabnya, sesungguhnya Allah dengan Diri-Nya tidak membutuhkan pertolongan apapun. Dia Maha Berkecukupan dari selain Diri-Nya. Namun, yang dimaksud pertolongan di sini adalah menolong agama Allah, dengan menjaga agama dan mempertahankan serta tegas menentang pelanggaran, dan lain sebagainya dari berbagai sebab pertolongan atas syariah-Nya."

Ibn al-'Utsaimin pun menjelaskan bahwa Allah melipatgandakan ganjaran perbuatan menolong agama Allah: *Pertama*, ganjaran *yanshurkum* (Allah menolong kalian), yakni Allah akan menolong kalian atas mereka yang memusuhi. *Kedua*, ganjaran *yutsabbit aqdâmakum* (Allah meneguhkan kedudukan kalian), yakni Allah meneguhkan di atas agama-Nya. Menariknya, ungkapan agung *yutsabbit aqdâmakum* (Dia akan meneguhkan kaki-kaki kalian) merupakan bentuk kiasan (*majâz mursal*). Yang dimaksud adalah keseluruhan diri orang yang Allah teguhkan (*ithlâq al-juz'i wa irâdat al-kull*). Hal ini menguatkan rasa, menggambarkan keteguhan, yakni teguh dalam membela Islam, serta teguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Demikian sebagaimana dialami para nabi dan rasul *'alayhim as-salâm*. Ketika pertolongan itu tiba, maka tiada makhluk-Nya yang mampu menghadangnya:

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

Jika Allah menolong kalian maka tak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja kaum Mukmin bertawakal (QS Ali Imran [3]: 160).

Wasiat Para Nabi *'alayhim as-Salâm*

Baginda Rasulullah saw., berpesan kepada Ibn 'Abbas ra. khususnya dan umat umumnya dengan pesan mendalam:

«أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ بِحَدِّهِ تُجَاهَكَ»
Jagalah (agama) Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Dia di hadapanmu (HR at-Tirmidzi dan Ahmad).

Kalimat *ihfazhillâh* merupakan *majâz* 'menjaga agama Allah, yang karena itu Allah akan menjaga kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Ayat dan hadis di atas dijadikan oleh al-Hafizh Ibn Rajab al-Hanbali (w. 795 H) dalam *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam* (I/465) sebagai salah satu dalil kaidah:

الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

Ganjaran amal itu sesuai dengan jenis amal perbuatan.

Artinya, siapa yang menjaga batasan-batasan syariah Allah (*hudûdullâh*) dan hak-

hak-Nya, maka Allah akan menjaga dirinya. Ibn Rajab pun merinci (I/465-468) bahwa bentuk penjagaan Allah atas makhluk-Nya mencakup dua hal: *Pertama*, penjagaan atas kemaslahatan dunianya, mencakup badan, anak keturunan, keluarga dan harta bendanya. *Kedua*, penjagaan atas agamanya. Ibn Rajab menuturkan:

مَتَى كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَغِلاً بِطَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ

Ketika seorang hamba sibuk dengan ketaatan kepada Allah maka sesungguhnya Allah akan menjaga dirinya dalam keadaan demikian.

Al-Imam Ibn Hajar al-Haitami (w. 974 H) dalam *Syarh al-Arba'în al-Nawawiyah* (hlm. 369) pun menjelaskan: "(Allah menjaga dirimu), yakni menjaga dirimu, keluargamu, duniamu dan agamamu."

Menjelaskan hadits ini, Syaikh Ibn al-'Utsaimin menuturkan bahwa ketika seseorang menjaga agama Allah maka Dia akan menjaga dirinya, hartanya, keluarganya dan agamanya. Yang paling penting: "jika Allah menjaga agama Anda, maka Allah akan menyelamatkan Anda dari penyimpangan dan kesesatan, karena seseorang ketika mengambil petunjuk Islam, maka Allah akan menambah-nambahkan padanya petunjuk-Nya."

Ini sebagaimana firman-Nya:

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَامًا تَقْوَاهُمْ﴾

Orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya (QS Muhammad [47]: 17).

Hal ini mengisyaratkan bahwa perbuatan menolong agama Allah hakikatnya merupakan bentuk syukur seorang hamba atas nikmat beriman dan berislam. Diperjelas oleh wasiat

para nabi dan rasul ' *alayhim as-salâm*-, Syaikh 'Atha bin Khalil dalam *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr* (hlm. 163-164) menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim as. menunaikan perintah Allah, tunduk patuh dan ikhlas kepada-Nya. Ini yang beliau wasiatkan kepada anak-anaknya. Begitu pula wasiat Nabi Ya'qub a.s. kepada anak-anaknya agar senantiasa berpegang teguh pada agama Allah, yang Allah pilih untuk mereka; juga agar mereka senantiasa berada dalam agama-Nya hingga mereka diwafatkan Allah dalam keadaan tunduk dan taat kepada Diri-Nya, tak pernah berpaling, selalu tunduk dan pasrah. Allah pun berfirman menggambarkan kaum *Hawariyyîn* pengikut Nabi Isa as.:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ فَأَيْدِنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيَّ عَدُوَّهُمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong (agama) Allah, sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi para penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Para pengikut yang setia itu berkata, "Kamilah para penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir. Kemudian Kami memberikan kekuatan kepada kaum yang beriman atas musuh-musuh mereka sehingga mereka pun menjadi kaum yang menang (QS ash-Shaff [61]: 14).

Perbuatan menolong agama Allah itu sendiri terealisasi ketika seorang Muslim mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan serta membela Islam dari berbagai tikaman kaum yang terpedaya. Hal ini meniscayakan seorang Muslim pejuang untuk membekali

Perbuatan menolong agama Allah itu sendiri terealisasi ketika seorang Muslim mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan serta membela Islam dari berbagai tikaman kaum yang terpedaya. Hal ini meniscayakan seorang Muslim pejuang untuk membekali dirinya dengan ketajaman pandangan (*fikrah mustanîrah*) dalam melihat berbagai celah yang bisa merusak umat Islam. Ia pun memiliki kesadaran untuk mengidentifikasi akar masalah dan menghadirkan solusi Islam atasnya (*al-wa'y al-siyâsî*).

dirinya dengan ketajaman pandangan (*fikrah mustanîrah*) dalam melihat berbagai celah yang bisa merusak umat Islam. Ia pun memiliki kesadaran untuk mengidentifikasi akar masalah dan menghadirkan solusi Islam atasnya (*al-wa'y al-siyâsî*). Ini sebagaimana karakter para pejuang Islam generasi teladan umat ini, yakni Rasulullah saw. dan para Sahabatnya. Meneladani mereka adalah keberuntungan. Al-Imam al-Alusi (w. 1270 H) dalam *Rûh al-Ma'âni* (1/92) bertutur:

إِنَّ لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا* إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكَرَامِ
فَلَاحٌ

Meski kalian belum seperti mereka, serupailah mereka

Sebab sungguh menyerupai orang-orang mulia adalah keberuntungan

Wallâhu a'lam bi ash-shawaab. []



BELAJAR DARI KEGAGALAN POLITIK UMAT

Adi Victoria

Penulis & Aktivistis Dakwah

Umat Islam di negeri ini adalah umat yang mayoritas. Tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, 241,7 juta penduduk Indonesia memeluk Islam hingga akhir tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 87,02% dari populasi di dalam negeri.¹ Dengan jumlah yang mayoritas tersebut, tidak aneh jika umat Islam selalu didekati oleh para peserta Pemilu untuk mendapatkan suara atau dukungan dari umat Islam tersebut.

Memang, kesadaran politik umat mulai meningkat. Buktinya mereka akan berusaha mengusung sosok yang tentu beragama Islam, dan dikenal dekat juga dengan umat Islam. Hal ini bisa dilihat pada Pemilu 2019. Umat Islam ramai mengusung figur yang dianggap pro kepada umat Islam. Bahkan ada sebagian umat Islam yang rela menyumbangkan hartanya untuk suksesi Pemilu tersebut, dengan harapan

sosok yang mereka dukung akan menang.

Namun, kesadaran politik ini belum diikuti dengan pemahaman yang benar terkait apa itu keberhasilan politik umat. Pemahaman yang masih melekat dalam diri sebagian umat Islam tersebut, yakni bahwa jika sosok yang pro Islam itu menang, hal itu adalah kemenangan politik umat, kemenangan umat Islam. Padahal total ukur suatu keberhasilan politik umat itu adalah saat sampainya Islam pada kekuasaan, bukan hanya sekadar berkuasanya orang Islam.

Inilah yang sejatinya harus dipahami dengan baik oleh semua umat Islam. Tidak cukup hanya dengan sampainya orang Islam pada kekuasaan, namun Islamnya pun harus sampai pada kekuasaan tersebut. Jika hanya orang Islamnya saja yang berada di kekuasaan, ia akan memimpin berdasarkan sistem kepemimpinan yang telah ada. Jika sistem kepemimpinan yang ia gunakan dalam memimpin adalah sistem yang rusak, maka tentu kepemimpinannya akan membawa pada

kerusakan pula. Bahkan kekuasaannya tidak akan digunakan untuk menerapkan Islam, juga tidak akan berpihak kepada umat. Sebabnya, memang di dalam Islam kekuasaan adalah *thariiqah* atau metode untuk menerapkan Islam. Demikian sebagaimana yang disampaikan oleh *Hujjatul Islam*, Imam al-Ghazali:

[الدين والسلطان توأمان، الدين أس والسلطان حارس، فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع]

*Agama dan kekuasaan (ibarat) saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa pondasi niscaya runtuh. Sesuatu tanpa penjaga niscaya lenyap.*²

Tanpa adanya kekuasaan pula, banyak sekali terjadi pelanggaran di dalam kehidupan manusia; seperti masih maraknya praktik ribawi, perzinaan, pencurian, korupsi, dan lainnya. Padahal larangan-larangan tersebut telah ada di dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Mengapa semua ini terjadi di negeri ini penduduknya adalah mayoritas Muslim? Tidak lain karena tidak ada kekuasaan yang mencegah semua itu. Tidak aneh jika Khalifah Utsman bin Affan ra., sebagaimana dikutip oleh Muhammad Husain Abdullah dalam *Ath-Thariiqah asy-Syar'iyah li Isti'naaf al-Hayaah al-Islaamiyyah*, pernah berkata:

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
Sungguh Allah akan benar-benar mencegah dengan kekuasaan apa saja yang tidak bisa dicegah oleh al-Quran.

Timbul pertanyaan, mengapa umat Islam yang mayoritas di negeri ini belum berhasil meraih kekuasaan, yang dengan kekuasaan tersebut nantinya akan menerapkan Islam dan

berpihak pada Islam? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utamanya. Di antaranya:

1. Umat Islam baru menjadi objek, bukan subjek.

Walaupun umat Islam menempati posisi sebagai mayoritas di negeri ini, bahkan di dunia, faktanya umat Islam masih dijadikan sebagai objek politik, bukan sebagai subjek politik. Artinya, umat ini bukan sebagai pelaku utama dalam aktivitas politik untuk meraih kekuasaan, namun hanya sebatas umat yang suaranya diinginkan. Setelah kekuasaan diraih, umat akan ditinggalkan oleh mereka. Inilah yang harus disadari oleh umat Islam seluruhnya.

Umat Islam harusnya menjadi subjek politik. Mereka harus bergerak di tengah-tengah umat untuk memberikan pemahaman dan penyadaran terkait pentingnya kekuasaan untuk menerapkan Islam, yang kekuasaan tersebut akan berpihak kepada umat Islam. Sebaliknya, selama umat Islam hanya sebagai objek politik, tidak akan pernah terwujud sebuah kekuasaan yang akan bisa menerapkan Islam, ataupun berpihak kepada umat Islam. Sebabnya, kekuasaan tersebut dijalankan dengan sistem yang tidak sesuai dengan Islam, bahkan bertolak belakang, bertentangan dengan Islam. Jika sistem tersebut bertentangan dengan Islam, lantas bagaimana mungkin umat Islam berharap pemimpin dalam sistem kekuasaan tersebut akan berpihak kepada umat Islam?

2. Islam politik masih sebatas simbol.

Hal lain yang membuat keberhasilan politik umat belum terwujud adalah karena politik Islam itu masih dipahami dengan simbol-simbol keagamaan. Sebagian umat Islam, misalnya, memberikan dukungannya kepada pihak-pihak yang mereka nilai dekat dengan Islam. Cara umat Islam menilai seseorang itu dekat atau tidak dengan Islam

adalah misalnya ketika melihat ada ustadz-ustadz atau para tokoh umat yang memberikan dukungan kepada calon tertentu. Lalu mereka pun memberikan *image* bahwa calon pemimpin tersebut adalah pilihan umat Islam yang harus didukung. Adanya ustadz dan tokoh umat pada barisan calon pemimpin tersebut merupakan simbol politik umat Islam.

Padahal keberadaan para ustadz dan tokoh umat pada barisan calon pemimpin tersebut tidak boleh dianggap sebagai simbol perjuangan politik umat. Yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah melihat apakah visi dan misi calon pemimpin tersebut memang bertujuan untuk menerapkan Islam saat berkuasa atau tidak.

3. Partai politik Islam kehilangan idealisme.

Memang Islam tidak membatasi adanya jumlah partai politik di dalam Islam. Selama partai politik Islam tersebut visinya adalah menyerukan Islam dan melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar, maka partai politik tersebut boleh ada. Berapa pun jumlahnya. Yang penting, partai politik itu harus memiliki visi perjuangan yang jelas, memegang idealisme Islam, dan tidak menjadi pragmatis. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan (Islam) serta melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Terkait ayat di atas, Imam ath-Thabari menyatakan, *"Abu Ja'far berkata bahwa frasa 'yad'una ila al-khayr' yakni 'menyerukan kepada*

manusia Islam dan syariahnya yang telah Allah syariatkan kepada para hamba-Nya'..."

Artinya, partai politik Islam haruslah memiliki visi dan misi politik Islam yang jelas dan tegas. Visi dan misi politik Islam itu harus diwujudkan melalui gerakan politik yang menyerukan Islam dan menyadarkan umat dengan syariah Islam secara terus-menerus. Tujuannya agar umat terdorong untuk menerapkan syariah Islam secara *kaffah* untuk mengatur segenap aspek kehidupan mereka.

Fakta yang ada sekarang adalah sebaliknya. Mereka yang mengaku sebagai partai Islam malah tidak menggenggam idealismenya. Bersikap pragmatis. Tidak berfokus pada visi dan misi sebagaimana harusnya sebuah partai Islam. Namun, mereka berfokus pada kemenangan Pemilu. Lalu berbagai macam *uslub* dan *washilah* dilakukan selama bisa meraih dukungan untuk untuk pemenangan Pemilu. Misalnya berkoalisi dengan partai politik yang sekuler, berkampanye dengan melanggar syariah Islam, berpartisipasi (*musyaarakah*) dengan pemerintah yang sekuler, dll.

Padahal tujuan yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar pula, tidak boleh menghalalkan segala cara, sehingga menjadi pragmatis, kehilangan idealisme. Hal ini sebagaimana yang dirumuskan oleh Syaikh Taqiuddin an-Nabhani *rahimahullaah*, bahwa *"al-ghaayah laa tubarriru al-wasiiilah"* (tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara).⁴

4. Adanya tekanan politik yang kuat.

Adanya tekanan politik yang kuat kepada umat Islam juga membuat sebagian umat Islam takut dan tidak mau menampakkan visi politik umat. Bahkan umat juga tidak berani menampakkan identitas politik Islam karena khawatir dengan stigma negatif terkait larangan politik identitas. Jelas sekali yang diserang dalam propaganda politik identitas ini

adalah umat Islam.

5. *Masih based on person not based on system.*

Hal lain yang juga menghambat keberhasilan politik umat adalah umat masih berfokus kepada person, yakni sosok yang akan menjadi pemimpin. Padahal seharusnya fokus umat tidak hanya memilih sosok pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan visi-misi politik umat, namun juga fokus pada perubahan sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan inilah sejatinya yang akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti pemimpin tersebut saat berkuasa.

Jangan sampai perubahan yang diinginkan malah tidak terwujud karena hanya fokus kepada sosok pemimpin. Yang tadinya ingin mewarnai, malah terwarnai. Yang tadinya ingin mempengaruhi, malah ikut terpengaruh. Semua itu akibat dari sistem kekuasaan yang memang terbukti rusak dan merusak tersebut, yakni sistem demokrasi.

6. *Terjebak hiruk-pikuk pesta demokrasi.*

Akibat dari belum adanya kesadaran secara utuh terkait hakikat perubahan, maka saat berlangsung Pemilu sebagai bagian dari pesta demokrasi, umat pun ikut-ikutan dalam pesta tersebut. Padahal pesta Pemilu dalam sistem demokrasi adalah mencari pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Pemilu yang berlangsung bukanlah *washiilah* untuk bisa mewujudkan penerapan Islam dalam kehidupan.

Tanpa adanya kesadaran yang baik dan benar terkait hakikat perubahan membuat umat Islam selalu terjebak pada hiruk pikuk pesta demokrasi. Apalagi pada tahun politik menjelang Pemilu senantiasa disampaikan propaganda: *“satu suara Anda sangat menentukan”*.

Alhasil, yang harus dilakukan oleh umat Islam agar bisa mewujudkan keberhasilan dalam politik umat, adalah dengan fokus pada perjuangan Islam *kaaffah*. Caranya dengan terus melakukan dakwah di tengah-tengah umat, memberikan penyadaran, bahwa perubahan hakiki hanyalah akan terwujud saat diatur dengan Islam, yang dilakukan oleh sosok pemimpin yang amanah dan di dalam suatu sistem yang juga baik. Sistem yang baik adalah yang bersumber dari Yang Mahabaik atau *Al-Barr*, yaitu yang berasal dari Allah SWT, yakni sistem Islam.

Khatimah

Alhasil, yang harus dilakukan oleh umat Islam agar bisa mewujudkan keberhasilan dalam politik umat, adalah dengan fokus pada perjuangan Islam *kaaffah*. Caranya dengan terus melakukan dakwah di tengah-tengah umat, memberikan penyadaran, bahwa perubahan hakiki hanyalah akan terwujud saat diatur dengan Islam, yang dilakukan oleh sosok pemimpin yang amanah dan di dalam suatu sistem yang juga baik. Sistem yang baik adalah yang bersumber dari Yang Mahabaik atau *Al-Barr* (البرّ), yaitu yang berasal dari Allah SWT, yakni sistem Islam.

Wallaahu a'lam bi ash-shawaab. □

Catatan kaki :

- ¹ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- ² Imam al-Ghazali, *Al-Iqtishâd fî al-'Iqâd*.
- ³ Ath-Thabari, *Jâmi al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân*, 7/90-91.
- ⁴ *Muqaddimah ad-Dustuur*, 1963, hlm. 405.



KEBIASAAN BAIK

ADA orang meninggal dalam keadaan taat kepada Allah SWT. Meninggal saat shalat berjamaah di masjid, saat membaca al-Quran, saat berzikir atau bertobat kepada Allah SWT, saat menghadiri majelis ilmu atau mengajarkan ilmu, saat berdakwah atau berjihad di jalan Allah SWT, dll.

Sebaliknya, banyak orang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah SWT. Mati di tempat dugem, di meja judi atau di tempat pelacuran. Mati saat mabuk-mabukkan atau mati karena narkoba. Mati saat menikmati uang hasil korupsi, suap-menyuap atau riba. Mati dalam keadaan memamerkan aurat atau saat berleenggak-lenggok di atas panggung. Mati dalam keadaan menyakiti orangtua, mengabaikan hak-hak suami/istri atau menzalimi orang lain; dll.

Banyak pula yang mati dalam keadaan menunda-nunda bahkan meninggalkan shalat, lalai dari zikir mengingat Allah SWT, jarang sekali membaca al-Quran. Mati dalam keadaan asyik bermain games, berpesta-pora di tempat-tempat hiburan; dll.

Semua bergantung pada kebiasaan masing-masing saat hidup. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu

Katsir dan Imam as-Sa'adi serta ulama lainnya *rahimahumullaah*. “*Anna man ‘aasya ‘alaa syay[‘in] maata ‘alayh* (Sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut.” (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur‘aan al-‘Azhiim*, 2/101).

Alhasil, kita boleh saja berharap mati dalam keadaan *husnul khaatimah*. Namun, pada akhirnya, kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita saat hidup. Apakah saat hidup kita biasa taat kepada Allah SWT? Ataukah saat hidup kita biasa berbuat dosa dan bermaksiat kepada-Nya?

Tentu, di sinilah pentingnya kita selalu memiliki banyak kebiasaan yang baik, yakni kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan pahala. Apa itu? Tidak lain semua kebiasaan yang muaranya adalah ketaatan kepada Allah SWT.

Tentang taat kepada Allah SWT, Malik bin Dinar *rahimahullaah* berkata: “*Ittakhidz thaa‘atalLaah tijaarat[an] ta‘tika al-arbaah min ghayri bidhaa‘at[fin]* (Jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai ‘perniagaan [bisnis]’ yang mendatangkan laba [keuntungan] tanpa [harus menjual] barang dagangan).” (Ibnu Hibban, *Rawdhah al-‘Uqalaa*, hlm. 63).

Laba/keuntungan dari “bisnis” dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT ini tidak lain berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi (lihat: QS Ali Imran [3]: 133).

“Bisnis” dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT inilah yang merupakan “bisnis” yang tidak akan pernah merugi sekaligus bakal menyelamatkan pelakunya dari azab yang pedih di akhirat (Lihat: QS ash-Shaff [61]: 10).

Saat seorang Muslim menjadikan taat kepada Allah SWT sebagai kebiasaan baiknya, ia tak akan disibukkan dengan maksiat. Kalaupun dia—sebagai manusia—tak lepas dari dosa, ia selalu berusaha untuk banyak bertobat. Tak pernah menunda-nunda. Maka dari itu, banyak bertobat pun menjadi salah satu

kebiasaan baiknya. Dalam hal ini, tentu benar apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Rajab *rahimahullaah*, “Menunda-nunda tobat saat usia muda itu sangat buruk. Jauh lebih buruk lagi menunda-nunda tobat saat usia sudah tua.” (Ibnu Rajab, *Lathaa’if al-Ma’arif*, 737).

Tobat adalah salah satu dari upaya menyadari banyaknya kekurangan diri; merasa diri banyak dosa. Hal ini tentu amat penting agar setiap hari seorang Muslim berupaya memperbaiki diri. Jangan sampai, seperti kata Imam Ibnu al-Mubarak *rahimahullaah*, “Di antara musibah terbesar bagi seseorang adalah dia tahu kekurangan (aib) dirinya, lalu dia tidak peduli dan tidak bersedih atas kekurangan (aib) dirinya tersebut.” (Al-Baihaqi, *Syu’ab al-limaan*, hlm. 867).

Banyak orang sadar atas kekurangan (aib) dirinya, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mengubah keadaannya. Sadar banyak dosa, tetapi tidak segera bertobat. Sadar memiliki sedikit pahala, tetapi tidak segera melakukan ragam amal shalih. Inilah di antara musibah terbesar yang menimpa seseorang.

Dengan demikian yang diperlukan seseorang bukan sekadar menyadari segala kekurangan (aib) dirinya, tetapi usahanya untuk memperbaiki diri dengan cara: meninggalkan ragam dosa dan maksiat, memperbanyak amal shalih, disertai dengan terus meningkatkan pemahaman agamanya (*tafaqquh fii ad-diin*).

Penting juga untuk memiliki kebiasaan baik lainnya, yakni: tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Khalid bin Ma’dan *rahimahullaah*, “Saat pintu kebaikan telah terbuka di hadapan salah seorang di antara kalian, segera masuki, karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan tersebut tertutup kembali.” (Adz-Dzahabi, *Siyar A’laam an-Nubalaa’*, 4/540).

Karena itu jangan sekali-kali menunda-

nunda beramal shalih karena merasa masih banyak kesempatan. Kesempatan itu bisa berupa waktu luang, masa muda, kesehatan, kecukupan harta, dll. Semua kesempatan itu bisa saja sewaktu-waktu hilang dan tak akan kembali lagi. Saat demikian kesempatan untuk beramal shalih berkurang bahkan mungkin hilang sama sekali.

Sebaliknya, segera akhiri segala kebiasaan buruk, termasuk yang sia-sia (tak berguna). Dalam hal ini, kita harus selalu menyadari bahwa, “Di antara tanda Allah berpaling dari hamba-Nya adalah Dia menjadikan dirinya sibuk dalam hal-hal yang tak berguna (sia-sia).” (Ibnu Abdil Barr, *At-Tamhiid*, hlm. 200).

Hal-hal yang tak berguna (sia-sia) adalah semua perkara yang tidak mendatangkan manfaat di dunia dan pahala di akhirat. Agar Allah SWT tidak berpaling dari diri kita, semua kesia-siaan itu harus ditinggalkan. Apalagi jika di dalamnya mengandung unsur dosa dan kemaksiatan.

Maka dari itu penting untuk mengingat salah satu pesan Imam Ali ra., “Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan menjadi kesibukanmu (Imam an-Nawawi, *Nashaa’ih al-libaad*, hlm. 18).

Terakhir, hendaknya kita selalu mengingat nasihat Rasulullah saw., “*Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa muda (kekuatan)-mu sebelum datang masa tua (kelemahan)-mu; masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu; masa kaya (kecukupan)-mu sebelum datang masa kefakiran (kekurangan)-mu; waktu lapangmu sebelum datang masa sempitmu.*” (Al-Mundzir, *At-Tarhiib wa at-Tarhiib*, 2/203).

Alhasil, semoga kita memiliki banyak kebiasaan baik—yakni ragam kebiasaan yang diliputi dengan ketaatan kepada Allah SWT—dan kita bisa istiqamah di dalamnya hingga akhir hayat.

Wa maa tawfiiqii illaa biLlaah ‘alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib. [ABI]



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

THE SECRET LIFE

Anytime you see someone more successful than you are, they are doing something you aren't (Malcolm X).

++++

Stephen Covey dalam buku *best sellernya*, *The Seven Habits of Highly Effective People*, mengenalkan kepada kita tiga kluster kehidupan, yakni *public life*, *private life* dan *secret life*. *Public life* adalah kehidupan kita di tengah-tengah orang lain. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita capai bisa dilihat atau disaksikan oleh orang lain. *Private life* adalah kehidupan pribadi, yang hanya terlihat atau diketahui oleh orang-orang dekat kita, atau kadang bahkan tak terlihat oleh siapapun.

Ketika dalam *public life* kita melihat orang lain tampak lebih sukses daripada diri kita, kata Malcolm X, pasti orang itu melakukan sesuatu dalam *private life*-nya yang tidak kita lakukan.

Hee Ah Lee, misalnya, yang lahir cacat, kedua tangannya hanya punya empat jari berbentuk seperti capit udang, tanpa telapak tangan, kakinya pun hanya sebatas lutut, berlatih piano 5 sampai 8 jam sehari selama lebih dari 15 tahun sebelum akhirnya ia dikenal sebagai *the four finger pianist* yang disetarakan dengan pianis terkenal, Richard Clayderman.

Kini, Hee menjadi kebanggaan rakyat Korea Selatan. Konser tunggalnya di puluhan negara selalu disesaki oleh pengunjung.

Imam Syafii kecil selalu mencatat apa yang diajarkan guru kepada dirinya. Tak terhalang oleh kemiskinannya, ia mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelepah kurma, dan tulang unta untuk menulis. Bahkan tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan alas-alas tulis itu yang berisi catatan hadis-hadis Nabi saw. Itu semua terjadi saat Syafii belum lagi balig. Semangat belajarnya memang luar biasa. Al-Quran telah ia hapal saat ia berusia 7 tahun. Kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik telah ia baca dan ia hapal saat usia 12 tahun sebelum ia bisa berjumpa dan berguru langsung dengan pengarangnya di Madinah.

Sadar peran penting leher dalam menahan pukulan lawan, petinju Mike Tyson, ketika berlatih, sengaja berulang-ulang memukulkan batang besi ke lehernya. Hasilnya, lehernya sangat kuat sehingga ia dijuluki si Leher Beton. Semua lawannya dipukul KO sebelum ronde 5. Meski ia sendiri akhirnya KO juga, bukan karena pukulan lawan, tetapi karena kecanduan alkohol, narkoba, seks bebas dan hidup serampangan.

Tak banyak orang tahu, jauh sebelum sejarah besar penaklukkan Konstantinopel terjadi, Huma Hatun, ibunda Muhammad al-

Fatih, sering membawa al-Fatih kecil naik ke atas bukit, memandangi benteng Konstantinopel dari kejauhan. Itu dilakukan sambil menceritakan *nubuwwah* Nabi saw. dalam hadis riwayat Imam Ahmad, tentang benteng itu yang bakal ditaklukkan dan pujian bagi panglima dan tentara penaklukkannya. Itu dilakukan Huma bahkan sejak al-Fatih masih dalam kandungan.

Bill Gates, yang dikenal sebagai salah satu kampiun di bidang IT, tak hanya sibuk dengan bisnisnya. Ternyata ia juga melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membuang sampah dan menggosok meja dapur. Katanya, melakukan tugas remeh-temeh seperti itu membuat dirinya tetap rendah hati dan membumi serta membuat orang lain merasa dihargai. Bill Gates juga rajin membaca, setidaknya 50 buku setahun atau hampir dua buku sebulan. Menurut dia, sebuah buku dapat membantu dirinya melihat sesuatu dari sudut yang berbeda sehingga memperluas pandangan dunianya. Ia kerap bermain dengan anaknya dan tidur lebih awal supaya cukup memenuhi kebutuhan waktu tidurnya 7 jam sehari. Sebabnya, katanya, kurang tidur tidak hanya mengganggu proses kognitif seperti perhatian, kewaspadaan dan pemecahan masalah, tetapi juga membuat seseorang sulit untuk belajar secara efisien hingga menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Private life seperti itu tidaklah muncul tiba-tiba. Ia sangat dipengaruhi oleh *secret life*, yang disebut Covey berisi 4 *Unique Human Endowments*, yakni *Self-awareness*, *Conscience*, *Imagination*, dan *Willpower* (kesadaran diri, hati nurani, imajinasi dan dorongan gerak). Isinya bisa apa saja. Intinya adalah sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran manusia, yang tak terlihat oleh siapapun (*inner deep life*), tetapi perannya sangat besar dalam menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu baik dalam *private life* maupun *public*

Bagi seorang Muslim sejati, *self-awareness* adalah kesadaran tentang asal-muasal dan misi serta ujung kehidupan dirinya sebagai manusia, yang didasarkan pada *conscience* berupa tauhid, dengan *imagination* berupa kehidupan yang *hasanah* di dunia dan akhirat. Semua itu menggerakkan diri (*will power*) untuk selalu taat kepada Allah SWT dalam seluruh keadaan.

life. Ia bisa berupa keinginan untuk terkenal, kaya-raya, punya kedudukan sosial terhormat, dikenang oleh sejarah sebagai seorang pahlawan atau orang yang banyak berjasa, dan lain sebagainya, baik yang bersifat material-duniawi, maupun immaterial-ukhrawi.

Bagi seorang Muslim sejati, *self-awareness* adalah kesadaran tentang asal-muasal dan misi serta ujung kehidupan dirinya sebagai manusia, yang didasarkan pada *conscience* berupa tauhid, dengan *imagination* berupa kehidupan yang *hasanah* di dunia dan akhirat. Semua itu menggerakkan diri (*will power*) untuk selalu taat kepada Allah SWT dalam seluruh keadaan.

Dalam kesadaran seorang Muslim, hidup tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Intinya, ketaatan penuh pada segenap perintah dan larangan Allah, dengan keyakinan bahwa seluruh ketaatan itu akan memberikan keberkahan pada hidup diri dan keluarganya, juga masyarakat dan negara, bahkan dunia. Di

Catatan Dakwah

sinilah energi perjuangan penegakan syariah secara *kaaffah* demi keberkahan bagi semua dan kemenangan akhirat bersumber, dan menjadi penggerak utama para pengemban dakwah yang tak kan pernah padam.

++++

Jadi, jelas sekali rona kehidupan *public life* sangat dipengaruhi oleh *private life*, utamanya oleh *secret life*. Islam telah mengajari untuk menata kehidupan pribadi kita dengan sebaik-baiknya; dengan takwa, doa, dzikir, wirid dan ibadah. Tentang iman, takwa dan kebiasaan shalat malam misalnya, ada nasihat bagus Syaikh Adebali yang disampaikan kepada Osman, anak lelaki Ertugrul, yang kelak menjadi sultan pertama dalam Kesultanan Utsmani. Katanya, “Siapa yang tidak menerangi diri, tidak akan bisa menerangi dunia. Siapa yang tidak bisa mengalahkan selimut di malam harinya (untuk shalat malam), tidak akan bisa mengalahkan musuh di siang hari. Siapa yang tidak bisa menegakkan iman di rumahnya, tidak akan bisa membangun peradaban dunia.”

Bagi seorang Muslim, kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan di akhirat: masuk surga dan terhindar dari neraka. Inilah kemenangan besar (*fawz al-kabii*). Hanya ketaatan sempurna kepada Allah sajalah yang akan mengantarkan pada kemenangan besar itu. Ketaatan membawa keridhaan Allah. Keridhaan Allah membawa pada keberkahan, berupa tambahnya selalu kebaikan dalam kehidupan di dunia dan pahala di akhirat.

Siapa saja yang menang di dunia, tetapi kemenangan itu tidak membawa dirinya pada kemenangan atau kesuksesan akhirat, pasti akan sangat menyesal. Karena itu segala bentuk kemenangan atau kesuksesan apapun di dunia, baik kemenangan dalam persaingan bisnis, kemenangan dalam konstataasi politik, jabatan akademik, karir birokratik, cinta dan keluarga serta bentuk kemenangan atau

Tentang iman, takwa dan kebiasaan shalat malam misalnya, ada nasihat bagus Syaikh Adebali yang disampaikan kepada Osman, anak lelaki Ertugrul, yang kelak menjadi sultan pertama dalam Kesultanan Utsmani. Katanya, “Siapa yang tidak menerangi diri, tidak akan bisa menerangi dunia. Siapa yang tidak bisa mengalahkan selimut di malam harinya (untuk shalat malam), tidak akan bisa mengalahkan musuh di siang hari. Siapa yang tidak bisa menegakkan iman di rumahnya, tidak akan bisa membangun peradaban dunia.”

kesuksesan lainnya, haruslah diraih dengan iman, takwa, tawakal dan iptek. Tak mengapa jika harus kalah lebih dulu di dunia jika hal itu diperlukan untuk meraih kemenangan akhirat. Yang paling ideal tentu saja menang di dunia, menang juga di akhirat

Alhasil, seorang Muslim sejati tidak boleh silau atas kemenangan atau kesuksesan di dunia jika hal itu justru akan menjauhkan dirinya dari kemenangan akhirat. Kesuksesan semu di dunia, yang didapat dengan menghalalkan segala cara, tak mengindahkan halal-haram—yang didapat dengan cara curang, zalim, suap/sogok, syirik, termasuk kemenangan konstetasi politik yang diraih bersama kelompok politik sekuler untuk kejayaan sekulerisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme apalagi komunisme, dan segala yang bertentangan dengan ketentuan Allah—pasti akan menjauhkan dari kemenangan akhirat. Itu adalah sebuah kerugian yang amat sangat besar, yang akan disesali selama-lamanya, di sana nanti. Pasti. □

APA BEDANYA NABI DENGAN RASUL?

Soal:

Dinyatakan di dalam Kitab Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah (1/130), "Sayiduna Musa as. adalah nabi. Sebabnya, kepada dia diwahyukan Syariah. Ia juga seorang rasul. Sebabnya, syariah yang diwahyukan kepada dirinya adalah risalah miliknya. Adapun Sayiduna Harun adalah seorang nabi. Sebabnya, kepada dia diwahyukan Syariah. Namun, ia bukan seorang rasul. Sebabnya, syariah yang diwahyukan kepada dirinya untuk dia sampaikan kepada yang lain bukan risalah miliknya, melainkan adalah risalah milik Musa as."

Pertanyaanya: Bagaimana kita mengaitkan pernyataan tersebut dengan ketetapan dalam al-Quran (yang artinya): Datanglah kalian berdua kepada dia (Fir'aun) dan katakanlah, "Sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu." (TQS Thaha [20]: 47).

Dinyatakan juga (yang artinya): Lalu datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah oleh kalian, "Sungguh Kami adalah rasul Tuhan semesta alam." (TQS asy-Syu'ara` [26]: 16)?

Jawab:

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal menetapkan perbedaan antara nabi dan rasul pada beberapa pendapat yang beragam. Kami menyebutkan sebagiannya.

Pertama: Nabi adalah orang yang kepada dia diwahyukan taklif dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jika dia diperintahkan untuk menyampaikannya maka dia adalah rasul. Dinyatakan di dalam *Fathu al-Bârî* (11/112) oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani

Lafal *an-nubuwwah* dan *ar-risâlah* berbeda dalam asal penetapan bahasa. *An-Nubuwwah* dari *an-nabaa'* yaitu *al-khabar* (informasi). Jadi, nabi dalam 'urf adalah orang yang diberi informasi dari Allah dengan perintah yang mengharuskan taklif. Jika dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain maka dia adalah rasul. Jika tidak maka dia nabi, bukan rasul. Atas dasar ini, setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Nabi dan rasul berserikat dalam perkara yang umum, yaitu *an-nabaa'* (informasi) dan berbeda dalam risalah...

Kedua: Rasul adalah orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan ada kitab bersama dirinya. Adapun nabi adalah orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu secara mutlak. Badruddin al-'Ayni menyatakan di dalam *Al-Binâyah Syarhu al-Hidâyah* (1/116):

Perbedaan antara rasul dan nabi: rasul adalah orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan ada kitab Bersama dirinya. Adapun nabi adalah orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu secara mutlak, baik disertai dengan kitab, atau tidak disertai dengan kitab seperti Yusya' as. Jadi nabi itu lebih umum dari rasul. Demikian dikatakan oleh Syaikh Qiwwamuddin al-Atarazy di dalam *Syarh*-nya. Beliau dalam hal itu mengikuti pengarang *An-Nihâyah* yang berkata, "Rasul adalah nabi yang ada kitab bersama dirinya, seperti Musa as. Adapun nabi adalah orang yang diberi informasi dari Allah meski tidak

ada kitab bersama dirinya, seperti Yusya' as...

Ketiga: Rasul adalah orang yang kepada dirinya diwahyukan syariah dan diperintahkan untuk dia sampaikan. Adapun nabi adalah orang yang kepada dirinya diwahyukan syariah rasul-rasul lainnya dan diperintahkan untuk dia sampaikan. Jadi rasul adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariah dirinya sendiri, sementara nabi adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariah orang lain. Ini adalah pendapat yang kami pilih dan telah kami jelaskan di dalam Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* (1/35-38) *file word*.

Nabi dan rasul adalah dua lafal yang berbeda, tetapi keduanya bertemu pada pewahyuan syariah kepada keduanya. Perbedaan di antara keduanya: rasul adalah orang yang kepada dia diwahyukan syariah dan diperintahkan untuk dia sampaikan. Adapun nabi adalah orang yang kepada dia diwahyukan syariah rasul selain dia dan diperintahkan untuk dia sampaikan. Jadi rasul adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariah dirinya sendiri, sedangkan nabi adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariah orang lain....

Rasul adalah orang yang Allah utus dengan syariah baru yang diserukan kepada manusia. Adapun nabi adalah orang yang Allah utus untuk meneguhkan syariah sebelumnya.

Jadi Sayiduna Musa adalah seorang nabi sebab kepada dia diwahyukan Syariah. Dia pun sekaligus seorang rasul sebab syariah yang diwahyukan kepada dia adalah risalah miliknya. Adapun Sayiduna Harun adalah seorang nabi sebab kepada dia diwahyukan syariah, tetapi ia bukan seorang rasul sebab syariah yang diwahyukan kepada dia untuk disampaikan kepada orang lain bukanlah

risalah miliknya, melainkan risalah milik Musa. Sayiduna Muhammad adalah seorang nabi sebab kepada beliau diwahyukan Syariah. Beliau sekaligus seorang rasul sebab syariah yang diwahyukan kepada beliau adalah risalah milik beliau...

Pendapat ini adalah yang lebih dalam dan lebih tepat (*shawâb*). Hadis-hadis Nabi saw. pun menjelaskan realita dan perbedaan antara nabi dan rasul.

Kedua: Realita Sayiduna Harun as. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam teks kutipan di atas dari Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Jilid I, berdasarkan definisi yang *raajih* menurut kami untuk rasul dan nabi, kami memutuskan bahwa Harun as. adalah seorang nabi, tetapi bukan seorang rasul dengan *mafhuum* ini. Sebabnya, Harun as. dalam perkara syariah adalah mengikuti Musa as. Nas-nas syariah menyatakan demikian.

Lalu berkaitan dengan dua ayat mulia yang Anda sebutkan di pertanyaan, maka kita menelaah tafsirnya dengan ringkas sebagai berikut:

Di dalam *Tafsîr an-Nasafi* (2/297), misalnya, dinyatakan: Firman Allah: *Fa'tiyâhu* (Datanglah kalian berdua kepada dia), yakni Fir'aun. "*Faqûlâ innâ rasûlâ Rabbika* (Katakanlah, "Sungguhny kami berdua adalah utusan Tuhanmu)," yakni kepadamu (Fir'aun)...Firman Allah: *Qâla fa man Rabbukumâ, yâ Mûsâ* (Berkata Fir'aun, "Lalu siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?)" Fir'aun berbicara kepada keduanya, kemudian menyeru salah satu dari keduanya, karena Musa adalah yang pokok dalam kenabian dan Harun mengikuti Musa...

Dengan mengkaji dua ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang di dalamnya disebutkan Harun as. dengan lafal *al-irsâl* dan *ar-risâlah*, menjadi jelas bahwa penyebutan beliau di dalam ayat-ayat itu dengan lafal *al-irsâl* adalah

selalu bersama Musa as., yakni mengikuti Musa. Misalnya, dinyatakan dalam firman Allah SWT: “*Tsumma arsalnâ Mûsâ wa akhâhu Hârûna bi âyâtinâ wa sulthân[in] mubîn[in]*” (Kemudian Kami mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (kebesaran) Kami dan bukti yang nyata (TQS al-Mu`minun [23]: 45).”

Firman Allah: *Wa khî hârûnu huwa afshahu minnî lisân[an] fa arsilhu ma'îya rid'an yushaddiqunî innî akhâfu an yukadzdzibûna* (Saudaraku Harun lebih fasih lidahnya daripada aku. Karena itu utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)-ku. Sungguh aku khawatir mereka akan mendustakanku (TQS al-Qashshah [28]: 34).”

Jelas dari sini bahwa Harun as. tidak menyendiri dengan sifat *ar-risâlah*-nya, tetapi pembicaraan tentang dia dengan sifat ini adalah tentang Musa as. dan tentang Harun as. secara Bersama-sama. Artinya, Harun as. tidak independen dan menyendiri dengan sifat *ar-risâlah*-nya.

Namun, ketika datang pembicaraan di dalam al-Quran al-Karim tentang Harun as. secara sendiri independen dari sifat tersebut maka Harun disebut nabi dan tidak disebut rasul. Sebaliknya, pada waktu yang sama, al-Quran menetapkan untuk Mus as. sifat rasul dan nabi sekaligus. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Kami telah menganugerahkan kepada dia (Musa) sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi* (TQS Maryam [19]: 53).

Jadi tentang Musa as., Allah berfirman bahwa dia adalah “*rasûl[an] nabiyy[an]* (rasul dan nabi)”. Adapun Harun as. tidak ditetapkan untuk dia sifat *ar-risâlah*, tetapi cukup mensifati dirinya dengan kenabian: “*akhâhu Hârûna nabiyy[an]* (yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi)”.

Ini menegaskan pemahaman yang menjadi pendapat kami bahwa Musa as. adalah rasul

Jadi tentang Musa as., Allah berfirman bahwa dia adalah “*rasûl[an] nabiyy[an]* (rasul dan nabi)”. Adapun Harun as. tidak ditetapkan untuk dia sifat *ar-risâlah*, tetapi cukup mensifati dirinya dengan kenabian: “*akhâhu Hârûna nabiyy[an]* (yaitu saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi)”.

dan nabi sekaligus. Adapun Harun as. hanya seorang nabi, bukan rasul, karena ia mengikuti Musa as. Harun diperintahkan untuk menyampaikan risalah Musa as.

Karena itu sebagian ulama salaf berkata: tidak ada syafaat seseorang di dunia yang lebih agung dari syafaat Musa as. kepada Harun agar menjadi seorang nabi (QS Maryam [19]: 53).

Inilah yang kami *raajih*-kan dalam masalah ini dan itu merupakan pendapat *mutabbanat* bagi kita.

Wallâhu a'lam wa ahkam. []

[Diringkas dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, 12 Syawal 1444 H - 02 Mei 2023 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/88622.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/788892249464813>

3 Madrasah Yang Mehmet Fatih Jadikan Istanbul Sebagai 'Rumah Ilmu'

Setelah penaklukan Istanbul, Fatih fokus untuk menghidupkan kembali kota tersebut; Dia dengan cepat mulai bekerja untuk menjadikan kota itu sebagai pusat sains, budaya, dan seni. Pertama, madrasah harus didirikan. Fatih, yang berusaha keras untuk tujuan ini, memiliki kesempatan untuk mewujudkan ambisinya dan kemudian meminta kamar untuk dirinya sendiri di Madrasah Hagia Sophia. Namun Sultan Cihan ditolak dengan alasan "bukan mahasiswa atau profesor"; keinginannya terpenuhi setelah dia lulus ujian yang sukses di depan para professor.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/fatihin-istanbulu-ilim-yuvasi-haline-getirdigi-3-medrese/NaN>

Segera setelah penaklukan, Mehmet sang Penakluk mengubah 8 gereja di Istanbul menjadi madrasah, dan mengangkat profesor Bursa Muradiye Mevlana Alaettin Tûsî, Bursalî Hocaîzâde, Mevlâna Abdülkerim dan banyak cendekiawan lainnya.

Madrasah Tusi adalah Biara Pantakrator, yang sekarang menjadi Masjid Zeyrek. Pendidikan dan pelatihan reguler tidak mungkin dilakukan di vihara ini, yang memiliki 40 siswa.



Antara tahun 1463 dan 1471 dibangun Kompleks Fatih dengan masjid dan madrasah di kedua sisinya, rumah guru, sekolah dasar, perpustakaan, dapur umum dan dapur umum, dua kamar mandi, dan rumah sakit

Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa tiga madrasah didirikan di Istanbul pada masa pemerintahan Fatih dan ini adalah Madrasah Hagia Sophia, Madrasah Zeyrek dan Madrasah Sahn-1 Seman (Fatih).

Profesor pertama Hagia Sophia adalah Molla Hüsrev. Dia juga pemilik buku-buku fikih terkenal bernama Dürer dan Gurer.

Menurut legenda, Fatih memperhatikan para siswa yang lulus dari madrasahnyanya. Untuk tujuan ini, dia memiliki buku catatan tempat dia menuliskan nama, status, dan tugas mereka. Kadang dia juga memimpin panitia ujian. Ini membuktikan kepada kita bahwa Fatih menunjukkan minat yang sangat dekat pada kompleksnya sendiri.





Fatih meminta kamar di madrasah mereka. Para profesor memeriksa permintaan ini dan menolaknya dengan alasan "dia bukan mahasiswa atau profesor". Permintaan Fatih ini baru terpenuhi setelah ia lulus ujian dengan sukses di depan para profesor.

Ulama Ottoman akan pergi ke Samarkand untuk belajar matematika. Dengan dorongan dan usaha Fatih, Istanbul berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan berhasil menarik para sarjana dari Turki dan Dunia Islam.

Upah ulama yang bekerja di madrasah tinggi; mereka dihormati di tingkat tertinggi. Informasi berikut ditemukan di "Kanunnâme-i Âl-i Osman", yang dikaitkan dengan Mehmet sang Penakluk dan menunjukkan tempat dan gaji ulama dalam protokol : "Sahn mullah ada di mawlawy. Mereka memberikan uang kepada kepala sanjak."

Gaji tertinggi diberikan kepada guru besar yang mengajar di madrasah. Selain itu, fakta bahwa Ali Ku_cu diangkat sebagai profesor di Madrasah Hagia Sophia dengan 200 koin sehari saat itu menunjukkan bahwa nilai material dan moral yang diberikan kepada jabatan profesor sangat tinggi.



Madrasah pertama Istanbul Kulliye dibuka di tempat yang disebut "Ruang Imam" di Hagia Sophia setelah penaklukan. Profesor pertama Madrasah Hagia Sophia, guru Fatih dan cendekiawan besar saat itu, adalah Molla Hüsrev, yang menggantikan H1z1r Bey, kadi pertama Istanbul.

Beliau memberikan layanan pendidikan selama 18 tahun hingga dibangun Kompleks Fatih bersama para guru dan siswa Madrasah Hagia Sophia.

Profesor, penyair, dan doktor berpangkat tinggi dari berbagai daerah, dengan berita bahwa Istanbul telah berubah menjadi kota sains dan pendidikan; Mereka mulai bekerja di madrasah Hagia Sophia dan Zeyrek. Atas perintah Fatih Sultan Mehmet, perpustakaan berskala besar didirikan di madrasah Zeyrek dan Hagia Sophia. Belakangan, ketika Madrasah Sahn-1 Seman didirikan, perpustakaan dipindahkan ke sana.





Seperti Madrasah Hagia Sophia, Madrasah Zeyrek didirikan atas perintah Fatih dan Molla Zeyrek ditunjuk sebagai ketuanya. 40 kamar biara segera diubah menjadi tempat di mana para siswa menerima pendidikan dan tempat berlindung, dan pendidikan dimulai. Sultan menunjuk Wazir Agung Mahmut Pasha untuk menangani tempat ini.

Fatih Sultan Mehmet menunjuk Molla Zeyrek dan Ali Tusi (Alâeddin Tusi) sebagai kepala madrasah dan membayar 100 akçes per hari kepada para guru yang berharga ini. Madrasah Hagia Sophia dan Zeyrek adalah tempat di mana kegiatan ilmiah pertama terlihat di Istanbul setelah penaklukan. Pendidikan berlangsung selama 18 tahun hingga Madrasah Fatih dibangun.

Dapat dipahami dari semua ini bahwa Turki Besar menunjukkan kepada kita bagaimana menciptakan kerajaan besar dengan merevisi institusi negaranya dan pentingnya yang dia berikan pada sains dan pendidikan.

Pembangunan madrasah yang terletak di kedua sisi Masjid Fatih selesai pada tahun 1470. Madrasah-madrasah ini, yang merupakan bagian paling berharga dari kompleks tersebut, dengan demikian merupakan awal dari universitas di kota tersebut sebagai pusat pengajaran terpenting di Istanbul.

Madrasah di kedua sisi masjid disebut "Sahn-1 Seman". Selain madrasah-madrasah besar tersebut, dibangun pula madrasah-madrasah persiapan yang disebut "Tetimme" di kedua sisinya, yang letaknya lebih rendah karena kemiringan tanah.

Selain itu, ciri-ciri arsitektur bangunan tersebut tidak diketahui, diperkirakan tertutup atap. Yang berada di sisi Tanduk Emas disebut "Bahr-i Siyah" (Laut Hitam), dan yang berada di sisi Marmara disebut "Bahr-1 Sefid" (Mediterrania). Ini disebut Ba_ Kur_unlu, Ba_ Double Kur_unlu, Foot Double Kur_unlu, Foot Kur_unlu Madrasah dari Sarçhaneba_1 ke Edirnekap1.



BELAJAR POLITIK SEJAK DINI

Ustadzah Rahmah

Kalau kita mendengar kata *politik* seakan-akan penuh dengan tipudaya. Politik itu kotor. Politik itu perebutan kekuasaan. Demikian seterusnya. Karena itu sering ada ungkapan kalau mau menjadi Muslim sejati, benar-benar hidupnya hanya beribadah kepada Allah, maka jauhi politik.

Padahal hakikat politik tidak demikian. Secara etimologi (bahasa), politik (*as-siyâsah*) sebenarnya berasal dari kata *sâsa-yasûsu-siyâsat[an]*, yang berarti *mengurus kepentingan* seseorang. Dalam kamus *Al-Muĥîth* dikatakan, “*Sustu ar-ra’iyata siyasat[an]*”. Maknanya, “Saya memerintah dan melarangnya.”

Dekat dengan pengertian ini, secara terminologi (istilah) Ahmad ‘Athiyah menyatakan politik bermakna *memelihara, mengurus dan memperhatikan urusan rakyat*. Dengan demikian politik Islam berarti memelihara, mengurus dan memperhatikan urusan rakyat/umat sesuai ajaran Islam.

Mengurus dan memperhatikan urusan rakyat/umat sesuai ajaran Islam—yakni mempraktikkan politik Islam—merupakan kewajiban seorang Muslim. Sebagaimana kewajiban yang lain, kaum Muslim wajib berpolitik dan wajib pula mengajarkan politik kepada putra-putrinya. Dalam mengajarkan politik Islam kepada putra-putri kita, perlu memperhatikan materi-materinya sebagai berikut:

1. *Memahamkan bahwa setiap Muslim wajib berislam secara kaaffah.*

Oratua wajib mengenalkan kepada anak bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur seluruh urusan kehidupan dunia dan urusan akhirat. Islam mengatur masalah ibadah shalat, puasa dan haji. Islam mengajarkan bagaimana akhlak terhadap orangtua, guru dan teman. Islam mengatur masalah makanan, dengan mewajibkan makan makanan yang halal dan baik (sehat). Islam juga mewajibkan umat Islam menuntut ilmu. Dalam masalah interaksi sosial, Islam mengatur pergaulan laki-laki-perempuan. Islam menganjurkan pernikahan bagi yang telah siap dan mengharamkan zina. Dalam masalah ekonomi Islam menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam masalah politik (pengurusan masalah umat/rakyat), Islam mewajibkan penguasa mengurus urusan umat sesuai dengan ajaran Islam. Islam pun mewajibkan umat untuk mengoreksi penguasa dengan standar ajaran Islam.

Mendidik anak berislam *kaaffah* adalah dengan membiasakan diri dan memberi teladan dalam aktivitas sehari-hari melaksanakan syariah Islam secara menyeluruh (*kaaffah*). Kewajiban melaksanakan Islam *kaaffah* terdapat dalam al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian (QS al-Baqarah [2]: 208).

Dalam *Tafsir Jalalain* jilid I Imam Jalaluddin menafsirkan ayat di atas: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (total), maksudnya ke dalam seluruh syariah Islam.*”

Allah SWT mewajibkan penerapan hukum Islam secara keseluruhan baik berkaitan dengan akidah, syariah, ibadah, muamalah, ekonomi, sosial, politik hingga pemerintahan. Allah mengharamkan mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, 1/214).

2. Membiasakan senantiasa dalam ketakwaan.

Membiasakan anak senantiasa dalam ketakwaan dan memberikan teladan yang baik. Anak-anak dibiasakan dalam ketakwaan di keluarga, di sekolah dan di lingkungannya. Mereka harus berteman dengan teman-teman yang shalih-shalihah. Mereka harus selalu dalam ketakwaan saat mengakses media dan berteman di media sosial. Seorang yang bertakwa akan selalu menjaga agar Allah tidak melihat dirinya di tempat larangan-Nya, dan selalu ada di tempat perintah-Nya. Ia senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya (Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad fii al-Islam*).

Seorang guru dan orangtua harus bertakwa karena tugas guru dan orangtua adalah mendidik anak agar perilakunya sesuai dengan tuntutan Islam, bertakwa kepada Allah, menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah (Abdurrahman Amirah, *Manhaj al-Qur'aan fii Tarbiyah ar-Rijaal*).

3. Memahami bahwa bertakwa itu wajib bagi seluruh kaum Muslim, baik dalam skala individu, masyarakat maupun negara. Perintah takwa ini dinyatakan dalam al-Quran sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَكُونُوا
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam (QS Ali Imran [3]: 102).

Imam az-Zamaksari menafsirkan حَقَّ تُقَاتِهِ , yaitu benar-benar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya (Az-Zamaksari, *Al-Kasysyaaf*, 1/306).

Ketakwaan ini meliputi ketakwaan sebagai individu seorang Muslim, juga ketakwaan dalam memegang amanah. Artinya, secara individu kita bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah yang bisa dilaksanakan sendiri tanpa memerlukan orang lain, misalnya melaksanakan shalat, shaum dan zakat; juga meninggalkan larangan-Nya, misalnya tidak mencuri, tidak berzina dan tidak merampok. Akan tetapi, jika kita menjadi pemimpin rumah tangga, maka kita tidak cukup bertakwa dengan melaksanakan puasa, shalat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pribadi yang lain; juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sebagai orangtua, kita pun wajib peduli urusan umat Islam, tapi mengajak dan memfasilitasi anak-anaknya/anggota keluarganya untuk melakukan kewajiban tersebut.

Masyarakat yang bertakwa akan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, saling beramar makruf nahi munkar, serta saling menasihati dalam kebaikan

dan kesabaran. Perintah saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran ini terdapat dalam al-Quran (Lihat: QS al-'Ashr [103]: 1-3).

Demikianlah individu dan masyarakat yang **bertakwa adalah yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya di seluruh aspek kehidupan**. Demikian pula negara yang bertakwa adalah negara yang **melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya secara kaffah (menyeluruh)**. Dengan kata lain ketakwaan itu mengharuskan pelakunya meninggalkan maksiat; meninggalkan hukum buatan manusia; meninggalkan kapitalisme, materialisme, liberalisme, dan isme-isme yang lain secara total. Sebagai gantinya dia harus menerapkan syariah Islam secara *kaaffah*.

4. Menumbuhkan kepedulian terhadap permasalahan umat dan kewajiban menawarkan solusi Islam.

Sebelum menumbuhkan kepedulian pada anak terhadap pekermasalahan umat, dan kewajiban menawarkan solusi Islam, tentu kita harus memahamkan makna politik Islam terlebih dulu kepada mereka. Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, politik Islam adalah mengatur urusan rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ajaran Islam. Politik ini secara praktis dilakukan oleh negara. Adapun rakyat punya kewajiban untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan ajaran Islam. Rakyat mempunyai kewajiban untuk menasihati dan mengoreksi kepada penguasa (Zallum, *Pemikiran Politik Islam*. hlm. 11-15).

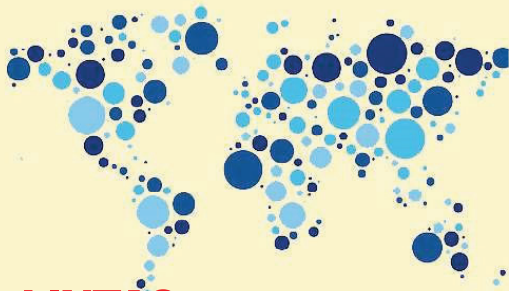
Dari pengertian politik Islam di atas, sesungguhnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa aktivitas politik ternyata tidak hanya diwajibkan kepada para politikus Muslim dan penguasa Muslim saja, tetapi diwajibkan juga kepada seluruh kaum Muslim laki-laki maupun perempuan, baik politikus

Berpolitik Islam berarti memperhatikan urusan umat harus diurus sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk aktivitas politik menasihati dan mengoreksi atau beramar makruf nahi munkar kepada penguasa agar sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan membiasakan anak beramar makruf nahi munkar kepada teman-temannya dan mengkritisi peraturan yang salah. Misalnya pada bulan Ramadhan Pemerintah *kok* membiarkan orang yang tidak puasa dan membiarkan warung-warung secara terbuka menjual makanan siap saji. Pemerintah *kok* membiarkan tayangan-tayangan porno di media dll.

maupun rakyat biasa, baik para ulama maupun orang awam (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104).

Berpolitik Islam berarti memperhatikan urusan umat harus diurus sesuai dengan ajaran Islam. Termasuk aktivitas politik menasihati dan mengoreksi atau beramar makruf nahi munkar kepada penguasa agar sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan membiasakan anak beramar makruf nahi munkar kepada teman-temannya dan mengkritisi peraturan yang salah. Misalnya pada bulan Ramadhan Pemerintah *kok* membiarkan orang yang tidak puasa dan membiarkan warung-warung secara terbuka menjual makanan siap saji. Pemerintah *kok* membiarkan tayangan-tayangan porno di media dll.

Demikianlah. Karena beraktivitas politik sesuai ajaran Islam adalah kewajiban kaum Muslim, maka kaum Muslim dan Muslimah harus mengajarkan kepada anak-anaknya kewajiban tersebut sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. □



LINTAS DUNIA

Perbedaan Sekularisme Kemalis versus Erdogan

Ada satu perbedaan antara sekularisme Kemalis (sekularisme Eropa) versus sekularisme Erdogan (sekularisme Amerika). Hal itu diungkapkan Hizbut Tahrir (HT) dalam situs *alraiah.net*, Rabu (3/5/2023).

Menurut HT, sekularisme Kemalis identik dengan ateisme dan menghilangkan semua manifestasi religiusitas dalam semua aspek kehidupan. Bahkan sekularisme Kemalis ini adalah provokasi terang-terangan terhadap perasaan kaum Muslim karena memusuhi Islam dengan segala keberanian, keangkuhan dan kekejaman.

“Oleh karena itu sikap kaum Muslim terhadap sekularisme Kemalis ini dan para pengikutnya adalah penolakan secara mutlak, bahkan bintangnya sudah tenggelam di antara kaum Muslim. *Alhamdulillah Rabb al-‘alamiin*,” ungkap HT.

Adapun sekularisme Erdogan, papar HT, masih menyisakan ruang meski sangat kecil bagi kaum Muslim untuk mengekspresikan perasaan Islam mereka dalam urusan kehidupan individunya.

Adapun yang terkait dengan sistem negara dan masyarakat, tegas HT, maka sekularisme Erdogan itu sama seperti sekularisme Kemalis. Keduanya sama-sama mendewakan manusia, dan menjadikan manusia sebagai pembuat hukum (*al-musyarri*); yang melegislasi konstitusi, yang menghalalkan, dan yang mengharamkan.

“Semua ini tentu sangat bertentangan dengan al-Quran. Allah SWT berfirman, yang menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Pembuat hukum (*al-musyarri*), yang menghalalkan, dan yang mengharamkan,” jelas HT seraya mengutip al-Quran (yang artinya): *Keputusan (membuat hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui* (TQS Yusuf [12]: 40).

HT menegaskan, sekularisme, baik Eropa maupun Amerika, adalah sumber dari semua masalah manusia; penyebab dari semua problem dan krisis yang menimpa mereka.

“Jadi, sekularisme inilah yang menciptakan semua bencana, malapetaka, kesengsaraan, perselisihan, kerusuhan, perang, pengeboman, dan pembunuhan yang menghantui kehidupan kita saat ini,” pungkasnya.

HT Pertanyakan Kebebasan Berpendapat

Penangkapan seorang anak migran Muslim oleh pihak berwenang di kota utara Bremerhaven, Jerman, secara paksa dan brutal dari keluarganya, setelah menerima aduan dari pihak sekolah bahwa anak tersebut mendapatkan pengajaran ‘diskriminasi terhadap homoseksual (baca: hukum Islam tentang keharaman homoseksual)’, membuat Hizbut Tahrir (HT) bertanya-tanya tentang kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpendapat.

“Kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpendapat adalah dua istilah yang telah lama kita dengar dari negara-negara kafir, bahwa

mereka membiarkan seseorang melakukan apa yang dia yakini, dan siapa pun boleh berbicara apa pun yang dia inginkan meskipun pendapatnya bertentangan dengan pendapat orang lain. Benarkah demikian, sementara mereka harus mengambil anak-anak dari keluarganya dengan cara paksa dan brutal?" gugat HT sebagaimana dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Jumat (5/5/2023).

HT pun mempertanyakan, apakah sebuah kesalahan jika orangtua mengingkari suatu kejahatan dan mengajari anaknya untuk mengingkarinya juga, serta mengungkapkan pendapatnya dan menolak perilaku yang bertentangan dengan kodrat manusia?

"Apakah mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya seperti Anda?! Ataukah semua yang Anda bicarakan tentang kebebasan itu menjadi batal demi hukum jika penentangannya adalah seorang Muslim?!" tanya HT retorik.

Ini dalam hal kebebasan, tetapi jika berbicara tentang hak-hak anak, jelas HT, publik akan menemukan bahwa tindakan pihak berwenang Jerman tidak memiliki hak apa pun dan tidak manusiawi.

"Lalu, hukum mana yang mengizinkan Anda untuk menyerbu rumah yang aman, yang orang-orangnya nyaman satu sama lain, dan kemudian mengambil paksa anak mereka yang menangis karena dilepaskan dengan brutal dari pelukan ibu dan ayahnya?! Hukum mana yang memberi Anda hak untuk memaksa seorang anak hidup sesuka Anda?!" tanya HT lagi.

HT pun merasa terluka atas kezaliman tersebut. "Demi Allah. Itu adalah kezaliman yang melukai hati kami, dan insyaa Allah itu tidak akan lama, sebab tegaknya Khilafah sudah sangat dekat, dan kami akan menunjukkan kepada orang-orang kafir di antara kami dengan tindakan, bukan lagi dengan kata-kata berupa kecaman atas semua kezaliman yang mereka lakukan," pungkasnya.

Tentara Muslim Wajib Melindungi Palestina

Terkait penodaan terhadap Masjidil Aqsha dan teror terhadap jemaah Muslim di dalamnya yang kembali dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi, Direktur Bagian Perempuan di Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir Dr. Nazreen Nawaz menyeru tentara-tentara Muslim di dunia untuk melindungi situs tersuci ke-3 bagi umat Islam ini.

"Kami mengalihkan tangisan dan permohonan kami kepada anak-anak tentara Muslim, orang-orang yang telah Allah SWT tetapkan dengan tugas melindungi umat dan Islam ini," serunya, yang ditulis kepada Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir, untuk kemudian dipublikasikan sesaat pasca penyerbuan pasukan Zionis atas Masjid Al-Aqsha pada malam Selasa (4/4/2023) lalu.

Menurut Dr. Nawaz lagi, penodaan Al-Aqsha dan teror terhadap jemaah Muslim yang telah menjadi ritual tahunan bagi entitas penjajah Yahudi ini bertujuan untuk mempermalukan Muslim Palestina dan mengerahkan otoritas mereka lebih jauh atas tempat-tempat suci Islam dan Tanah Suci Palestina.

Dr. Nawaz menyebutkan tidak ada penghinaan yang lebih besar daripada pendudukan kriminal atas Bumi Palestina oleh entitas penjajah Yahudi yang juga mengendalikan siapa yang masuk dan beribadah di situs tersuci ke-3 bagi umat Islam.

Padahal Al-Aqsha juga merupakan tempat Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw. naik ke surga. Pada setiap Ramadhan, lanjut Dr. Nawaz, bulan yang mulia ini, dahulunya adalah bulan yang di dalamnya terjadi kemenangan demi kemenangan kaum Muslim dan Islam yang mulia ini. "Namun, hari ini, karena ketiadaan Khilafah, umat dilanda tragedi demi tragedi, penghinaan demi penghinaan," imbuhnya sedih.

Lantaran itu, menjadi penting bagi siapa saja yang menderita berbagai kesulitan, untuk senantiasa memohon kepada Allah SWT agar



melindungi, dan memberikan kemenangan.

Namun, untuk dipahami lebih lanjut, kata Dr. Nawaz, Allah SWT tidak akan menjawab doa tersebut kecuali dengan terlebih dulu manusia berupaya melawan aturan kufur para penguasa dengan menyerukan Khilafah yang berdasarkan metode kenabian sebagaimana digambarkan Nabi saw., sebagai perisai, penjaga umat dan pembela agama Islam ini.

Artinya, pendudukan Palestina yang dipertahankan oleh tentara entitas penjajah Yahudi hanya bisa bebas dengan memobilisasi pula tentara Muslim.

Maka dari itu, ia mengajak kaum Muslim terutama para tentara untuk menghancurkan kesetiaan kepada rezim Muslim pengkhianat, lantas kemudian memberikan pertolongan (*nushrah*), serta dukungan material untuk menegakkan kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian.

“Ini adalah negara yang akan membawa kehormatan bagi nama Anda, membangun keamanan bagi umat Anda, dan membawa kemenangan demi kemenangan sekali lagi untuk *diin* (agama), *biidznillaah* (dengan izin Allah SWT) Anda yang mulia,” pungkasnya.

Sudan Diseru Agar Kembali ke Jalan Takwa

Terlepas dari faktor penyebab atas apa yang disebut dengan perang saudara yang terjadi di Sudan sejak Sabtu pagi (15/4) dan masih berlanjut hingga tulisan ini dibuat, Juru Bicara Hizbut Tahrir Sudan Ibrahim Utsman menyeru para komandan militer maupun paramiliter yang terkait agar bergegas kembali ke jalan takwa kepada Allah SWT.

“Kami mengatakan kepada para komandan militer dan komandan paramiliter, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), bertakwalah kepada Allah SWT, kembalilah ke akal sehatmu,” serunya, seperti tertulis dalam Pernyataan Resmi Hizbut Tahrir Wilayah Sudan yang diterima *Mediaumat.id*, Selasa (18/4/2023).

Lebih dari itu, sambung Abu Khalil, sapaan akrabnya, agar para komandan dimaksud bertindak menyelamatkan darah kaum Muslim, dan memberikan pertolongan kepada HT untuk mendirikan Khilafah Rasyidah kedua yang mengikuti metode kenabian.

Dengan demikian, semoga Allah SWT mengampuni atas apa yang telah terjadi sebelumnya, dan membalas dengan pahala kaum Anshar yang telah menolong Rasulullah saw., sampai beliau menegakkan Negara Islam pertama di Madinah al-Munawwarah.

Seruan ini bukanlah tanpa alasan, kata Abu Khalil. Berdasarkan hadis riwayat Imam al-Bukhari, pertempuran antara pasukan militer dan paramiliter, Pasukan Dukungan Cepat (RSF), adalah pertempuran terlarang (*haram*). Begitu pula ketentuan syariah hanya membolehkan ada satu pasukan di bawah komando Khalifah kaum Muslim.

Adapun secara kekuasaan, kata Abu Khalil menerangkan, Islam telah menjadikan kekuasaan berada pada umat. Umatlah yang berbaiat kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat untuk memimpin Khilafah dan memerintah dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Lantas berkenaan dengan pemerintahan dan kekuasaan tersebut, jelas Abu Khalil, sejatinya bukanlah *ghaniimah*, melainkan penerapan hukum-hukum Allah dan mengurus urusan umat sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah.

Dengan demikian, sekali lagi ia tegaskan, pertempuran ini terjadi di atas kebatilan, bukan untuk menegakkan agama Allah atau menerapkan hukum-hukum-Nya.

Berikutnya atas nama Hizbut Tahrir, ia pun meminta pertanggungjawaban para komandan tersebut. “Kami, di Hizbut Tahrir Wilayah Sudan, meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer dan para pemimpin paramiliter, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) atas darah yang telah dan masih ditumpahkan ini,” pungkasnya. **[Joy dan Tim]**

KH Shiddiq al-Jawi: TAK CUKUP HANYA MEMILIH PEMIMPIN

Pengantar Redaksi:

Sudah lama umat Islam, termasuk para tokohnya, tidak menyadari, bahwa seharusnya ada dua agenda besar umat di ranah politik: *Pertama*, mewujudkan pemimpin yang baik. *Kedua*, mewujudkan sistem yang baik.

Faktanya, politik umat Islam seolah hanya fokus pada bagaimana mewujudkan pemimpin yang baik. Itu pun faktanya sering gagal. Mereka lupa bahwa ada yang jauh lebih penting, yakni mewujudkan sistem yang baik. Tidak lain adalah sistem Islam.

Lalu apa yang dimaksud dengan sistem Islam? Bagaimana pula caranya umat mewujudkan sistem Islam?

Itulah di antara pertanyaan yang diajukan *Redaksi* kepada KH Shiddiq al-Jawi dalam wawancara kali ini.

Kiai, apa sebenarnya cita-cita politik umat Islam?

Cita-cita politik umat Islam itu intinya ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan: *Pertama*,

mewujudkan pemimpin yang baik. *Kedua*, mewujudkan sistem kehidupan yang baik. Pemimpin yang baik itu yang dimaksud adalah Khalifah, atau Imam, yaitu pemimpin tertinggi

dalam Negara Khilafah. Adapun sistem kehidupan yang baik maksudnya adalah segala peraturan hidup berupa syariah Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan tanpa kecuali, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pergaulan, politik luar negeri, dan sebagainya. Sistem kehidupan Islam ini tidak mungkin ada, kecuali dalam Negara Khilafah.

Apa dasar cita-cita politik pertama, yaitu mempunyai pemimpin yang baik?

Keharusan mempunyai pemimpin yang baik didasarkan pada dalil-dalil syariah yang mewajibkan umat Islam untuk mempunyai seorang pemimpin. Antara lain sabda Rasulullah saw., *“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di suatu tempat di muka bumi, kecuali mereka harus memilih salah seorang dari tiga orang itu untuk menjadi pemimpinnya.”* (HR Ahmad).

Pemimpin ini tentu tidak sembarang pemimpin, melainkan wajib pemimpin yang baik. Karena itulah para ulama kemudian merinci syarat-syarat pemimpin yang baik itu ada tujuh syarat, yaitu: Muslim, laki-laki, berakal (*‘aaqil*), balig (dewasa), merdeka (bukan budak), adil (bukan fasik), dan mampu. Jadi kalau calon pemimpin itu tidak memenuhi salah satu dari tujuh syarat tersebut, misalnya dia adalah Muslim, tetapi fasik dalam arti Muslim yang tidak taat, seperti tidak shalat lima waktu, suka minum khamr, terlibat transaksi riba, maka berarti dia tidak layak menjadi pemimpin bagi umat Islam.

Lalu apa dasar cita-cita politik yang kedua, yaitu sistem kehidupan yang baik?

Jadi begini, cita-cita politik Islam ini tidak hanya soal kepemimpinan. Ada satu lagi cita-cita politik umat Islam yang menggenapi

persoalan kepemimpinan itu, yaitu sistem kehidupan islami yang menjadi ruang hidup bermasyarakat dan bernegara bagi umat Islam.

Keharusan sistem kehidupan Islami ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*, sifat ajaran Islam itu sendiri yang merupakan agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan, tak hanya hanya mengatur ibadah. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Telah Kami turunkan al-Kitab (al-Quran) kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu* (TQS an-Nahl [16] : 89).

Kedua, sifat Rasulullah saw. itu sendiri yang bukan sekadar figur seorang nabi, melainkan juga figur seorang pemimpin/pemegang kekuasaan. Jelas sifat Rasulullah saw. ini akan berbeda secara kontras dengan sifat nabi yang tidak menjadi pemegang kekuasaan, seperti Nabi Isa as., Nabi Musa as., dan Nabi Harun as. Mereka itu para nabi, tetapi bukan pemegang kekuasaan. Ini beda dengan para nabi yang juga pemegang kekuasaan, seperti Nabi Sulaiman as. Jadi sifat Nabi Muhammad as. itu lebih dekat kepada figur Nabi Sulaiman as. yang menjalankan dua tugas sekaligus, yaitu tugas sebagai nabi, dan tugas sebagai pemimpin umat atau pemegang kekuasaan.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, cara yang paling tepat dengan apa?

Untuk mewujudkan cita-cita politik umat Islam tersebut, cara yang paling tepat adalah dengan meneladani cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Hal ini wajib hukumnya. Sebabnya, Rasulullah saw. merupakan *uswah hasanah* atau suri teladan yang wajib diikuti oleh umat Islam. Tidak hanya dalam tatacara ibadah, seperti shalat dan haji, melainkan juga dalam tatacara mewujudkan pemimpin Islam dan sistem kehidupan Islam. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan*

yang baik bagi kalian (QS al-Ahzab [33]: 21).

Secara garis besar, saat ini di tengah-tengah umat terdapat tiga varian pendapat di kalangan jamaah-jamaah Islam mengenai cara untuk mewujudkan cita-cita politik umat Islam. *Pertama*, ada yang menempuh jalan kekerasan, yang diyakini sebagai jihad. *Kedua*, ada yang menempuh jalan demokrasi. *Ketiga*, ada yang menempuh cara mengemban dakwah Islam (*hamlu ad-da'wah al-islamiyyah*), tanpa menggunakan kekerasan dan tidak pula menempuh jalan demokrasi. Cara ketiga inilah yang insya Allah merupakan cara paling tepat ditinjau dari segi kekuatan dalilnya.

Kiai, politik Islam dikatakan harus mengabdikan pada Islam dan umat Islam. Mengapa demikian?

Karena hal itu sesuai dengan definisi politik Islam itu sendiri. Politik atau *siyaasah* itu sendiri maknanya secara umum adalah *ri'ayah syu'uun al-ummah*, yakni pengaturan berbagai urusan umat. Jadi dari frasa "*syu'uun al-ummah*", memang sangat jelas bahwa politik dalam Islam wajib mengabdikan kepada umat Islam. Ketika kata *siyaasah* itu kita gabungkan dengan kata *Islam* sehingga menjadi istilah *politik Islam* atau *siyaasah islaamiyyah*, artinya adalah *ri'ayah syu'uun al-ummah bi al-Islam*, yaitu pengaturan berbagai urusan umat berdasarkan syariah Islam. Jadi, pengaturan berbagai urusan umat ini jelas tidak boleh dengan sembarang peraturan, melainkan wajib menggunakan syariah Islam semata, bukan yang lain. Nah, karena pengaturan urusan umat Islam tidak boleh kecuali dengan syariah Islam, dari sinilah kita paham bahwa politik Islam itu memang wajib mengabdikan pada Islam itu sendiri.

Apa dasar politik Islam?

Dasarnya adalah Aqidah Islam, yaitu kalimat *Laa ilaaha illaLaah Muhammad*

Rasulullaah. Itulah dasar politik Islam. Hal ini dapat kita pahami dari nas-nas syariah yang menjelaskan bahwa pengaturan urusan umat Islam atau *ri'ayah syu'uun al-ummah*, dilaksanakan hanya dengan syariah Islam, bukan yang lain. Misalnya, perintah Allah kepada Rasulullah saw. untuk menjalankan hukum yang Allah turunkan dalam QS Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi: *Fahkum baynahum bimaa anzalalLaah*. Artinya: "Tegakkanlah oleh kamu, Muhammad, hukum yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu syariah Islam."

Syariah Islam itu sendiri, yang berupa ayat-ayat hukum (*ayaat al-ahkaam*) atau hadits-hadits yang terkait hukum (*ahaadits al-ahkaam*), sebagian besarnya turun setelah hijrah, bukan sebelum hijrah. Misalnya, ayat yang mengharamkan *khamr* (minuman keras) dalam QS Al-Maidah ayat 90, ayat yang mengharamkan riba dalam al-Baqarah ayat 275, ayat yang mewajibkan *qishaash* dalam QS al-Baqarah ayat 178, dll. Jadi semua ayat-ayat hukum (*ayaat al-ahkaam*) tersebut adalah ayat Madaniyah, yang turun setelah hijrahnya Rasulullah saw. ke Madinah.

Namun, fase di Madinah ini tidak dapat dilepaskan dari fase perjuangan Rasulullah saw. di Makkah yang mendahului fase Madinah. Dakwah di Nabi saw. Makkah justru menjadi pondasi atau landasan bagi penerapan syariah Islam di Madinah. Pada fase sebelum hijrah itulah turun ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, Hari Kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Jadi, keimanan, mendahului atau mendasari syariah Islam. Dengan kata lain, yang menjadi dasar politik Islam, adalah Aqidah Islam.

Bicara tentang politik akan terkait dengan arah perjuangan. Lalu bagaimana arah perjuangan politik Islam itu?

Saat ini arah perjuangan politik Islam tersesat mengikuti *mainstream* dari politik sekuler yang ada sekarang, yaitu berpolitik yang sudah dibatasi dalam kerangka negara demokrasi saat ini. Dalam arus politik *mainstream* seperti ini, kita umat Islam hanya akan terbawa pada cita-cita politik Islam yang pertama saja, yaitu persoalan kepemimpinan. Siapakah calon pemimpin yang baik bagi umat Islam, si A ataukah si B? Jadi hanya persoalan pemimpin yang akhirnya menjadi fokus berpikir kita. Kita akhirnya menjadi lupa atau tersesat, bahwa ada cita-cita politik Islam yang kedua, yaitu persoalan sistem kehidupan Islam yang mesti diwujudkan oleh umat Islam, yaitu sistem kehidupan Islam dalam kerangka Negara Khilafah.

Mengapa politik Islam dikatakan wajib menolak sekularisme dan para pendukungnya serta partai-partainya, Kiai?

Tentu karena sekularisme itu sebenarnya sistem kehidupan yang tidak cocok bagi umat Islam. Sekularisme yang tumbuh dalam latar belakang historis dan sosiologis dari Eropa dan Amerika mengasumsikan bahwa agama itu hanya boleh mengatur soal ibadah yang sifatnya ranah privat. Agama tidak boleh mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya merupakan ranah publik. Di sinilah persoalannya. Sekularisme mungkin cocok bagi umat Kristiani yang meyakini bahwa agama Kristen itu memang agama privat, bukan agama publik yang mengatur bagaimana kita bermasyarakat dan bernegara. Ini sesuai dengan Bibel, khususnya dalam Perjanjian Baru (*New Testament*), bahwa kekuasaan dan agama itu terpisah, yang mempunyai ranah masing-masing. Dalam Matius 22:21, disebutkan: *Kalau begitu, berilah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang milik Allah.*

Sekularisme mungkin cocok bagi umat Kristiani, yang meyakini bahwa Nabi Isa as. hanyalah figur nabi—yang bagi mereka nabi Isa adalah tuhan, tetapi bukan figur pemimpin yang memegang kekuasaan.

Sekularisme ini jelas tidak mungkin cocok dengan umat Islam. Sebabnya, umat Islam meyakini bahwa Islam itu bukan hanya mengatur ranah privat seperti ibadah, tetapi juga mengatur ranah publik. Islam itu diimani oleh umat Islam sebagai agama sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Maidah ayat 3; sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, sebagaimana QS An-Nahl ayat 89. Demikian pula, Nabi Muhammad saw. itu figur yang sangat berbeda dengan Nabi Isa as. Nabi Isa as. itu hanya nabi, bukan pemimpin pemegang kekuasaan. Sebaliknya, Nabi Muhammad saw. itu adalah seorang nabi sekaligus seorang pemimpin yang memegang kekuasaan, persis seperti halnya Nabi Sulaiman as.

Kiai, bolehkan politik Islam itu hanya berupa politik pragmatis minus ideologis?

Tentu tidak boleh. Sangat berbahaya kalau ada Muslim yang berpolitik Islam, tetapi bersikap pragmatis dalam berpolitik. Pragmatisme itu paham yang mengajarkan bahwa baik dan buruk itu diukur dari manfaat (*utility*) suatu tindakan, yaitu terpenuhinya kebutuhan kita, misalnya meraih jabatan atau kedudukan politik, tanpa melihat lagi halal dan haramnya cara yang digunakan. Politisi Muslim yang pragmatis akhirnya menghalalkan cara-cara kotor untuk mencapai tujuan politiknya, seperti suap-menyuap, gratifikasi, dan sebagainya. Jelas ini bertolak belakang dengan cara berpolitik Islam, yang wajib menggunakan standar halal dan haram dalam berpolitik. Cara berpolitik yang berpatokan dengan halal-haram inilah yang disebut dengan berpolitik secara

ideologis, yakni berpolitik sesuai dengan Islam.

Menurut Kiai, apa kriteria politisi Islam itu?

Politisi Islam adalah Muslim yang memperjuangkan cita-cita politik Islam, baik cita-cita mewujudkan pemimpin yang baik, yaitu seorang Khalifah atau Imam, maupun cita-cita mewujudkan sistem kehidupan yang baik, yaitu tegaknya Khilafah Islam, melalui cara-cara yang baik, yaitu sesuai syariah Islam.

Saat ini politik Islam hanya mengarah pada terpilihnya pemimpin yang baik semata. Apakah tepat? Bagaimana dengan terbentuknya sistem yang baik?

Arah politik Islam yang hanya fokus pada persoalan pemimpin, tetapi mengabaikan persoalan sistem kehidupan, adalah arah politik yang sesat. Mengapa? Karena umat Islam akan justru semakin jauh dari arah perjuangan politik idealnya, yaitu mewujudkan pemimpin yang baik, yaitu Khalifah atau Imam, dan sekaligus mewujudkan sistem kehidupan yang baik, yaitu Khilafah.

Dari pengalaman yang ada, arah politik yang hanya fokus pada pemimpin akhirnya hanya akan menghasilkan pemimpin yang lebih mengabdikan pada kepentingan para pemodal, atau yang sekarang lebih sering disebut sebagai oligarki. Ini merupakan cacat bawaan dalam sistem demokrasi. Politik yang demikian ujung-ujungnya hanya melahirkan pemimpin yang melayani kepentingan oligarki, bukan melayani kepentingan rakyat.

Seetuhnya sejauh mana urgensi perjuangan Khilafah dalam arah politik umat?

Sangat urgen. Karena itu arah politik umat Islam harus dikoreksi. Sungguh tidaklah cukup umat Islam mempunyai pemimpin yang baik,

arah politik umat Islam harus dikoreksi. Sungguh tidaklah cukup umat Islam mempunyai pemimpin yang baik, tetapi sistem kehidupannya buruk, yaitu sistem demokrasi sekuler yang ada saat ini. Arah politik umat tidak akan mungkin bisa lurus sesuai dengan Islam, kecuali dengan dua cita-cita politik sekaligus, yaitu mewujudkan pemimpin yang baik, dan mewujudkan sistem kehidupan yang baik, yaitu sistem kehidupan dalam negara Khilafah.

tetapi sistem kehidupannya buruk, yaitu sistem demokrasi sekuler yang ada saat ini. Arah politik umat tidak akan mungkin bisa lurus sesuai dengan Islam, kecuali dengan dua cita-cita politik sekaligus, yaitu mewujudkan pemimpin yang baik, dan mewujudkan sistem kehidupan yang baik, yaitu sistem kehidupan dalam negara Khilafah.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh umat untuk menggapai itu semua?

Yang harus dilakukan secara garis besar ada dua. *Pertama*, mengarahkan perjuangan umat agar mempunyai dua buah cita-cita politik Islam yang saya sebutkan tadi. *Kedua*, menghentikan segala arah perjuangan yang masih mengikuti arus *mainstream* yang ada, yaitu arah politik yang hanya fokus pada persoalan pemimpin, tetapi mengabaikan arah politik untuk mewujudkan sistem kehidupan yang baik. □

MEREKONSTRUKSI KESADARAN POLITIK UMAT

M. Iwan Januar

Eksistensi partai politik di tengah masyarakat adalah kemestian. Banyak peran dan tugas yang hanya bisa diemban oleh suatu partai politik yang tidak bisa dilakukan oleh umat. Ketiadaan partai politik di suatu negara akan merugikan masyarakat dan membuat suatu pemerintahan berjalan liar. Tiada yang mengontrol mereka ketika ugul-ugalan, saat para penguasa di belakang setir kekuasaan.

Prof. Dr. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir. Para anggotanya memiliki nilai, orientasi serta cita-cita yang sama dengan tujuan agar dapat memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik. Biasanya partai politik akan berusaha meraih tujuannya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka.

Ada hal yang penting digarisbawahi dari penjelasan di atas. Anggota partai politik harus memiliki nilai, orientasi serta cita-cita yang sama. Hal ini menjadi urgen karena partai politik harusnya menjadi lokomotif perubahan yang menarik umat menuju perubahan politik yang sebenarnya. Tidak mungkin ada

perubahan jika partai politik justru zonder nilai, orientasi dan cita-cita yang luhur.

Kelumpuhan Parpol

Sayang, sekarang ini partai politik justru banyak mengalami degradasi dalam hal-hal seperti itu. Dalam bahasa lugasnya, banyak parpol justru mengidap deideologi. Kehilangan integritas pada ideologi. Bisa dikatakan parpol yang berkiphrah di masyarakat nyaris zonder ideologi.

Hal ini berdampak pada kegagalan mengintegrasikan anggota-anggotanya menjadi satu entitas, apalagi meyakini ideologi yang dianut. Akhirnya, parpol bukan membentuk kelompok, tetapi sekadar kerumunan atau parahnya menjelma menjadi sebuah gerombolan politik. Keluar-masuk anggota, terbelah atau anggotanya beramai-ramai keluar lalu mendirikan parpol baru, atau menyeberang ke partai penguasa. Lebih parah, tidak sedikit elit parpol yang terjerat kasus korupsi.

Tidak aneh jika tingkat kepercayaan publik pada parpol terus merosot, utamanya karena kasus korupsi. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia di tahun 2022 menunjukkan

tingkat kepercayaan publik pada partai politik mencapai kurang dari 54 persen.

Partai politik sekarang ini banyak diisi oleh kalangan pragmatis dan oportunis. Hal itu karena parpol tidak mensyaratkan ideologi sebagai asas penyatuan para anggotanya. Parpol menjadi terbuka untuk siapa saja, terutama yang memiliki basis massa, kekuatan modal dan popularitas. Banyak orang bergabung dengan parpol dilandasi kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak terintegrasikan dengan ideologinya.

Akibatnya, parpol sering dikuasai oleh para pemilik modal dan pemilik kantong-kantong massa. Bukannya mewarnai, mereka malah terwarnai oleh ideologi dan kepentingan sebagian anggotanya yang punya daya tawar politik yang tinggi terhadap para pimpinan partai. Parpol pun tersandera berbagai kepentingan yang dibawa oleh anggota-anggotanya. Terseret menjadi pragmatis dan oportunis. Sekalipun itu adalah partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai Islam.

Sulit berharap parpol-parpol seperti itu akan membawa umat menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka menawarkan nilai yang sama hanya dengan kemasan yang berbeda. Dalam Pilkada dan Pilpres, misalnya, parpol-parpol yang semula tampak berseberangan bisa menyatu karena kepentingan yang sama. Kuncinya adalah transaksi politik yang menciptakan beragam negosiasi politik.

Maka dari itu, tidak ada perubahan massif dari parpol-parpol seperti ini. Mereka tidak mengantarkan Islam pada kekuasaan, tetapi sekedar mengantarkan orang beragama Islam ke kursi jabatan. Pragmatisme dan sikap oportunis telah mencegah Islam menjadi sistem yang menyelamatkan umat.

Ironinya, para elit parpol ini justru menyalahkan para pemilih Muslim yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih partai Islam yang menurut mereka menjadi

penyebab partai-partai Islam tidak berkuasa di legislatif ataupun pemerintahan. Padahal, sikap meninggalkan ideologi Islam itu yang sebenarnya menjadi penyebab kegagalan perjuangan politik mereka.

Merekonstruksi Sikap Politik

Saatnya partai politik Islam bersama umat merekonstruksi sikap politik Islam yang sah. Ada dua hal yang mesti dilakukan. *Pertama*: Secara personal setiap Muslim harus memiliki kesadaran politik (*wa'yu as-siyasi*) yang benar. Muhammad Muhammad Ismail dalam bukunya *Al-Fikr al-Islam* menyebutkan ada dua komponen seseorang dikatakan memiliki kesadaran politik: (1) memiliki pandangan universal tidak terbatas pada negeri kaum Muslim tempat ia tinggal saja, tetapi harus secara global; kesadaran politik itu mengharuskan dirinya memiliki arah pandang yang khas (*zawiyah khashshah*) dalam menilai setiap persoalan dan peristiwa politik, dan memiliki kesadaran global.

Keliru besar jika seorang politisi Muslim membatasi pandangannya hanya pada negeri-negeri Muslim, apalagi hanya pada negerinya. Sejak lama hampir tidak ada peristiwa politik yang menentukan nasib dunia Islam melainkan sebagai dampak sikap politik negara-negara Barat dan berdampak pada dunia secara umum.

Penjajahan yang terjadi di tanah air oleh sejumlah negara seperti Portugis, Belanda dan Jepang, juga invasi Inggris, termasuk berbagai perundingan kemerdekaan hingga Konferensi Meja Bundar di Den Haag, adalah bukti bahwa tidak ada satu pun negara di dunia terlepas dari pengaruh negara lain secara global.

Kebijakan *War on Terrorism* yang dicanangkan AS, juga isu radikalisme, adalah strategi global Barat, terutama AS, terhadap Islam dan kaum Muslim. Samuel Huntington lewat bukunya, *Clash of Civilization*, sudah memberikan lampu kuning pada Gedung Putih

akan rivalitas sekaligus ancaman Cina dan Islam terhadap Amerika Serikat.

Perseteruan antara AS dan Cina dalam konflik Laut Cina Selatan, pembentukan aliansi AUKUS, adalah manuver politik negara-negara Barat untuk meluaskan arah politik dan ekonomi mereka ke kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, yang dianggap sebagai daerah pertarungan ekonomi baru yang besar setelah Eropa. Untuk itulah dibentuk kerja sama APEC. Selain juga sebagai langkah membendung pengaruh Cina di kawasan tersebut.

Jika parpol Islam dan kaum Muslim tidak punya kesadaran politik global, mereka akan terperangkap dalam isu-isu lokal yang sebenarnya berasal dari kebijakan asing terhadap sejumlah kawasan di dunia. Mereka tidak akan bisa mengantisipasi dan memberikan perlawanan terhadap manuver politik negara-negara besar.

Selanjutnya, kesadaran politik itu harus dibangun berdasarkan pandangan khas (*zawiyah khashshah*), yakni Islam. Parpol dan umat harus melepaskan sikap pragmatis dan oportunistis; hanya memburu kemaslahatan individual atau komunal/parpol seperti kepentingan ekonomi, atau sekedar memburu kemenangan di Pemilu, Pileg, Pilkada, dsb.

Tidak sedikit politisi Muslim, juga parpol, yang mengikuti arus mainstream opini moderasi beragama sebagai lawan dari radikalisme keagamaan. Hal ini kombinasi ketidakjelian dan ketidakkonsistenan terhadap sudut pandang Islam dalam menilai berbagai isu dan kejadian politik. Mereka malah turut mengkampanyekan arus moderasi keislaman dan keagamaan, sebagaimana mereka juga meyakini demokrasi adalah solusi atas persoalan yang dihadapi umat.

Kedua: Bagi partai politik Islam, satu-satunya perubahan yang dituju adalah menuju Islam dengan metode perjuangan yang juga sesuai Islam. Semestinya tertanam dalam diri

para pelaku politik bahwa akar dari beragam persoalan yang dihadapi umat adalah ketiadaan penerapan Islam secara total. Hal ini mesti mengkristal dalam diri setiap anggota partai Islam dan menjadi agenda dakwah mereka kepada umat. Seruan mereka hanya satu: mengajak umat ke arah perubahan dengan Islam dan menuju Islam.

Di antara faktor penyebab kegagalan partai-partai Islam adalah seruan yang mereka arahkan pada umat itu ambigu. Nyaris tak ada perbedaan dengan seruan parpol-parpol sekuler. Bahkan tertangkap kesan partai Islam justru merasa inferior untuk menyeru umat ke arah Islam. Seruan Islam yang disampaikan sering di-*blend* dengan pemikiran asing seperti Islam moderat, religius-nasionalis, demokrasi Islam, dsb.

Hal ini mengindikasikan terjadinya persoalan besar pemahaman Islam yang diusung kelompok atau partai-partai Islam yang bergerak di tengah umat. Ini bisa disebabkan karena tidak jernihnya pemahaman Islam yang mereka adopsi, tidak ada keseragaman ide dasar yang akan dikembangkan oleh mereka dan terbuka terhadap berbagai pemikiran yang menjadi arus utama di tengah masyarakat. Lalu itu yang mereka jadikan sebagai pijakan dalam perjuangan politik mereka.

Bisa pula karena pemikiran Islam yang ambigu tersebut lahir sebagai sebuah strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari umat. Ada kekhawatiran jika menyuarakan Islam secara terbuka dinilai sebagai sikap frontal yang bisa membuat umat ketakutan lalu meninggalkan mereka. Namun, sikap seperti ini bukannya mencerdaskan umat dan menjernihkan persoalan, malah justru membuat umat kian terpuruk dalam beragam pemikiran asing yang bertentangan dengan Islam itu sendiri.

Itulah sebabnya, Muhammad Ismail dalam bukunya, *Fikr al-Islam*, menyebutkan bahwa ketaatan harus menjadi satu watak, dan

penolakan terhadap suatu perintah adalah perbuatan keji yang menjijikkan dan dibenci. Artinya, partai-partai politik Islam harus berada di garda terdepan dalam menunjukkan loyalitasnya pada Islam dan terdepan pula menolak berbagai sikap penguasa yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Bukan malah membaur dan menerima berbagai perilaku rezim yang merusak umat.

Selain itu, partai politik Islam mestinya tidak menolerir dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki sikap pembelaan terhadap Islam, atau malah menyakiti Islam dan kaum Muslim. Dalam sistem politik demokrasi, sering partai politik Islam mempertimbangkan koalisi dengan parpol-parpol sekuler atau sosialis, untuk memenangkan kursi kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif.

Sistem demokrasi yang mensyaratkan proporsional tertentu menjadi godaan parpol-parpol Islam untuk berkoalisi dengan beragam parpol demi terpenuhinya syarat tersebut. Untuk kepentingan tersebut mereka kadang harus melakukan transaksi politik dengan kelompok lain yang mengusung sekulerisme, misalnya, pro pada kebijakan kapitalisme dan oligarki. Padahal kelompok-kelompok tersebut mau saja berkoalisi dengan parpol Islam bukan karena ideologi keislamannya, tetapi demi kepentingan dan kemaslahatan kelompok mereka sendiri. Sudah berulang terjadi akhirnya umat Muslim hanya menjadi pendorong mobil mogok untuk selanjutnya ditinggalkan, kecuali mereka mau melepaskan identitas keislamannya.

Sejauh ini, tidak pernah ada pertobatan politik dari kelompok dan parpol-parpol Islam tersebut meski berulang dikecewakan. Padahal Nabi saw. mengingatkan:

«لَا يُلَدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

Tidak selayaknya seorang Mukmin dipatuk

ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di tengah krisis partai politik yang terjadi, umat harus merekonstruksi pemikiran politik mereka; membangun loyalitas hanya pada Islam dan memperjuangkan hak-hak kaum Muslim; melepaskan kepentingan pribadi dan kelompok; menjaga kemurnian perjuangan; serta mencetak kader-kader yang berintegritas pada ideologi Islam, bukan pada yang lain.

Kelompok dan partai politik Islam juga jangan mempertimbangkan apakah umat akan meninggalkan atau mendukung mereka. Satu-satunya yang harus jadi fokus adalah memenangkan Islam. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bisa Islam akan menang tanpa dukungan umat? Harusnya yang ditanyakan adalah; bagaimana Allah akan memenangkan parpol Islam dan kaum Muslim jika yang diseru adalah selain Islam, atau mencampuradukkan Islam dengan pemikiran yang batil, atau bersekutu dengan kelompok-kelompok yang tidak punya loyalitas terhadap Islam?

Tugas partai politik Islam adalah membangun kesadaran dan pemahaman Islam yang benar di tengah umat, tanpa mengkamufilasnya dengan lain. Untuk itu diperlukan determinasi yang tinggi dari parpol Islam dan para politisi Islam. Maka dari itu, kesabaran dalam perjuangan menjadi salah satu kunci perjuangan politik Islam. Rasulullah saw. bersabda:

«وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan dan kesulitan itu bersama kemudahan (HR at-Tirmidzi).

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. □

BAGAIMANA CARA NABI SAW DAN SAHABAT BERPOLITIK?

Soal:

Bagaimana cara Nabi saw. dan para Sahabat ra. berpolitik?

Jawab:

Politik adalah aktivitas mengurus urusan umat, sebagaimana dalam Hadis Nabi saw.:

﴿كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْتُمُونَ﴾

Dulu Bani Israil telah diurus oleh para nabi. Ketika seorang nabi telah wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tak ada lagi nabi setelahku. Yang akan ada adalah para khalifah (pengganti Nabi saw.) sehingga jumlahnya banyak (HR Muslim).

Para nabi dan rasul adakalanya diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul saja, yang tugasnya hanya menyampaikan risalah. Allah SWT berfirman:



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

Tidaklah menjadi kewajiban bagi seorang rasul, kecuali menyampaikan [risalah] dengan jelas (QS al-Ankabut [29]: 18).

Namun, ada juga yang diutus oleh Allah, selain menyampaikan risalah, juga untuk menerapkan dan memerintah kaumnya dengan risalah tersebut. Allah SWT berfirman:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾

Wahai Dawud, sungguh engkau Kami jadikan sebagai khalifah (penguasa) di bumi. Karena itu putuskanlah hukum di antara manusia dengan adil dan jangan engkau mengikhti hawa nafsu... (QS Shad [38]: 26).

Nabi Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul terakhir tidak hanya ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Beliau juga menjadi kepala negara yang diperintahkan untuk menerapkan syariat Islam secara *kaaffah* untuk seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

Hendaknya engkau memerintah mereka dengan apa (wahyu) yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikhti hawa nafsu mereka... (QS al-Maidah [5]: 49).

Karena itu baik al-Quran maupun Sunnah Nabi saw. tidak hanya berisi akidah, tetapi juga syariah. Syariahnya pun tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khalik, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya

dan sesamanya. Islam mengatur masalah ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan jihad, dalam konteks vertikal. Islam pun mengatur masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, dalam konteks horisontal. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya, seperti dalam berpakaian, makan, minum dan akhlak.

Hanya saja, ketika Nabi saw. diutus di Makkah, beliau menghadapi realitas masyarakat Jahiliyah, yang pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan di dalam kehidupannya sangat rendah. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan mulia syaria Islam tersebut, Nabi saw. melakukan dakwah. Dakwah yang beliau lakukan adalah dakwah pemikiran dan politik.

Dalam konteks ini, Nabi saw. bisa dianggap sebagai sel pertama dakwah pemikiran dan politik ini. Karena beliau, orang mendapatkan petunjuk langsung dari Allah tentang Islam, sebagai *mabda'*. Setelah itu Nabi saw. mengajak orang terdekatnya, yaitu istri beliau tercinta, Ibunda Khadijah binti Khuwailid ra., untuk mengimani dan mengikuti *mabda'*-nya.¹

Berikutnya, Nabi saw. mengajak Sahabat dekatnya, Abu Bakar as-Shiddiq ra., dan saudara sepupunya, 'Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haritsah ra.² Dari beberapa sel ini terbentuklah *halqah* pertama, yang langsung dibina oleh Nabi saw.

Karena Abu Bakar adalah orang yang sangat dikenal dan mempunyai banyak teman, maka Abu Bakar ra. mengajak mereka untuk memeluk Islam. Lalu 'Abdurrahman bin 'Auf, 'Utsman bin Madh'un, 'Utsman bin 'Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu 'Ubaidah al-Jarrah, Talhah bin 'Ubaidillah, al-Arqam bin Abi al-Arqam, 'Ubaidah bin al-Harits, Sa'id bin Zaid, Khutbab bin al-Art, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Ammar bin Yasir, Shuhaib, dan lain-lain masuk Islam.³

Mereka ini kemudian menjadi *halqah* berikutnya. Terus begitu, hingga menjadi beberapa *halqah*. Secara intensif mereka ini dibina oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi saw. untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Mereka pun dikumpulkan oleh Nabi saw. di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam, dan dibina secara kolektif. Di sana mereka melakukan *qiyaamul-layl* bersama. Dari sejumlah *halqah* ini terbentuklah *kutlah* (jamaah dakwah)

Setelah dibina selama tiga tahun secara intensif dan kolektif oleh Nabi saw., juga setelah terbentuk kepribadian Islam mereka, yang tercermin pada *'aqliyyah* dan *nafsiyyah* mereka, maka Allah memerintahkan mereka untuk melakukan dakwah secara terbuka. Itu setelah pemikiran dan pengaruh dakwah mulai dirasakan oleh masyarakat di Makkah. Saat itu mulai muncul pertanyaan, siapa yang mengemban dakwah ini? Siapa pemimpinnya? Siapa saja anggotanya?

Setelah Hamzah bin Abdul Muthallib dan 'Umar bin al-Khatthab masuk Islam, Allah memerintahkan Nabi saw. dan para Sahabat untuk mendemonstrasikan kelompok yang mengemban pemikiran baru ini:

﴿فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu), dan berpalinglah dari orang yang Musyrik (QS al-Hijr [15]: 94).

Setelah itu Nabi saw. pun melakukan unjuk diri, dengan cara tawaf mengelilingi Ka'bah dalam dua barisan, yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh kaum musyrik Arab. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah. Satu lagi dipimpin oleh 'Umar bin al-Khatthab. Ini merupakan fase baru dalam aktivitas pemikiran dan politik yang dilakukan oleh kelompok ini. Aktivitas memperkenalkan *kutlah*, yang

kemudian menjadi partai politik, kepada publik. Aktivitas ini disebut sebagai *Tafaa'ul Tamm* (interaksi dengan masyarakat secara sempurna).⁴

Mereka telah menjelma menjadi *Hizbullaah*, atau *Hizb ar-Rasuul*. Partai ini merupakan partai ideologis, bukan partai pragmatis, apalagi oportunistik. Ini tampak pada 46 surat Makkiah, yang diturunkan sebelum turunnya QS al-Hijr ayat 94 di atas. Semua berisi pertarungan pemikiran (*as-Shiraa' al-Fikr*), perjuangan politik (*al-Kifaah as-Siyaasi*) dan pertarungan melawan para penguasa Makkah saat itu. Karena itu bisa dipahami bahwa QS al-Hijr ayat 94 ini memerintahkan kepada Nabi saw. untuk mendemonstrasikan *kutlah*, bukan sekadar transisi dakwah, dari fase sembunyi-sembunyi ke fase terang-terangan.

Ketika itu *Hizb ar-Rasuul* ini benar-benar telah sempurna. Ia menjadi kawah *condrodimuko* (*Butaqah*), yang digunakan oleh Nabi saw. dan para Sahabat melebur pemikiran dan perasaan masyarakat Jahiliyah yang rendah, rusak dan kotor saat itu sehingga menjadi pemikiran dan perasaan Islam, yang tinggi, bagus dan bersih. Konsekuensi dari aktivitas peleburan ini, terjadilah gesekan pemikiran dan perasaan yang luar biasa, antara Hizb ini dengan masyarakat. Pasalnya, karena Hizb, sebagai *Butaqah* itu mengharuskan dua aktivitas secara simultan, yaitu rekrutmen dan pembentukan kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat. An-Nadawi, mengutip dari Ibn Hisyam, menyatakan: "Orang-orang pun masuk Islam beramai-ramai, terdiri kaum pria dan wanita, sehingga nama Islam tersebar di Makkah, dan menjadi buah bibir."⁵

Adapun aktivitas peleburan (*'amaliyyah shahriyyah*) yang dilakukan oleh Hizb di tengah umat ketika itu dilakukan dengan menyatukan berbagai pemikiran, pandangan dan keyakinan yang ada di tengah masyarakat secara kolektif,

jika tidak bisa dilakukan secara konsensus. Aktivitas peleburan inilah yang menyebabkan terjadinya gesekan Hizb ini dengan masyarakat meningkat hingga membawa konsekuensi pada terjadinya penganiayaan, penangkapan, aleniasi dan sebagainya. Itulah fase yang dialami oleh Nabi saw. dan para Sahabat, setelah tahun ketiga Kenabian, hingga beliau hijrah ke Madinah.

Hijrah Nabi saw. ke Madinah bukan untuk melarikan diri, tetapi justru untuk menerapkan Islam secara *kaaffah* dalam seluruh aspek kehidupan dalam institusi negara. Pendirian Negara Islam sebagai metode baku dalam menerapkan Islam secara *kaaffah* merupakan cita-cita Nabi sejak awal. Ini sebagaimana tampak dalam pidato Nabi saw.:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْيَدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ »

*Wahai sekalian manusia, seorang pemimpin tidak akan pernah membohongi rakyatnya.*⁶

Dalam riwayat lain, Nabi saw. menyatakan:

« كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُوهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ، (وفي رواية: يَا عَمَّ إِنِّي أُرِيدُهُمْ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُوهَا، تَدِينُ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجَزِيَّةَ) »

Satu kata, yang jika kalian berikan, maka dengan itu kalian akan menguasai bangsa Arab, dan orang non-Arab akan tunduk kepada kalian." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Pamanku, sungguh yang aku inginkan dari mereka adalah satu kata, yang kalau mereka nyatakan, maka dengan itu bangsa Arab akan tunduk, dan orang non-Arab pun akan membayar jizyah kepada mereka."⁷

Dua riwayat yang berbeda di atas jelas mengisyaratkan bahwa Nabi saw.

menginginkan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dibangun di atas kalimat Tauhid, akidah Islam. Karena itu ketika Nabi saw. mendapatkan Baiat 'Aqabah II, maka baiat ini merupakan akad untuk memberikan perlindungan dan kekuasaan kepada beliau sehingga beliau bisa menerapkan Islam secara *kaaffah* di Madinah.

Semuanya ini merupakan aktivitas politik Nabi saw. dan para Sahabat hingga berdiri Negara Islam yang pertama di Madinah. Aktivitas ini berhasil dilakukan oleh Nabi saw. dan para Sahabat dengan mengintegrasikan dua aktivitas, yaitu pemikiran dan politik.

Karena itu Negara Islam yang berdiri di Madinah ini dibangun berdasarkan pemikiran yang diterima dan diyakini oleh rakyatnya. Bukan pemikiran asing yang dipaksakan kepada mereka. Karena itu sebelum Baiat Aqabah II, dan sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah, beliau mengutus Mush'ab bin 'Umair untuk membina penduduk Yatsrib, sebelum namanya menjadi Madinah, hingga mereka memeluk Islam. Setelah itu, pemikiran dan perasaan mereka pun berubah menjadi pemikiran dan perasaan Islam. Karena itu ketika mereka memberikan baiat kepada Nabi saw., dan menjadikan beliau sebagai penguasa mereka, mereka sadar apa yang harus melakukan lakukan.

Inilah proses politik dan aktivitas politik yang dilakukan Nabi saw. dan para Sahabat sehingga Islam berhasil diterapkan secara *kaaffah*. Akhirnya, Islam mampu mengubah bangsa Arab yang terbelakang dan tidak mempunyai sejarah menjadi bangsa yang maju, berperadaban dan menorehkan sejarah luar biasa. Persis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi saw. sebelumnya, bahwa dengan kalimat Tauhid, mereka akhirnya menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan mereka. Mereka bangkit menjadi bangsa yang maju

Akhirnya, Islam mampu mengubah bangsa Arab yang terbelakang dan tidak mempunyai sejarah menjadi bangsa yang maju, berperadaban dan menorehkan sejarah luar biasa. Persis sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi saw. sebelumnya, bahwa dengan kalimat Tauhid, mereka akhirnya menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Semuanya tunduk di bawah kekuasaan mereka. Mereka bangkit menjadi bangsa yang maju dengan perdaban emasnya. Memimpin dunia selama 14 abad, yang memerintah 2/3 dunia wilayah dunia, di tiga benua.

dengan perdaban emasnya. Memimpin dunia selama 14 abad, yang memerintah 2/3 dunia wilayah dunia, di tiga benua.

Wallahu a'lam. □

Catatan kaki:

- ¹ Q.s. As-Syu'ara': 214
- ² Lihat, Al-'Allamah Abu al-Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadawi, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, Cet. Ke-8, 1441 H/2020 M, h. 183; Ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Juz I/h. 245.
- ³ Lihat, Al-'Allamah Abu al-Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadawi, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, Cet. Ke-8, 1441 H/2020 M, h. 184; Ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Juz I/h. 250-255.
- ⁴ Lihat, Abu Nu'aim, *Hilyatu al-Auliya'*, Juz I/h. 40; Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah*, Juz II/h. 512; Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari: Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz VII/h. 59;
- ⁵ Lihat, Al-'Allamah Abu al-Hasan 'Ali al-Hasani an-Nadawi, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, Cet. Ke-8, 1441 H/2020 M, h. 184; Ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah*, Juz I/h. 299.
- ⁶ Lihat, Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi at-Tarikh*, Juz I/h. 487.
- ⁷ Lihat, At-Thabari, *Tafsir al-Qur'an*, Juz XXIII/h. 79; al-'Allamah Yusuf al-Kandahlawi, *al-Muntakhab min Hayat as-Shahabat*, h. 31-32.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK ISLAM

Najmah Saiidah

Perbincangan tentang suara perempuan kembali bergulir, seiring bergulirnya waktu mendekati tahun politik 2024. Topik yang selalu hangat untuk dibahas, tetapi tidak kunjung ada solusi dalam sistem demokrasi kapitalis, yaitu tentang keterwakilan perempuan atau representasi perempuan dalam bidang politik. Beberapa kalangan, apalagi pengusung kesetaran gender, selalu mempermasalahkan hal ini. Kali ini yang disorot berkaitan dengan kebijakan publik yang sering tidak berpihak kepada rakyat, terutama perempuan.

Berdasarkan pandangan ini, para aktivis perempuan menjadikan isu sentral perjuangan politik perempuan terfokus pada tiga hal, yakni seputar masalah kepemimpinan perempuan dalam kekuasaan, tuntutan kuota perempuan di parlemen, dan tuntutan independensi hak suara perempuan dalam pemilu. Tiga isu tersebut dianggap sangat strategis. Dalam logika mereka, besarnya akses ke dalam

lingkaran kekuasaan dan legislasi inilah yang akan menjadi jalan bagi munculnya perubahan stuktur masyarakat ke arah yang lebih *equal* dan *egaliter*. Dengan itu aspirasi perempuan dipastikan akan senantiasa mewarnai setiap kebijakan publik yang diterapkan. Dengan itu pula persoalan krusial yang dihadapi perempuan akan secara otomatis terselesaikan.

Perempuan memang memiliki peran dalam menyelamatkan masyarakat dari kehancuran dan keterpurukan. Hanya saja, apakah benar ketika saat ini banyak kebijakan tidak pro rakyat, permasalahan perempuan tidak terselesaikan, semata karena perempuan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan?

Faktanya, negeri ini pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Aakah kebijakannya pro rakyat dan permasalahan perempuan terselesaikan? Faktanya tidaklah demikian. Ini artinya, akar masalahnya bukan pada aspek ini, tetapi lebih pada sistem apa yang diterapkan.

Perempuan Wajib Berpolitik

Islam memandang perempuan sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam politik. Mereka juga sama-sama wajib mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka dan masyarakat secara umum. Hanya saja, politik dalam konsep Islam tidak dibatasi pada masalah kekuasaan dan legislasi semata, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh urusan umat di dalam negeri maupun luar negeri, baik menyangkut aspek negara maupun umat.

Negara bertindak secara langsung mengatur dan memelihara urusan umat. Umat bertindak sebagai pengawas dan pengoreksi pelaksanaan pengaturan oleh negara. Ketika kaum Muslim berupaya memfungsikan segenap potensi insaniahnya untuk menyelesaikan permasalahan umat, pada dasarnya dia sudah melakukan aktivitas politik.

Kewajiban berpolitik didasarkan antara lain pada firman Allah SWT:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan (Islam) serta melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Rasulullah saw., sebagaimana dituturkan Hudzayfah ra. juga bersabda: “*Siapa saja yang tidak memperhatikan kepentingan kaum Muslim, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka. Siapa saja yang tidak berada pada waktu pagi dan petang selaku pemberi nasihat bagi Allah dan Rasulnya, bagi Kitab-Nya, bagi pemimpinnya dan bagi umumnya kaum*

Muslim, berarti ia bukanlah termasuk di antara mereka.” (HR ath-Thabarani).

Kedua nas ini menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintah kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperhatikan atau memikirkan urusan umatnya, termasuk memperjuangkan agar upaya pemeliharaan urusan umat terlaksana. Dengan demikian politik merupakan bagian yang *inhern* dari ajaran Islam. Di sisi lain, kata *man* dan *ummah* menunjukkan bahwa perintah tersebut berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan. Lalu bagaimana Islam mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam politik?

Tuntunan Islam

Sejak Rasulullah saw. diutus menyebarkan risalah Islam, para Muslimah generasi awal telah terlibat secara aktif dalam pergerakan dakwah bersama kaum Muslim lainnya untuk melakukan transformasi sosial, mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam, hingga terwujud masyarakat Islam di Madinah. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan para khalifah sesudahnya, peran Muslimah dalam kancah kehidupan—termasuk dalam politik—juga demikian besar, baik dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar, mengoreksi penguasa, bahkan dalam aktivitas jihad.

Istimewanya, pada saat yang sama, mereka pun mampu melaksanakan peran utamanya sebagai *umm[un] wa rabbatul bayt* (ibu dan pengelola rumah suaminya), berhasil mencetak generasi terbaik—generasi mujahid dan mujtahid—yang mampu membangun peradaban Islam yang tinggi dan cemerlang. Mereka adalah generasi yang lahir dari ibu-ibu yang paham Islam, yang mengajarkan Islam *kaaffah* kepada anak-anaknya, sekaligus memahamkan kepada mereka Islam sebagai *mabda'* (ideologi) yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tak aneh jika umat Islam pada rentang tersebut tampil sebagai *khayru*

ummah (umat terbaik).

Ada Khadijah binti Khuwalid ra. Ia senantiasa mendampingi dan mengobarkan semangat perjuangan Rasulullah saw. Ada Summayah binti Khubath, seorang syahidah pertama. Ada Asma binti Abu Bakar. Ia yang memuluskan jalan bagi Rasulullah dan ayahnya berhijrah ke Madinah. Ada Asma binti Yazid, orator ulung yang menjadi wakil para perempuan dalam majelis syura. Ada Khaulah binti Malik bin Tsalabah yang tidak segan-segan mengoreksi Amirul Mukminin Umar bin Khaththab. Mereka adalah di antara kaum perempuan yang mempunyai posisi strategis dalam peran politik.

Tampak jelas, demikian sempurnanya Islam mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam politik. Islam sangat menjaga kemuliaan dan ketinggian martabat perempuan. Oleh karena itu syariah Islam telah memberikan batasan dengan jelas tentang aktivitas politik perempuan sebagai berikut:

1. *Kewajiban membina anak-anaknya dan kaum perempuan.*

Seorang perempuan memiliki tanggung jawab utama sebagai *umm[un] wa Rabbah al-bait* (ibu dan pengelola rumah suaminya). Peran ibu merupakan peran politik yang sangat strategis. Jika ia melaksanakan perannya ini dengan baik, akan lahir generasi berkualitas prima yang akan menjadi para pejuang Islam.

Ia pun memiliki tanggung jawab untuk membina Muslimah lainnya sebagai pemenuhan peran publiknya. Membina Muslimah merupakan salah satu aktivitas dakwah.

2. *Wajib melakukan amar makruf nahi munkar.*

Aktivitas ini merupakan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan. Nas-nas yang berkaitan dengan masalah ini bersifat umum,

berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalilnya telah sangat tegas (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104; QS at-Taubah [9]: 71).

3. *Kewajiban menasihati dan mengoreksi penguasa.*

Jika penguasa menetapkan suatu aturan yang melanggar hukum syariah atau ada kebutuhan rakyat yang luput dari penguasa, maka wajib bagi setiap Muslim—termasuk Muslimah—untuk menasihati penguasa agar ia dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Pernah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., seorang perempuan, Khaulah binti Hakim bin Tsalabah, memprotes kebijakan Khalifah Umar yang menetapkan jumlah mahar tertentu bagi perempuan karena tingginya mahar yang diminta kaum perempuan pada waktu itu. Kemudian Khalifah Umar menyadari kekeliruannya dan segera mencabut keputusannya. Ia berkata, "*Perempuan ini benar dan Umar salah.*"

4. *Hak dan kewajiban baiat.*

Dalam Islam, sahnya pengangkatan seorang khalifah itu adalah dengan baiat. Islam memberikan hak dan kewajiban untuk melakukan baiat khalifah kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Ummu Athiyah berkata, "*Kami berbaiat kepada Rasulullah saw. Lalu beliau membacakan kepada kami agar jangan menyekutukan Allah dengan apapun dan melarang kami untuk niyaaahah (meratapi mayat)...*" (HR al-Bukhari).

5. *Hak memilih dan dipilih menjadi anggota Majelis Umat.*

Majelis Umat adalah struktur Negara Khilafah yang merupakan wakil rakyat. Majelis ini bertugas memberikan nasihat dan pendapat kepada Khalifah. Majelis ini juga bertugas mengoreksi dan menasihati penguasa jika cara

pemenuhan yang ditetapkan oleh Khalifah bertentangan dengan syariah. Ibnu Hisyam dari Kaab bin Malik menyebutkan bahwa setelah 73 laki-laki dan 2 perempuan (Nasibah binti Kaab dan Asma binti Amr bin Adi) melakukan Baiat Aqabah 2, Rasul saw. Bersabda, *“Datangkanlah 12 wakil dari kalian yang pada mereka ada tanggung jawab atas kabilahnya masing-masing.”* (HR Ahmad).

6. Kewajiban menjadi anggota partai politik.

Keberadaan partai politik merupakan pemenuhan kewajiban dari Allah SWT (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104). Partai politik ada untuk menjaga agar semua hukum-hukum Allah tetap diterapkan secara keseluruhan oleh manusia dalam kehidupannya sepanjang masa. Keberadaannya wajib bagi kaum Muslim, baik di dunia ini diterapkan sistem Islam atau tidak. Hanya saja perbedaannya adalah jika ada sistem Islam, kewajiban untuk beraktivitas di dalamnya adalah fardhu kifayah.

7. Haram perempuan menduduki posisi kekuasaan.

Yang dimaksud wilayah kekuasaan/pemerintahan adalah wilayah pengaturan urusan umat yang dilakukan secara langsung dan menyeluruh, misalnya menjadi penguasa atau kepala Negara. Penguasa dipandang sebagai orang yang bertanggungjawab penuh secara langsung mengurus urusan umat. Dalam sistem Islam, jabatan penguasa mencakup khalifah (kepala Negara), *mu'awwin tafwiidh* (pembantu khalifah dalam urusan pemerintahan), wali (kepala wilayah) dan amil (kepala daerah). Rasulullah saw telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah ra.:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kekuasaan)-nya

Keberadaan partai politik merupakan pemenuhan kewajiban dari Allah SWT (Lihat: QS Ali Imran [3]: 104). Partai politik ada untuk menjaga agar semua hukum-hukum Allah tetap diterapkan secara keseluruhan oleh manusia dalam kehidupannya sepanjang masa. Keberadaannya wajib bagi kaum Muslim, baik di dunia ini diterapkan sistem Islam atau tidak. Hanya saja perbedaannya adalah jika ada sistem Islam, kewajiban untuk beraktivitas di dalamnya adalah fardhu kifayah.

kepada seorang perempuan (HR al-Bukhari).

Hadis ini turun berkaitan dengan peristiwa diangkatnya seorang perempuan di Persia, Buran binti Kisra, menggantikan ayahnya sebagai raja. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, beliau menyampaikan hadis ini. Hadis ini, sekalipun bentuknya *ikhbaar* (berita), tetap mengandung makna larangan, yakni larangan untuk memberikan kekuasaan kepada perempuan. Di dalamnya ada bentuk kalimat tuntutan (*shighat ath-thalab*), juga adanya *“dzamm”* (celaan) berupa *“lan yufliha”* (tidak akan pernah beruntung) sebagai *qariinah* bahwa larangan tersebut larangan yang tegas (*an-nahyu al-jaazim*) atau pasti. Dengan demikian haram bagi wanita menjabat sebagai *hukkam* (penguasa).

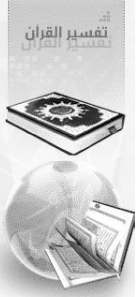
WallLaahu a'lam bi ash-shawaab. □



RUBRIK TAFSIR

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



BERITA TENTANG JIN (5)

(Tafsir QS al-Jin [72]:1-5)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدًّا رَبَّنَا مَا
اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَفُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا
ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Quran yang kubaca)." Lalu mereka berkata, "Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang menakutkan, yang memberikan petunjuk pada kebenaran, sehingga kami pun mengimaninya dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Sungguh Mahatinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak. Sungguh orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. Sungguh kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah."

(QS al-Jin [72]: 1-5).

Beberapa Pelajaran Penting

Pertama: Keimanan terhadap keberadaan jin. Jin termasuk makhluk gaib yang tidak terjangkau oleh indera. Pengetahuan dan keyakinan terhadap adanya makhluk tersebut semata didasarkan pada dalil *naqli* yang bersifat *qath'i*. Di antara dalil *naqli* yang memberitakan keberadaannya adalah ayat ini.

Sebagaimana diterangkan di muka, Rasulullah saw. juga tidak melihat mereka saat mereka hadir dan mendengarkan al-Quran yang

beliau bacakan. Karena itu ketika al-Quran memberitakan peristiwa tersebut, kita wajib meyakinkannya, tanpa keraguan dan kebimbangan sedikit pun.

Selain ayat ini, cukup banyak ayat yang memberitakan keberadaan makhluk tersebut (Lihat: QS al-Hijr [15]: 27; QS al-Rahman [55]: 15; QS al-Dzariyat [51]: 56; dll).

Masih banyak lagi ayat dan hadis mengabarkan keberadaan jin. Semua itu menunjukkan secara pasti keberadaan makhluk

jin. Karena didasarkan pada dalil yang *qath'i*, baik *tsubûl* maupun *dalâlah*-nya, maka hal ini menghasilkan keyakinan, wajib diimani, dan tidak boleh diingkari. Mengingkari keberadaannya sama hanya dengan mengingkari sejumlah ayat al-Quran. Ibnu Taimiyah berkata:

وُجُودُ الْجِنَّ ثَابِتٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَاتِّفَاقِ
سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَثْمَتِهَا

Keberadaan jin ditetapkan dalam Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan salaf al-ummah dan para imam mereka.¹

Ibnu Hazm berkata:

فَمَنْ أَنْكَرَ الْجِنَّ أَوْ تَأَوَّلَ فِيهِمْ تَأْوِيلًا يُخْرِجُهُمْ بِهِ
عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ فَهُوَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ حَلَالُ الدَّمِ
وَالْمَالِ

Siapa saja yang mengingkari keberadaan jin atau mentakwilkan mereka dengan takwil yang mengeluarkan dari makna zhahir ini, maka dia kafir, musyrik, serta halal darah dan hartanya.²

Kedua: Keagungan al-Quran. Sebagaimana diberitakan dalam ayat ini, sekelompok jin yang mendengarkan al-Quran itu mengatakan *Qur'ân[an]* '*ajab[an]*' (Quran yang sangat menakjubkan). Mereka juga menyebut al-Quran memberikan petunjuk pada kebenaran.

Al-Quran yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah saw. adalah kitab sekaligus mukjizat. Menurut Abdurrahman as-Sa'di, mukjizat adalah sesuatu yang diberikan Allah SWT kepada para rasul dan nabi berupa kejadian-kejadian luar biasa yang menantang manusia, menguji mereka dan mengabarkan tentang Allah SWT. Tujuannya untuk membenarkan apa yang telah Allah utus untuk menguatkan para rasul dan nabi, seperti

terbelahnya bulan dan turunnya al-Quran. Sungguh al-Quran adalah mukjizat terbesar dibandingkan dengan mukjizat para rasul secara mutlak.³

Patut dicatat, ketika Allah SWT mengutus seorang nabi dan rasul, Dia menguatkannya dengan mukjizat. Mukjizat tersebut menjadi bukti kenabian dan kerasulannya. Dengan mukjizat itu, utusan Allah SWT menantang orang-orang yang mengingkarinya dan membuat mereka lemah untuk mendatangkan hal serupa dengannya.⁴

Ini pula yang terjadi pada al-Quran. Al-Quran menyampaikan tantangan kepada semua manusia dan para jin untuk membuat semisal al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِئُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

Katakanlah, "Sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan itu sekalipun mereka saling membantu satu sama lain (QS al-Isra` [17]: 88).

Tantangan itu ditujukan kepada seluruh manusia dan jin untuk membuat yang serupa dengan al-Quran. Faktanya, tidak ada satu pun yang bisa memenuhi tantangan tersebut, meskipun seandainya semua bersatu dan saling bantu untuk itu.

Ibnu Katsir berkata: "Allah SWT mengabarkan bahwa seandainya manusia dan jin seluruhnya bersepakat untuk membuat semisal apa yang diturunkan kepada Rasulullah, mereka tidak akan bisa dan tidak mampu, walaupun mereka saling menolong dan membantu. Perkara ini tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana mungkin perkataan makhluk bisa menyerupai perkataan Pencipta

yang tidak ada semisalnya, yang mirip dan yang sebanding.”⁵

Dalam ayat lain dinyatakan tantangan yang lebih ringan, yaitu mendatangkan sepuluh surat saja (Lihat: QS Hud [11]: 13). Bahkan kemudian tantangan diturunkan hanya mendatangkan satu surat saja semisalnya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 23).

Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi tantangan tersebut. Allah SWT memastikan tidak akan pernah ada yang bisa melakukannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 23-24).

Itu semua menunjukkan kemukjizatan al-Quran. Maka dari itu, orang yang mendengarkan al-Quran, yang mau bersikap objektif dan berhati tulus, akan mengimani bahwa kitab tersebut berasal dari Allah SWT.

Sikap itulah yang dilakukan oleh sekelompok jin yang mendengarkan al-Quran tersebut. Setelah mendengarkan beberapa ayat al-Quran, mereka segera mengimaninya. Mereka membenarkan dan meyakini bahwa al-Quran dari Allah SWT. Mereka juga segera meninggalkan kekufuran dan kemusyrikan mereka. Mereka tidak lagi menyekutukan Allah SWT dengan sesembahan lain yang merupakan ciptaan-Nya. Lebih dari itu, mereka pun mendakwahkan kepada kawan-kawan mereka sesama jin. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لَكُمَا قُضِيًّا وَلَوْأَنَّ إِلَى
قَوْمِهِمْ مُّنذِرِينَ﴾

(Ingatlah) ketika Kami menghadapkan serombongan jin kepada kamu yang mendengarkan al-Quran. Lalu tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya), mereka berkata, “Diamlah kalian (untuk mendengarkan bacaannya)!” Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan (QS al-Ahqaf [46]: 29).

Ketiga: Perkara paling agung yang didakwahkan Rasulullah saw. Dalam ayat ini diberitakan bahwa respon pertama para jin setelah mendengarkan al-Quran adalah menyatakan keimanannya dan melepaskan diri dari syirik. Ini menunjukkan pentingnya masalah tersebut.

Menjelaskan ayat ini, Wahbah al-Zuhaili berkata, “Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa perkara paling agung dari dakwah Nabi Muhammad saw. adalah mentauhidkan Allah SWT dan melepaskan syirik dan penganutnya.”⁶

Demikian agung dan pentingnya, aqidah merupakan perkara yang harus didakwahkan pertama kali. Ketika Rasulullah saw. mengutus Muadz bin Jabal ra. ke Yaman, beliau bersabda:

«إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ
أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى»

Sungguh engkau akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Karena itu hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah (HR al-Bukhari).

Bukan hanya didakwahkan oleh Rasulullah saw., tauhid juga didakwahkan oleh semua nabi dan rasul, tanpa terkecuali (Lihat: QS al-Anbiya [21]: 25; QS al-Nahl [16]: 36).

Keempat: Celaan keras terhadap syirik dan pelakunya. Dalam ayat ini disebutkan, anggapan bahwa Allah SWT memiliki istri dan anak sebagai « شَطَطًا » (melampaui batas, jauh dari kebenaran). Disebut juga sebagai « كَذِبًا » (kedustaan). Pelakunya dinyatakan sebagai « السَّفِيهَ » (orang bodoh, kurang akal). Semua itu merupakan celaan keras terhadap syirik dan pelakunya.

Perbuatan menyekutukan Allah SWT merupakan dosa paling besar. Demikian

besarnya hingga Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan-Nya. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾

﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan-Nya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar (QS an-Nisa' [4]: 48).

Selain tidak diampuni, syirik juga menghapus segala kebaikan. Allah SWT berfirman:

﴿ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Itulah petunjuk Allah, yang dengan itu Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Andai mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan (QS al-An'am [6]: 88).

Kepada pelaku syirik Allah SWT mengharamkan surga. Allah SWT berfirman:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sungguh Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian." Sungguh orang yang mempersekutukan Allah, pasti Allah mengharamkan atas dirinya surga, dan

Dalam ayat ini disebutkan, anggapan bahwa Allah SWT memiliki istri dan anak sebagai « شَطَطًا » (melampaui batas, jauh dari kebenaran). Disebut juga sebagai « كَذِبًا » (kedustaan). Pelakunya dinyatakan sebagai « السُّفِيَه » (orang bodoh, kurang akal). Semua itu merupakan celaan keras terhadap syirik dan pelakunya.

Perbuatan menyekutukan Allah SWT merupakan dosa paling besar. Demikian besarnya hingga Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik atau menyekutukan-Nya.

tempatnyalah ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun (QS al-Maidah [5]: 72).

Semua itu menunjukkan betapa agungnya perkara keimanan sekaligus menunjukkan betapa besarnya dosa syirik atau menyekutukan Allah SWT.

WalLâh a 'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Ibnu Taimiyyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, vol. 24 (tt: Dar Majid 'Asiri, tt), 276
- 2 Ibnu Hazm, *al-Fadhî fi al-Milal*, vol. 5 (Kairo: Maktabah al-Khatiji, tt), 9
- 3 Abdurrahman al-Sa'di, *al-Tanbîhât al-Lathîfah* (Riyadh: Dar Thayyibah, 1994), 107
- 4 Lihat Taqiuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 128-129
- 5 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 5, 117
- 6 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 29, 161

ATURAN KEPEGAWAIAN (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 154)

7 *Telaah Kitab* edisi kali ini membahas tentang kepegawaian dan hal-hal yang berhubungan dengan pengupahan. Di dalam Pasal 154 disebutkan:

الْمُوظَّفُونَ عِنْدَ الْأَفْرَادِ وَالشَّرَكَاتِ كَالْمُوظَّفِينَ
عِنْدَ الدَّوْلَةِ فِي جَمِيعِ الْمُخْفُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَكُلُّ مَنْ
يَعْمَلُ بِأَجْرٍ هُوَ مُوظَّفٌ مَهْمَا اِخْتَلَفَ نَوْعُ الْعَمَلِ
أَوْ الْعَامِلِ. وَإِذَا اِخْتَلَفَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ عَلَى
الْأَجْرَةِ يُحْكَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ. أَمَّا إِذَا اِخْتَلَفُوا عَلَى
غَيْرِهَا فَيُحْكَمُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى حَسَبِ أَحْكَامِ
الشَّرْعِ

Pegawai yang bekerja pada seseorang atau perusahaan, kedudukannya sama seperti pegawai pemerintah dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Setiap orang yang bekerja dengan mendapatkan upah merupakan pegawai meskipun berbeda jenis pekerjaan atau pihak yang bekerja. Jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pihak yang mempekerjakan mengenai upah maka ditetapkan berdasarkan upah mitsli (upah yang sesuai dengan standar kebiasaan masyarakat). Jika perselisihannya bukan menyangkut upah maka diputuskan berdasarkan akad kerja sesuai dengan hukum-hukum syariah.

Pegawai yang bekerja pada individu atau perusahaan sama seperti pegawai yang bekerja

pada negara dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Setiap orang yang bekerja dengan mendapatkan kompensasi atau upah merupakan pegawai, apa pun jenis pekerjaan dan pekerjaannya.

Jika pekerja dengan pihak yang mempekerjakan berselisih pendapat dalam hal upah maka kadar upah ditetapkan berdasarkan *ajr al-mitsl* (kadar upah yang ditetapkan oleh orang yang ahli). Namun, jika keduanya berselisih pada selain upah maka persengketaan itu dikembalikan pada akad *ijarah* sesuai dengan hukum syariah.

Dalil yang mendasari pasal ini adalah dalil-dalil tentang bekerja (*ijarah*). Sebabnya, pegawai hakikatnya adalah pekerja (*ajiri*). Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kalian untuk kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS ath-Thalaaq [65]: 6).

Juga didasarkan pada sebuah Hadis Nabi saw.:

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي ثَمٍّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ»



Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., bersabda: *Allah SWT telah berfirman: "Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya); dan seseorang yang mempekerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun dia tidak memberikan upahnya."* (HR al-Bukhari).

Jika tidak ada upah tertentu maka akad *ijaarah*-nya dianggap sah. Hanya saja, jika terjadi perselisihan pendapat dalam hal besaran upah maka hal itu dikembalikan pada *ajr al-mitsl*. Oleh karena itu, jika di dalam akad *ijaarah* tidak disebutkan upah saat dilaksanakan akad *ijaarah*, atau pekerja dan yang mempekerjakan berselisih pendapat dalam besaran upah, maka hal itu dikembalikan pada *ajr al-mitsl*. Ketentuan ini dikiaskan dengan mahar. Dalam kasus mahar, jika tidak disebutkan besarnya atau terjadi perselisihan dalam kadar mahar, maka ia dikembalikan kepada mahar *mitsl*. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat berikut:

عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نساءها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت»، ففرح بها ابن مسعود

Dari Ibnu Mas'ud ra. dituturkan bahwa ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, namun tidak menetapkan maharnya, dan tidak menyertubuhi dirinya hingga laki-laki itu

meninggal dunia. Ibnu Mas'ud ra. berkata, "Ia berhak mendapatkan mahar seperti yang didapatkan para wanita kaumnya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Ia wajib ber'iddah (karena ditinggal mati suaminya), dan ia juga berhak mendapatkan warisan." Lalu berdirilah Ma'qil bin Sinan al-Asyja'iy, seraya berkata, "Rasulullah saw. memutuskan pada Barwa` binti Wasyiq seperti apa yang engkau putuskan." Ibnu Mas'ud sangat senang dengan hal itu. (HR an-Nasai dan at-Tirmidzi).

Makna dari frase [*shaadaq nisa'ihaa*] adalah seperti mahar yang biasa diberikan kepada wanita-wanita dari kaumnya.

Syariah telah mewajibkan mahar *mitsli* bagi orang yang tidak menyebut kadar maharnya. Begitu pula jika terjadi perselisihan dalam jumlah mahar *musamma* (mahar yang disebutkan besarnya), maka besarnya dikembalikan pada mahar *mitsli*. Semampang mahar adalah kompensasi wajib atas akad pernikahan, maka bisa dikiaskan padanya setiap kompensasi wajib atas sebuah akad, tanpa memperhatikan lagi ganti kompensasinya, apakah harta (seperti dalam akad jual-beli) atau manfaat dan tenaga (seperti dalam akad bekerja), atau kerelaan (seperti dalam akad nikah).

Atas dasar itu, ketika upah atau kompensasi tidak disebutkan di dalam akad, atau ketika terjadi perselisihan atas besaran upah, maka ia dikembalikan pada upah *mitsli*. Begitu pula dalam jual-beli, jika tidak disebutkan nilainya, atau terjadi perselisihan atas nilainya, maka ia dikembalikan pada harga *mitsli*. Begitu pula dalam hal upah. Jika, upah tidak disebutkan di dalam akad *ijaarah* (bekerja), atau terjadi perselisihan besaran upah antara pekerja dengan orang yang mempekerjakannya, maka ia dikembalikan pada upah *mitsli*.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. [Gus Syams]

SELURUH RAKYAT BERHAK MEMANFAATKAN MILIK UMUM

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى
التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا
لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ

“... Kemudian serulah mereka pada Islam. Jika mereka menyambut seruanmu maka terimalah dari mereka dan berhentilah dari (memerangi) mereka. Serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin. Beritahukanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan hal itu maka mereka memiliki hak seperti hak kaum Muhajirin dan memiliki kewajiban seperti kewajiban kaum Muhajirin.” (HR Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasai, asy-Syafi’iy, Abu Yusuf dan Ibnu Zanzawayh).

Hadis ini diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, yakni Buraidah bahwa Rasulullah saw. pernah berpesan kepada pasukan yang diberangkatkan untuk berjihad melawan kaum kafir. Buraidah berkata: Rasulullah saw., jika mengangkat amir atas pasukan atau detasemen, berwasiat kepada dia secara khusus agar takwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum Muslim yang Bersama dirinya. Kemudian beliau bersabda, “Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah... (dan di antaranya pesan di atas).”

Imam Muslim (w. 261 H) mengeluarkan hadis ini di dalam *Shahîh Muslim*, hadis no. 1753; Imam Ahmad (w. 241 H) di dalam *Al-Musnad*, hadis no. 22978 dan 23030; Imam Ibnu Majah (w. 273 H) di dalam *Sunan Ibnî Mâjah*, hadis no. 2858; Imam Abu Dawud (w. 275 H) di dalam *Sunan Abî Dâwud*, hadis no. 2612; Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) di dalam *Al-Jâmi’u al-Kabîr – Sunan at-Tirmidzî*, hadis no. 1617; Imam an-Nasa’î (w. 303 H) di dalam *Sunan al-Kubrâ*, hadis no. 8627, 8712 dan 8731; Imam asy-Syafi’î (w. 204) di dalam

Musnad asy-Syafi’î, hadis no. 384, menurut tartib as-Sindi; Imam Abu Yusuf (w. 182 h) di dalam *Al-Atsâr*, hadis no. 875; Imam Ibnu Zanzawayh (w. 251 H) di dalam *Al-Awâl li Ibni Zanzawayh*, hadis no. 102, 757 dan 759. Hadis ini juga dikeluarkan oleh para imam lainnya.

Dâr al-Muhâjirîn (negeri kaum Muhajirin) maknanya adalah *Dâr al-Islâm*, yakni Daulah Islamiyah. Sabda Rasul saw., “*at-tahawwâl min dârihim ilâ dâr al-muhâjirîn*” menurut Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) di dalam *Mirqâtû al-Mafâtîh Syarhu Misykât al-Mashâbih*, juga Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri (w. 1353 H) di dalam *Tuhfah al-Akhwâdzî Syarhu Jâmi’ at-Tirmidzî*, maknanya adalah *intiqa’lu min dâr (bilâd) al-kufri ilâ Dâr al-Islâm*, yakni berpindah dari darul kufur ke Darul Islam.

Sabda Rasul saw. selanjutnya, “*in fa’alû dzâlika fa lahum mâ li al-muhâjirîn wa ‘alayhim mâ ‘alâ al-muhâjirîn*”, di sini beliau menyatakan syarth (syarat), yaitu berpindah dari darul kufur ke Darul Islam, dan *jawab syarth*-nya, yakni mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh kaum Muhajirin.

Berpindah dari darul kufur ke Darul Islam maknanya bukan sekadar berpindah sementara, tetapi berpindah untuk menetap di Darul Islam. Artinya, menjadi warga negara Daulah Islamiyah. Ini menunjukkan bahwa berpindah ke Darul Islam, yakni menjadi warga negara Daulah Islamiyah, menjadi syarat untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana warga negara Darul Islam lainnya. Atas dasar itu, seorang Muslim, jika belum menjadi warga negara Daulah Islamiyah, tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara Daulah Islamiyah. Sebaliknya, orang kafir yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah, yakni menjadi kafir *dzimmi*, mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana warga negara Daulah Islamiyah lainnya, kecuali yang dikecualikan oleh nas syariah.

Dari sini dirumuskan kaidah berkaitan orang kafir dzimmi: “*Lahum maa li al-muslimîn min al-inshâf wa ‘alayhim mâ ‘alâ al-muslimîn min al-intishâf* (Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana kaum Muslim secara adil).”

Hak itu termasuk hak mendapatkan berbagai pelayanan dan fasilitas dari negara kepada warga negara Daulah Islamiyah. Juga hak untuk memanfaatkan harta milik umum, fasilitas publik dan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar.

Pemanfaatan kepemilikan umum oleh warga negara yang Muslim maka hal itu sudah jelas. Adapun terkait *ahludz-dzimmah*, yakni warga negara Daulah Islamiyah yang masih kafir, maka selain ditunjukkan secara umum oleh hadis di atas, juga ada banyak nas dan fakta pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin yang semuanya menunjukkan hal itu.

Dulu pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin, *ahludz-dzimmah* berjalan di jalan umum, ke pasar melakukan jual-beli, sementara pasar dan jalan termasuk kepemilikan umum. Mereka juga memanfaatkan air, api dan padang gembalaan. Rasul saw. bersabda,

“*Tsalâtsun lâ yumna’na: al-mâ`u wa al-kalâ`u wa an-nâru* (Ada tiga jenis harta yang tidak boleh dihalangi (pemanfaatannya): air, padang gembalaan dan api).

Para Sahabat telah berijmak bahwa kaum Nasrani Syam bersama dengan kaum Muslim memanfaatkan sungai-sungai Syam. Demikian juga kaum Majusi di Irak dan Bahrain. Orang-orang Qibthi Mesir juga memanfaatkan air Sungai Nil Bersama-sama kaum Muslim baik untuk keperluan minum, kebutuhan rumah tangga, mengairi tanaman atau yang lainnya. Mereka juga mencari kayu bakar dari hutan, mengairi tanaman mereka dari sungai, mengembalikan hewan ternak mereka di padang gembalaan umum.

Mereka juga berhak untuk menghidupkan tanah mati. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul saw., “*Man ahyâ ardh[an] maytat[an] fahiya lahu* (Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad).

Juga sabda Rasul saw., “*Man a’mara ardh[an] laysat li ahad[in] fahuwa ahaqq* (Siapa saja yang memakmurkan tanah yang bukan milik seorang pun maka dia lebih berhak (atas tanah tersebut).” (HR al-Bukhari dari Aisyah ra)..

Ini berlaku umum, yakni mencakup semua warga negara baik muslim maupun *ahludz-dzimmah*.

Dengan demikian seluruh rakyat (warga negara), baik Muslim maupun *ahludz-dzimmah*, berhak menggunakan dan memanfaatkan kepemilikan umum dan fasilitas publik seperti jalan transportasi darat, laut dan udara, sarana komunikasi publik, rumah sakit, sekolah, taman, lapangan; juga berhak memanfaatkan sumber air umum, api dan sumber energi seperti listrik yang termasuk kepemilikan umum, hutan, padang gembalaan umum, sungai, saluran irigasi dan kepemilikan umum atau fasilitas publik lainnya.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. [Yoyok Rudianto]

AT-TAGHLĪB

التَّغْلِيبُ

Lafal umum menurut asalnya hanya mencakup atau meliputi satuan atau unitnya dalam jenisnya saja, dan tidak mencakup selainnya. Hanya saja, orang Arab dalam kondisi-kondisi tertentu menggunakan lafal umum untuk juga mencakup selain unit atau satuannya karena adanya hubungan di antara keduanya yang mereka jelaskan di dalam bahasa mereka. Itulah yang disebut uslub *at-taghlīb* (Lihat: Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, *Taysīr al-Wushūl ilā al-Ushūl*, hal. 230).

Dalam pembahasan para ulama ushul di antaranya ketika mereka membahas cakupan *isim jamak mudzakar* (laki-laki) terhadap yang *mu'annats* (perempuan).

Menurut Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah, dengan meneliti secara mendalam penggunaan *at-taghlīb* oleh orang Arab dalam bahasa mereka, maka dapat diketahui penggunaan itu dalam beberapa keadaan:

Pertama, *taghlīb* lafal *mudzakar* untuk mencakup *mu'annas*, yakni mengunggulkan lafal laki-laki untuk juga mencakup lafal perempuan. Jika laki-laki dan perempuan diseru dengan aktivitas yang sama bagi keduanya maka akan digunakan lafal *mudzakar*. Misal, penggunaan lafal *ūlu al-albâb*. Lafal ini

maknanya juga mencakup *ūlatu al-albâb*. Contoh lain, firman Allah SWT: *Yâ ayyuha al-ladzīna âmanû ittaqûllâha...* Lafal *âmanû* (dalam bentuk lafal *mudzakar*) maknanya juga mencakup perempuan-perempuan yang beriman.

Hanya saja, jika yang diserukan adalah aktivitas yang khusus untuk laki-laki menurut *qariinah* yang menyertainya, maka penggunaan lafal *mudzakar* di situ tidak secara *taghlīb*. Misal, dalam QS al-Jumu'ah [62]: 9: *Yâ ayyuha al-ladzīna âmanû idzâ nûdiya li ash-shalâti jum'ati fas'au ilâ dzikrilLâh*. Penggunaan lafal *al-ladzīna âmanû* dan *fas'au* tidak secara *taghlīb*. Jadi lafal itu tidak mencakup perempuan, tetapi hanya mencakup laki-laki. Sebabnya, shalat Jumat hanya diwajibkan atas laki-laki.

Jika yang dimaksudkan dari *khithaab* adalah untuk menonjolkan hubungan suatu hukum perempuan dengan derajat yang sama dengan laki-laki untuk menghilangkan kerancuan pemahaman, maka digunakan seruan kepada perempuan dan laki-laki secara terpisah. Di isni juga tidak ada *taghlīb*. Misal, pertanyaan wanita kepada Rasul saw. dengan *taghlīb* seruan hukum untuk laki-laki, mungkin karena dia menduga perempuan kurang penting. Lalu turun beberapa ayat yang menyatakan perempuan dan laki-laki



secara terpisah untuk menghilangkan kerancuan itu. Di antaranya firman Allah SWT: *Fa[il]stajâba lahum rabbuhum annî lâ udhî'u 'amala 'âmil[il]in minkum min dzakar[il]in aw untsâ* (QS Ali Imran [3]: 195). Juga firman Allah: *Inna al-muslimîna wa al-muslimât wa al-mu'minîna wa al-mu'minât...* Masih banyak lagi ayat lainnya. Semua itu merupakan pernyataan yang menonjolkan hubungan hukum perempuan dengan derajat yang sama dengan laki-laki dari sisi pujian.

Kadang pernyataan terpisah itu juga digunakan untuk menonjolkan hubungan hukum dari sisi celaan. Misal, firman Allah: *Wa'adalLâhu al-munâfiqîna wa al-munâfiqât ...* (QS at-Taubah [9]: 68). Juga firman Allah: *Wa yu'adzdziba al-munâfiqîna wa al-munâfiqât wa al-musyrikîna wa al-musyrikât ...* (QS al-Fath [48]: 6).

Kedua, taghlib khithaab yang berakal untuk juga mencakup yang tidak berakal. Ini dalam keadaan jika yang diseru adalah yang berakal dan yang tidak berakal sekaligus, maka digunakan lafal yang *mudzakar*. Contohnya firman Allah SWT: *Wa idzâ massakum adhdhurru fî al-bahri dhalla man tad'ûna illâ iyyahu* (Jika kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kalian seru kecuali Dia) (QS al-Isra' [17]: 67). Seruan ini ditujukan kepada kaum musyrik. Mereka menyembah berhala dan lainnya, yang tidak berakal dan yang berakal. Di sini dilakukan *taghlib* seruan yang berakal "*man*" untuk juga mencakup yang tidak berakal. Ini untuk menonjolkan bahwa apa yang mereka klaim sebagai tuhan dan mereka sembah tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak dapat menjawab doa mereka dalam kondisi itu meskipun sesembahan mereka itu adalah yang berakal, apalagi sesembahan yang tidak berakal. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa hanya Allah sajalah tuhan yang berhak disembah dan dapat menjawab doa dan menyelamatkan dalam situasi itu.

Jika keberadaan yang berakal bersama yang tidak berakal itu tidak berpengaruh pada hukum, seolah tidak ada, maka dilakukan *taghlib* seruan untuk yang tidak berakal mencakup yang berakal. Contohnya firman Allah: *Innakum wa mâ ta'budûna min dunnillâh hashabu jahannam* (QS al-Anbiya' [21]: 98). Lafal "*mâ*" adalah seruan untuk yang tidak berakal itu secara *taghlib* juga mencakup yang berakal sehingga mencakup Isa as. dan Uzair. Dalilnya adalah sanggahan Ibnu az-Zib'ara yang memahami bahwa Isa as. dan Uzair juga termasuk dalam cakupan lafal "*mâ*" dan pengecualian keduanya dari ayat ini oleh ayat berikutnya.

Jika yang berakal itu seolah tidak ada bukan karena tidak berpengaruh, tetapi karena maksud dari *khithaab*-nya adalah menonjolkan minimnya yang berakal itu dibandingkan dengan makhluk yang tidak berakal, maka digunakan lafal seruan yang tidak berakal yakni "*mâ*" secara *taghlib* untuk juga mencakup yang berakal. Contohnya firman Allah: *Wa lillâhi mâ fî as-samâwâti wa mâ fî al-ardhi* (QS an-Nisa' [4]: 133). Lafal "*mâ*" ini juga mencakup yang berakal secara *taghlib*. Hal itu untuk menonjolkan makna bahwa makhluk tidak berakal yang tunduk kepada Allah sangat banyak sekali dibandingkan makhluk berakal.

Jika yang berakal itu tidak diketahui sifat dan substansinya pada yang menyeru (*al-mukhâthib*) atau yang diseru (*al-mukhâthab*) maka digunakan lafal seruan untuk yang tidak berakal seperti lafal "*mâ*" secara *taghlib* untuk mencakup yang berakal. Contohnya firman Allah: *Wa lâ yahillu lahunna an yaktumna mâ khalaqaLâhu fî arhâmihinna* (QS al-Baqarah [2]: 228).

Jika seruannya disematkan pada yang berakal dari sisi halal dan haram seperti sesuatu, maka digunakan lafal seruan untuk yang tidak berakal. Contohnya firman Allah: *Fa[an]ki[il]û mâ thâba lakum min an-nisâ'...* (QS an-Nisa' [4]: 3); *Wa al-muḥshanātu min an-*



nisâ' illâ mâ malakat aymânuhum (QS an-Nisâ' [4]: 23); *Wa lâ tunkihû mâ nakaha abâ'ukum min an-nisâ'...* (QS an-Nisâ' [4]: 22). Dalam semua ayat itu digunakan lafal "mâ" untuk yang tidak berakal. Padahal yang dimaksudkan adalah yang berakal yaitu *an-nisâ'* (wanita), sebab yang dimaksudkan adalah untuk menonjolkan hukum halal dan haramnya.

Ketiga, taghlib sifat yang berakal, yakni jika yang tidak berakal disifati dengan sifat yang berakal, maka digunakan lafal untuk yang berakal. Contohnya firman Allah: *Innî raytu ahâda 'asyara kawkab[an] wa asy-syamsa wa al-qamara raytuhum li sâjidîn* (QS Yusuf [12]:). Digunakan lafal yang berakal yakni "hum" dalam "*ra'aytuhum*" yang merujuk pada bintang, matahari dan bulan, sebab ketiganya disifati dengan sifat yang berakal yaitu "*sâjidîn* -sujud-".

Inilah keadaan-keadaan penggunaan *at-taghlib* menurut penggunaannya oleh orang Arab. Atas dasar penggunaan mereka maka *at-taghlib* itu menjadi bagian dari kaedah bahasa Arab.

Abdul Karim an-Nimlah di dalam *Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushûl al-Fiqhi al-Muqârân* (4/1554) menyatakan bahwa kaidah *at-taghlib* digunakan pada orang Arab dan digunakan di dalam *kalam* mereka. Al-Quran dan al-Hadis datang menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu, di dalam al-Quran dan al-Hadis juga digunakan *at-taghlib* itu.

Di antaranya *taghlib* jamak orang yang berakal jika yang tidak berakal juga sama-sama dimaksudkan. Penyebutan lafal yang berakal itu maknanya mencakup yang tidak berakal. Contohnya QS an-Nur [24]: 45.

Di antaranya adalah *taghlib* salah satu *isim* atas yang lain karena beberapa sebab: *Pertama*, karena lebih mulianya penyebutan laki-laki. Misal, firman Allah: *Wa li abawayhi likulli wâhid[în] minhuma as-sudusu* (QS an-Nisâ' [4]: 11). Di sini lafal *al-abbu* di-*taghlib*-kan atas *al-*

ummu (ibu). Makna *abawayhi* itu adalah bapak dan ibu, bukan bapak saja, ini secara *taghlib*.

Kedua, karena salah satu *isim* didominasi atas yang lain karena ringan atau minimnya yang lain itu dibanding yang dominan. Karena itu digunakan *isim* yang dominan, namun secara *taghlib* juga mencakup yang lain itu. Contohnya dalam QS an-Nisâ' [4]: 133 dan QS al-Anbiya' [21]: 98 seperti disebutkan di atas.

Ketiga, karena salah satu *isim* didominasi (*taghlib*) atas yang lain karena ketidaksukaan menyebutkan *isim* yang lain itu. Contohnya ucapan Aisyah ra.: *Wa mâ lanâ 'aysyun illâ al-aswadân* (Tidak ada kehidupan untuk kami kecuali dua yang hitam)." Yang ia maksudkan dengan *al-aswadân* (dua yang hitam) adalah kurma dan air. Kurma adalah hitam, sedangkan air adalah putih. Lalu *at-tamru* (kurma) yang hitam didominasi dan keduanya disebut dengan sifatnya. Padahal keduanya adalah mudzakar. Namun, orang Arab tidak suka menyebutkan lafal *al-bayâdh* karena merancukan pada *al-barash* (kusta). Oleh karena itu mereka (orang Arab) menyebut warna kulit putih dengan sebutan *al-ahmar* bukan *al-abyadh*. Di antaranya itu digunakan dalam sabda Rasul saw: "*Bu'itstu ilâ al-aswada wa al-ahmara* (Aku diutus kepada orang berkulit hitam dan berkulit putih)."

Demikianlah Arang arab menggunakan lafal umum secara *at-taghlib* agar juga mencakup selain satuan dalam jenisnya. Namun, itu bukan ketentuan asal. Penggunaan *at-taghlib* itu karena adanya hubungan antara satuan jenisnya dengan selainnya itu atau karena sebab tertentu. Dilihat dari sisi ini, *at-taghlib* itu serupa dengan *majaz*, bahkan sebagian ulama menilainya termasuk *majaz*. Selain itu penggunaan *at-taghlib* itu dimaksudkan untuk menonjolkan makna tertentu dan memberikan impresi yang lebih.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yoyok Rudianto]



AMERIKA PALING DIUNTUNGGAN DARI PERANG SAUDARA DI SUDAN

Juru Bicara Resmi Hizbut Tahrir Wilayah Sudan

Sebelum berbicara tentang konflik yang sedang berlangsung antara Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan tentara di Sudan, perlu ada latar belakang realitas Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang dibentuk oleh undang-undang khusus pada masa pemerintahan Omar al-Bashir yang digulingkan. RSF tidak berafiliasi langsung dengan tentara, tetapi langsung di bawah Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Omar al-Bashir, dengan menggali emas untuk membiayai pasukannya tanpa audit atau pengawasan. Inilah yang membuat pasukan tersebut menjadi kuat dalam waktu singkat.

Tujuan utama pembentukan pasukan ini adalah untuk membantu tentara dalam menumpas pemberontakan di Darfur. Selama pemerintahan al-Bashir, pasukan ini memiliki keistimewaan khusus yang tidak ada di tentara. Pemimpin mereka, Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti), diizinkan memiliki kerajaan keuangan yang sangat besar di samping hubungan regional dan internasional di luar kerangka resmi negara. Ketika gerakan melawan rezim penyelamat terjadi, Komite Keamanan berpikir untuk menyelamatkan rezim dari kejatuhan serta berusaha untuk menyingkirkan pimpinan rezim dari kekuasaan. Saat itu Komite Keamanan membujuk Hemedti bergabung menjadi bagian

dari Dewan Militer Transisi, dan itu benar-benar terjadi.

Setelah penandatanganan dokumen konstitusi pada Agustus 2019 antara Dewan Militer dan warga sipil, Hemedti menjadi orang kedua di negara bagian itu. Dia menjadi wakil Letnan Jenderal al-Burhan, yang menjadi kepala Dewan Kedaulatan, dengan dukungan langsung dari Amerika. Jadi kedua orang ini, Hemedti dan al-Burhan, menjadi wakil Amerika di Sudan melawan kekuatan kebebasan dan perubahan yang dianggap mengekor Eropa, khususnya Inggris.

Sejak saat itu, konflik Anglo-Amerika berkecamuk di Sudan antara militer dan warga sipil. Kekuasaan selalu berada di tangan kelompok terkuat. Kekuasaan yang sebenarnya ada dan masih berada di tangan para pemimpin militer Amerika.

Adapun Inggris, melalui orang-orangnya, sedang mencoba untuk merebut kekuatan ini dengan menjadikan tentara di bawah kendali warga sipil. Oleh karena itu, desakannya adalah untuk merestrukturisasi tentara, mereformasinya, dan menjadikannya di bawah kontrol Perdana Menteri sipil.

Ketika banyak politisi dan pengamat yang meragukan atas jalannya peristiwa, bahwa konflik ini bukanlah konflik yang serius, maka Amerika

terpaksa membuat itu tampak nyata di lapangan. Karena itu Amerika mengarang pertempuran antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mereka tidak peduli darah kaum Muslim tertumpah. Sebabnya, itu darah yang tidak ada nilainya bagi mereka atau agen-agensya sampai masyarakat yakin bahwa konflik itu nyata. Hal ini dibantu oleh kebencian yang telah ditanam di antara kedua kekuatan sejak lama. Karena itu tidak masalah jika ratusan orang terbunuh dan ribuan terluka di kedua pihak. Bahkan jika warga sipil yang tidak berdaya yang tidak berkepentingan sama sekali dalam pertarungan terlarang ini yang menjadi korbannya.

Lalu terjadi penandatanganan kesepakatan final setelah *framework agreement* (kesepakatan kerangka kerja) ditandatangani pada Desember tahun lalu. Kesepakatan final ini, jika ditandatangani oleh militer dalam bentuk yang disiapkan oleh warga sipil, berarti pengalihan kekuasaan nyata kepada agen-agen Inggris. Ini tidak akan dibiarkan oleh Amerika dengan biaya berapa pun. Karena itu dibuatlah konflik antara al-Burhan dan Hemedti yang bertujuan untuk mengalihkan konflik ke bentuk lain, dan mengendalikan arena politik dengan ini. Dengan demikian kekuatan sipil membuat konsesi yang mempertahankan eksistensi militer dalam kekuasaan.

Pembunuhan, vandalisme dan pengusiran orang-orang dari wilayah tempat tinggalnya, terutama ibukotanya, Khartoum, masih menjadi judul paling menonjol dari peristiwa di Sudan.

Terlepas dari berulang kali deklarasi gencatan senjata tanpa komitmen terhadapnya, dan seperti kebiasaan orang kafir kolonial, ketika dia membakar di negara Muslim mana pun, maka perhatian pertama dan utamanya adalah melindungi mata-matanya, kedutaannya, dan sarang spionasenya. Adapun rakyat di negara itu, biarlah mereka mati karena peluru atau karena kekurangan obat dan makanan. Mahabener Allah SWT dengan firman-Nya (yang artinya): *Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan*

dengan orang Mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian (TQS at-Taubah [9]: 10).

Para agen Inggris memahami pesan itu. Karena itu dalam pernyataan kekuatan kebebasan dan perubahan kepada *Al-Hadath TV*, dinyatakan bahwa tujuan perang ini adalah militerisasi kehidupan dan penghapusan akar kehidupan sipil. Oleh karena itu, kekuatan kebebasan dan perubahan menyerukan komunitas internasional untuk menekan dan menghentikan perang. Sebabnya, diketahui bahwa perang itu ada di tangan Amerika, dan semua perhatian dari kekuatan ini adalah untuk mencapai tahta kekuasaan. Tidak peduli untuk mencapai itu harus menumpahkan darah dan berjalan di atas tengkorak rakyat yang tak berdosa. *Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah* (tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah).

Amerika, yang para agennya telah menyulut perang ini, mengevakuasi warganya dan staf kedutaannya, mengumumkan penangguhan pekerjaan kedutaan, dan memperingatkan, bahwa menurut pernyataan kementerian luar negerinya, kondisi keamanan di Sudan tidak akan membaik dalam jangka pendek. Amerikalah yang dapat menghentikan perang ini jika ia ingin hanya dengan lambaian jarinya kepada kedua orangnya, al-Burhan dan Hemedti. Keduanya yang menyetujui gencatan senjata yang dikenakan padanya untuk mengevakuasi warganya dan lainnya. Namun, Amerika menginginkan perang untuk tetap berkobar sehingga mencapai apa yang diinginkan dengan menumpahkan darah dan melumpuhkan rakyat Sudan.

Perang adalah kebijakan yang dijalankan Amerika di setiap tempat di mana Amerika memiliki antek-antek yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakannya demi kepentingannya.

Adapun sikap antek-antek Amerika di kawasan itu, seperti biasa, adalah memberikan dukungan kedua pihak untuk mengintensifkan perang. Sebagaimana dinyatakan dalam *The Wall Street Journal* yang diterbitkan pada 19/4/2023,

Jenderal Libya Haftar mengirim dukungan militer kepada komandan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti). Sebaliknya, tentara Mesir mengirim dukungan kepada tentara Sudan. Kita juga menyaksikan hal yang sama dalam perang Yaman di mana antek-antek Amerika berperang dengan dukungan Arab Saudi dan Iran. Ketika John Garang melakukan pemberontak terhadap tentara al-Bashir, keduanya adalah antek Amerika, yang ingin memisahkan Sudan selatan, sehingga kedua agen tersebut mencapai apa yang diinginkan

Wahai rakyat Sudan, terutama perwira dan tentaranya: Janganlah kalian menjadi bahan bakar untuk perang demi kepentingan penjajah kafir hingga darah terlarang tertumpah. Namun, jadilah para penolong Islam. Janganlah kalian menyerahkan kesetiaan kalian kepada para pemimpin yang menjual diri mereka kepada setan dan para pembantunya. Namun, berikanlah pertolongan kalian kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan Khilafah Rasyidah 'ala minhâjin nubuwah. [Sumber: <https://www.alraiah.net>]

Riwayat Dua Jenderal yang Bertikai

Kehidupan di ibukota Sudan, Khartoum, dan di banyak bagian lain negara itu, tiba-tiba berubah secara dramatis menjadi lebih buruk. Ada dua jenderal di jantung krisis ini: Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), dan Mohammed Hamdan Dagalo, yang lebih dikenal sebagai Hemedti, kepala dari kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Kedua jenderal itu dulunya bekerjasama, melakukan kudeta Bersama. Namun, kini pertempuran mereka demi meraih supremasi justru menghancurkan Sudan.

Keduanya memainkan peran kunci dalam kelompok pemberontak Darfur dalam perang saudara di wilayah barat Sudan yang dimulai pada 2003. Jenderal Burhan mengendalikan tentara Sudan di Darfur. Hemedti merupakan komandan salah satu dari banyak kelompok milisi Arab, yang dikenal sebagai Janjaweed, yang digunakan pemerintah untuk menumpas secara brutal kelompok pemberontak Darfur yang sebagian besar merupakan non-Arab.

Majak D'Agoot saat itu merupakan Wakil Direktur Badan Intelijen dan Keamanan Nasional, sebelum dia menjadi wakil menteri pertahanan di Sudan Selatan ketika wilayah itu memisahkan diri pada 2011. Dia bertemu Jenderal Burhan dan Hemedti di Darfur, dan mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan baik.

Kekuatan Hemedti berkembang secara masif begitu dia mulai memasok pasukan untuk berperang bagi koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Penguasa militer Sudan pada saat itu, Omar al-Bashir, mengandalkan Hemedti dan RSF sebagai penyeimbang angkatan bersenjata reguler, dengan harapan akan terlalu sulit bagi kelompok bersenjata mana pun untuk menggulingkannya. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan aksi protes, para jenderal bersatu untuk menggulingkan Bashir pada April 2019.

Belakangan, masih dalam tahun yang sama, mereka menandatangani perjanjian dengan para pengunjuk rasa untuk membentuk pemerintahan sipil yang diawasi oleh Dewan Berdaulat, yakni sebuah badan gabungan sipil-militer di mana Jenderal Burhan menjadi pemimpinnya dan Hemedti sebagai wakilnya. Ketegangan antara tentara dan RSF meningkat seiring dengan kian dekatnya tenggat waktu untuk membentuk pemerintahan sipil, yang fokus pada persoalan pelik soal bagaimana RSF harus diintegrasikan kembali ke dalam angkatan bersenjata reguler. [Sumber: *BBC*]



JEJAK KHILAFAH DI SULAWESI

Menyibak Jalinan Politik dan Spiritual yang Dilupakan¹(Bagian 6)

Nicko Pandawa²

Setelah selesai menciptakan suasana kondusif di seluruh Sulawesi Selatan, Sultan Alauddin Gowa mengalihkan pandangannya ke luar pulau. Islam telah membuka matanya akan keluasan jaringan kaum Muslim yang bertaraf *world-wide*. Gowa siap mengubah ekonomi politiknya dari yang bersifat agraris menjadi maritim. Sultan Alauddin adalah karaeng Gowa yang pertama kali menjalin persahabatan dengan para penguasa Aceh dan Mataram (*karaenga uru mabela-bela taqle ri Ace Karaenga ri Matarang*).¹

Politik luar negeri Gowa dan Tallo' yang meluas ini adalah konsekuensi dari partisipasi mereka menjadi bagian dari *Ummah Islamiyyah*, sebagaimana yang dinilai Andaya:

Goa now enjoyed as part of the Moslem world. It became a part of the community of Islam (ummat) and thereby associated spiritually with the prestigious and fabulous Moslem court of Rum (Turkey) and Mogul

*India, and nearer to home, to Aceh, the rising power in western Indonesia.*²

Walau dua kerajaan yang bersatu di Makassar mengukuhkan penguasa Gowa, Sultan Alauddin *Tumamenang ri Gaukanna* sebagai pemimpin tertinggi, pada hakikatnya yang menjadi otak intelektual di belakang kebijakan ekspansioner Makassar adalah sang *tuma' bicarabutta* (mangkubumi) dari Tallo', Sultan 'Abdullah Awwal al-Islam, *Tumamenang ri Agamaana*. Karaeng Tallo' tersebut adalah orang yang paling antusias dalam keislamannya. Tidak mencukupkan diri dengan belajar agama kepada Datu' ri Bandang, Sultan 'Abdullah tekun mempelajari bahasa Arab dari para ulama seperti Khatib Intang dan *Khoja* (Turkiye: *Hoca*, Ustadz) Munawwar.³

Dia juga rajin menjalankan shalat-shalat *naafilah* seperti shalat rawatib, witr, dhuha, tasbeih, dan tahajud. "Paling sedikit dia mengerjakannya dua rakaat. Paling banyak

sepuluh rakaat,” begitu kesaksian I Lo'mo' ri Paotereka, salah satu istri Sultan 'Abdullah Tallo'.

“Setiap malam Jumat dia melaksanakan shalat tasbih. Sepanjang bulan Ramadhan, setiap malamnya dia selalu menyedekahkan emas.”⁴

Kesalihan pribadinya patut juga diimbangi dengan kuatnya kebijakan Sultan 'Abdullah Tallo' akan politik ekonomi dan pertahanan. Ia membangun industri senjata api dan meriam, benteng-benteng batu, irigasi, memperkuat tiang kapal kargo, dan menginisiasi pembangunan kapal-kapal perang kerajaan. Adalah idenya untuk mem-*futuuhaat* wilayah luar Sulawesi seperti Bima, Dompu, Sumbawa, Selaparang, Pekat dan Tambora di Nusa Tenggara Barat. Sultan 'Abdullah Tallo' mengubah status negeri-negeri itu dari *dar al-kufri* menjadi *Dar al-Islam* dan mewajibkan mereka membayar *jizyah*. Bersama Sultan Alauddin Gowa, Sultan Tallo' mengimigrasikan kaum Muslim Makassar ke pulau-pulau itu agar menjadi *mokkeng (muqim)* dan bisa dilaksanakan shalat Jumat sebagai syiar Islam secara publik.⁵

Hal ini diafirmasi sumber Bima yang terang-benderang menyatakan:

Adapun asal mulanya pada zaman dulu kala tatkala dikalahkan Bima oleh Mangkassar. Sebab tiada mau membawa iman agama Islam, maka oleh Paduka Yang Dipertuan kita Raja Gowa akan menyuruh (k)alahkan Bima dengan senjata.⁶

Dengan demikian, Kesultanan Gowa dan Tallo' selama paruh pertama abad ke-17 adalah kesultanan yang berusaha menegakkan syariah Islam sebagai hukum resmi negaranya. Politik luar negerinya dilandasi semangat menyebarkan Islam ke seluruh kepulauan di perairan timur negeri Jawi. Dakwah dan jihad menjadi metode bakunya, dengan prinsip

bahwa kesultanan ini “meminta kepada semua wilayah Gowa beserta kerabatnya masuk Islam, dan yang tidak masuk Islam akan diperangi Gowa” (*naelorang manenni selleng sininna lilina Gowa sibawa pasiajingeng-na ri musu-ri matu ri Gowa tiyae selleng*). Tujuannya adalah agar “bersama-sama mengikrarkan syahadat dan bersama menyembah Allah, dan sesungguhnya ibadah kita adalah sembahyang dan berpuasa” (*nabalingngaq sahadaq taqkasiwiangengngi Dewata naniya kasiwiyangta sempajang puwasa*).⁷

Sangat jelas bahwa metode dan tujuan tersebut mengacu kepada sabda mulia Rasulullah saw.:

أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و يقيم الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصمو مني دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم على الله

Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka lakukan itu maka darah dan harta mereka aman dariku, kecuali yang sesuai dengan hak Islam, sedangkan perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah.”⁸

Pentahbisan Gelar *Sultan* untuk Raja-Raja Sulawesi

Salah satu bacaan *tsaqaafah* Islam yang digemari para pangeran dan sultan sekepulauan Jawi adalah *At-Tibr al-Masbuuk fii Nashiihat al-Muluukkarya* Imam Abu Hamid al-Ghazali (wafat 505/1111). Terjemahannya dijumpai di Aceh, Jawa dan pulau-pulau lain di Asia Tenggara. Selain *Nashiihat al-Muluuk*, ada juga kitab Imam al-Ghazali yang jauh lebih populer seperti *Ihyaa' al-'Uluum ad-Diin*. Di

Tarikh

dalamnya Imam al-Ghazali menuliskan satu pasal penting terkait hierarki kekuasaan Islam:

فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة و من
استبد بالشوكة و هو مطيع للخليفة في أصل
الخطبة و السكة فهو سلطان نافذ الحكم و
القضاء في أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام

Khalifah adalah orang yang dibiati para pemilik kekuasaan. Mereka yang memegang kuasa dan menaati Khalifah dalam penyebutan khutbah dan percetakan mata uang adalah Sultan yang menjalankan hukum serta peradilan di negeri wilayahnya dengan penuh keabsahan.⁹

Jabatan Sultan yang berada di bawah Khalifah adalah hal yang lazim diketahui di Dunia Islam sejak era Khilafah 'Abbasiyah. Penegakan otoritas di wilayah provinsi diserahkan kepada para Sultan, sementara sosok Khalifah adalah tempat berpulangnya baiat (*anna al-wilaayah naafidzah li's-salathin fi aqthar al-bilaad wa'l-mubayi'ina li'l-khalifah*).¹⁰

Pembaiatan kepada Khalifah yang berkuasa di pusat Dunia Islam senantiasa dilakukan oleh sultan-sultan seluruh dunia, baik di era 'Abbasiyah yang berpusat di Baghdad/Kairo maupun era 'Utsmaniyah di Istanbul.

Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar dari Aceh menjadi pionir sultan-sultan negeri Jawi dalam pembaiatan kepada Khalifah 'Utsmaniyah pada tahun 973/1566. "Dengan bersungguh-sungguh, saya meminta agar Padyabah tidak lagi memandang saya, hambanya di tanah (Aceh) ini, sebagai penguasa yang independen," tulis Sultan al-Qahhar kepada Khalifah Suleyman al-Qanuni, "melainkan sudi menerima saya sebagai hambanya yang miskin dan rendah, yang dapat berkuasa berkat kemurahan hati Sang Padyabah, sang pelindung

dunia, bayangan Allah (di muka bumi); dengan jalan yang tiada berbeda dari gubernur Mesir, Yaman, atau para Bey di Jeddah dan Aden."¹¹ Keinginan Sultan al-Qahhar adalah cerminan baiat yang dia lakukan dengan permintaan agar diangkat sebagai gubernur 'Utsmaniyah, sebagaimana lazimnya gubernur Khilafah di kota-kota Timur Tengah. □

Catatan Kaki:

- ¹ Makalah disampaikan dalam safari dakwah al-Faqir di Makassar, Palopo, Wotu, Kendari, dan Baubau selama 27 Oktober – 7 November 2022.
- ² Sarjana ilmu sejarah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020); Penulis buku *Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda: Riwayat Pan-Islamisme dari Istanbul sampai Batavia 1882-1928* (2021) dan *Dafatir Sulthaniyah: Menguak Loyalitas Muslimin Jawi kepada Khilafah Utsmaniyyah* (2022); Sutradara dan Script-Writer film dokumenter *Jejak Khilafah di Nusantara I & II*.
- ³ William P. Cummings, *A Chain of Kings*, 45, 77.
- ⁴ Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka*, 34.
- ⁵ J. Noorduyn, "Makassar and the Islamization of Bima", *Bijdragen tot de Taal-, en Volkenkunde*, Vol. 143 No. 2/3 (Leiden, 1987), 315.
- ⁶ "Tamassambayang majai sambayang sunnaq naerang kontua rateka wittirika aloaka nawariya tasaqjoka nakana l loqmoq ri Paotereka kaminang sikadena ruang rakakang kaminang jaina sampuloa rakanna bannginna Jumaka nasambayangangi sunnaq tasaqbea ponna romallang banngi-banngi assuluq saqaq bulaenna." William P. Cummings, *A Chain of Kings*, 89.
- ⁷ William P. Cummings, *A Chain of Kings*, 88; J. Noorduyn, "Makassar and the Islamization of Bima", 317, 322.
- ⁸ L. Massir Q. Abdullah, *Bo: Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima*, (Bima, 1981/2), 8. Dikutip dari J. Noorduyn, "Makassar and the Islamization of Bima", 312.
- ⁹ Husnul Fahimah Ilyas, *Lontaraq Suqkuna Wajo*, 89-90.
- ¹⁰ Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari wa Huwa: al-Jami' al-Musnad ash-Shahih*, jilid I (Kairo: Dar at-Ta'shil, 2012), 205 (#25).
- ¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Jilid II (Amman: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 154.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ "Ol-dergah-1 Mu'alla'ya reca-i vas lkl muz oldur ki: bu bendelerini sayir Padl_ahlar l dad lndan saymayup kendü 3ullar lndan diyar-1 MIs l r Belerbeisi veyahud Yemen Belerbeisi veya Cidde ve Aden Beleri 3ullar l l dad lndan Padl_ah-1 alem-penah-1 zill-i Olah hazretlerinün etraf vilayetlerinde sada3a yiyyen garib ü miskin ü +azin 3ullar l l dad lndan ma'dud buyuralar." Topkap I Saray I Müzezi Ar_ivi, E-8009. BOA, HR.SYS. 564/5. Dalam Ismail Hakki Kadi dan ACS. Peacock, *Ottoman-Southeast Asian Relation*, Jilid I, 41, 48.